

**KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
KEMAMPUAN DAERAH
DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

menempuh gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh:

Andi Santyo Wibowo

022114120

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2007

Skripsi

**KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
KEMAMPUAN DAERAH
DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH**

Studi Kasus pada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Disusun oleh:

Andi Santyo Wibowo

022114120

Telah disetujui oleh

Pembimbing I



Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.



Tanggal 29 Maret 2007

Pembimbing II



Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.

Tanggal 27 April 2007

Skripsi

**KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
KEMAMPUAN DAERAH
DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH**
Studi Kasus pada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Andi Santyo Wibowo

022114120

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal 21 Juli 2007

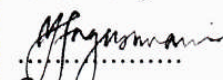
dan dinyatakan memenuhi syarat.

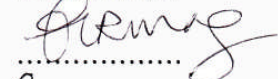
Susunan Panitia Penguji

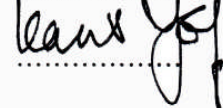
Nama Lengkap

Ketua : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt
Sekretaris : Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.
Anggota 1 : Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.
Anggota 2 : Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.
Anggota 3 : Ir.Drs.Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt.

Tanda Tangan


.....

.....

.....

.....

.....

Yogyakarta, 31 Juli 2007

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan,



(Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.)



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul : **Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemampuan Daerah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah** dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 21 Juli 2006 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 20 Mei 2007
Yang membuat pernyataan,

Andi Santyo Wibowo

ABSTRAK
KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
KEMAMPUAN DAERAH
DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH
Studi Kasus Pada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Andi Santyo Wibowo
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2007

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah; dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Jenis penelitian ini adalah studi kasus pada pemerintah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis Angka Indeks Berantai, perbandingan Pendapatan asli daerah terhadap Total Penerimaan Daerah, perbandingan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah, dan perbandingan Sumbangan atau Bantuan terhadap Total Penerimaan Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2001 sampai dengan 2005 selalu mengalami peningkatan, berkisar antara 16% sampai dengan 55%. Tingkat Derajat Otonomi Fiskal propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah selama tahun 2001 sampai dengan 2005 berfluktuasi, berkisar antara 34,13% sampai dengan 57,42% dan berada dalam kategori sedang atau pola hubungan partisipatif. Rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah selama tahun 2001 sampai dengan 2005 berfluktuasi, sedangkan rasio Sumbangan dan Bantuan terhadap Total Penerimaan Daerah mengalami penurunan.

ABSTRACT

THE CONTRIBUTION OF REGIONAL ORIGINAL REVENUE ON THE REGIONAL'S ABILITY IN IMPLEMENTING REGIONAL AUTONOMY

A case study of the government of Yogyakarta Special Province

**Andi Santyo Wibowo
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2007**

This research intended to find out the development of regional original revenue and its contribution to the regional's ability in implementing regional autonomy. The kind of this research was case study at the government of Yogyakarta Special Province. Data collection techniques used were library research, interview and documentation method's. The data analysis methods were chain index analysis, comparison of regional original revenue to the regional total income, comparison of tax and not tax revenue sharing fund to the regional total income, and comparison of grant or aid gain to the regional total income.

The result of this study showed that the development of regional original revenue during 2001 to 2005 was always increasing, it was about 16% to 55%. The level of fiscal autonomy degree of the government of Yogyakarta special province from the ratio of regional original revenue to the regional total income during 2001 – 2005 fluctuated around 34,13% to 57,42% and it was in medium category or in participative relation model . During 2001 to 2005, the ratio tax and not tax revenue sharing fund to the regional total fluctuated income, whereas the grant or aid ratio to the regional total income decreased.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan perlindungan- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana ekonomi pada Jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Skripsi ini berjudul KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEMAMPUAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH dengan studi kasus pada pemerintah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dapat terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Drs. Alex Kahu Lantum, M.S. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
2. Ir. Drs. Hansiadi Y.H., M.Si.,Akt., selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, masukan, arahan serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran,

masukan, arahan serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

5. Bapak Ir. H Nanang Suwandi, MMA., selaku kepala BAPEDA Propinsi DIY yang telah memberikan ijin bagi penulis untuk melakukan penelitian di Pemerintah Propinsi DIY.
6. Bapak Marsono selaku staf BPKD Propinsi DIY yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
7. Bapak dan ibu yang selalu sabar mendampingi, mendukung terima kasih atas doa, perhatian, kasih sayang dan segala pengertian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakak-kakaku “ Mas Agus, Mbak Sulis, dan Mas Wawan” yang selalu memberikan dorongan, semangat dan teguran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kekasihku tercinta “Agustina Wulandari” yang selalu memberikan kasih sayang, doa, bantuan, waktu serta senyum manis.
10. Sahabat karibku dari kecil: Ari Alex, Dias, Roy Ucok “still young and dangerous”
11. Anak-Anak Realino Resort, warung REALINO : Yosep, Anom, Om Tedjo, Agus Bonehead, Robert, Tiok, Keos, Anton, Satriyadi, Erwin, Hari Mehonk, Wahyu, Gery, Tejo, Joe yang selalu berbagi canda, tawa, gelas dan semua hal-hal yang menyenangkan dengan kalian.

12. Anak-anak Dirty Mouth : Gufi, Djarot, Sinung terimakasih atas beat-beat kencang dan melodi-melodi metal yang telah kita mainkan selama ini.
13. Mahasiswa Akuntansi Sanata Dharma kelas C angkatan 2002.
14. Anak-anak Djoyo community : Iwan Kentang, Gani Gendut, Pakem Sigit Pak Tua, Topeng, Wahyu, Tukul, Itok, Dika, Anang, dan semuanya terima kasih atas kebersamaan kita selama ini.
15. Anak-anak Dharmo community : Danik, Dower, Mesum, Topan, Meeng, Yanu, dll Terima kasih buat kalian.
16. Anak-anak Akuntansi dan Manajemen 2002 yang tidak bisa aku sebutkan satu per satu tetap ingat persahabatan kita.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca semua.

Yogyakarta, 23 Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pesetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto dan Persembahan.....	iv
Pernyataan Keaslian Karya	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiv

BAB I

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Sistematika Penulisan	4

BAB II

A. Pendapatan Asli Daerah	6
B. Pengertian Otonomi Daerah	11
C. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	16
D. Derajat Desentralisasi dan Tingkat Kemandirian Daerah	17

E. Review Penelitian Sebelumnya	19
---------------------------------------	----

BAB III

A. Jenis Penelitian	22
B. Waktu dan Tempat Penelitian	22
C. Obyek dan Subyek Penelitian	22
D. Teknik Pengumpulan Data	23
E. Teknik Analisis data	23

BAB IV

A. Sejarah Singkat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	27
B. Kondisi Geografis	28
C. Kependudukan	30
D. Sumber Daya Alam	32
E. Perekonomian	33
F. Sosial Budaya	36
G. Pariwisata	38
H. Pemerintahan	39

BAB V

A. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah	41
B. Tingkat Kemampuan Daerah	45

BAB VI

A. Kesimpulan	55
B. Keterbatasan Penelitian	57
C. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA	59
----------------------	----

LAMPIRAN	61
----------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	: 25
2 Data Realisasi PAD tahun 2001 - 2005.....	: 41
3 Perkembangan PAD Propinsi DIY tahun 2001 - 2005	: 43
4 Rasio PAD terhadap TPD Propinsi DIY tahun 2001 - 2005.....	: 47
5 Rasio BHP terhadap TPD Propinsi DIY tahun 2001 - 2005.....	: 50
6 Rasio B terhadap TPD Propinsi DIY tahun 2001 - 2005.....	: 54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Sistem ini diperlukan tidak saja sebagai alat untuk melaksanakan berbagai program pemerintah di daerah yang bersangkutan, tetapi juga sebagai alat bagi masyarakat setempat agar dapat berperan dalam menentukan prioritas untuk pembangunan daerahnya sendiri. Oleh karena itu pelaksanaan otonomi daerah dipandang sangat perlu untuk diselenggarakan, dengan memberikan suatu kewenangan pada daerah untuk mengatur dan memanfaatkan potensi daerah tersebut.

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah secara efektif dan efisien sangat tergantung kepada tersedianya sumber daya pendukungnya. Sumber daya ini merupakan faktor yang sangat dominan dalam mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu sumber daya bagi daerah tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah dan derajat otonomi fiskal merupakan tolak ukur pelaksanaan otonomi daerah, dimana semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah berarti semakin tinggi kualitas otonomi suatu daerah dan semakin tinggi derajat otonomi fiskal memperlihatkan kesiapan suatu daerah dalam berotonomi. Kontribusi

Pendapatan Asli Daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung proses otonomi daerah, karena kemampuan suatu daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian pemerintah daerah didorong untuk lebih berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah baik dari sektor pajak, retribusi, dan penerimaan daerah lainnya.

Pembiayaan terhadap suatu kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah sebaiknya dialokasikan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal. Dalam arti bahwa anggaran pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak boleh melebihi anggaran penerimaan, seperti yang diisyaratkan dalam Undang-undang No 33 Tahun 2004 pasal 67.

Dari sisi penerimaan, daerah dituntut untuk senantiasa mengoptimalkan pencapaian target penerimaan Pendapatan Asli Daerah, disamping memperoleh dana perimbangan yang sistem alokasinya ditetapkan sesuai kebutuhan yang berlaku. Sedangkan dari sisi pengeluaran, daerah dituntut untuk lebih meningkatkan efisiensi pengelolaan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang ada.

Disisi lain, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari dana perimbangan pemerintah pusat. Oleh karena itu bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka setiap daerah dituntut harus dapat membiayai daerahnya melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk

melihat bagaimana tingkat kemandirian propinsi Daerah istimewa Yogyakarta setelah ditetapkannya otonomi daerah. Tingkat kemandirian daerah itu sendiri dapat dilihat dari derajat otonomi fiskal serta kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah otonomi daerah?
2. Bagaimanakah tingkat kemandirian pada Pemerintah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah otonomi daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah otonomi daerah.
2. Untuk mengetahui Tingkat Kemandirian pada propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah otonomi daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam merencanakan serta mengelola keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah referensi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah sektor publik.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kemampuan keuangan daerah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah ke dalam praktik.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengertian Pendapatan Asli Daerah, otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, derajat desentralisasi dan kemandirian daerah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bab ini berisi tentang situasi dan kondisi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum meliputi sejarah singkat berdirinya, kondisi geografis, kependudukan, sumber daya alam, perekonomian, sosial budaya, pariwisata, pemerintahan.

BAB V : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang diskripsi data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang diperlukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sumber Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004, pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Devas (1989: 31) mengartikan Pendapatan Asli Daerah sebagai penerimaan dari pungutan pajak daerah, pungutan jasa layanan, iuran dari penerimaan lain dinas, laba dari perusahaan daerah dan penerimaan pembangunan yang digali atau dihasilkan oleh daerah. Menurut Ismanthono (2003: 124), Pendapatan Asli Daerah merupakan keuangan daerah yang berasal dari potensi daerah sendiri dan bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dinas daerah, dan lain-lain usaha yang sah.

a. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004, sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1) Pajak daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah seperti:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restaurant
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C
- f) Pajak Penerangan Jalan
- g) Pajak Air Bawah Tanah

Besarnya tarif yang berlaku untuk pajak kabupaten/ kota ditetapkan dengan peraturan daerah (PERDA), namun tidak boleh tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut, dengan adanya pemisahan jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/ kota diharapkan tidak adanya pengenaan pajak bergerak.

2) Retribusi

Retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh orang atau badan sebagai imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung atas jasa pelayanan, pekerjaan, pemakaian barang, atau ijin yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi,

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (PP No 66 Th 2001).Golongan Retribusi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Th 2001 meliputi:

- a) Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
 - i Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - ii Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.
 - iii Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
 - iv Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
 - v Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
 - vi Retribusi Pelayanan Pasar.
 - vii Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - viii Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
 - ix Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
 - x Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
- b) Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial

karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- i Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - ii Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan.
 - iii Retribusi Tempat Pelelangan.
 - iv Retribusi Terminal.
 - v Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 - vi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
 - vii Retribusi Penyedotan Kakus.
 - viii Retribusi Rumah Potong Hewan.
 - ix Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
 - x Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
 - xi Retribusi Penyeberangan di Atas Air.
 - xii Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
 - xiii Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c) Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- i Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- ii Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- iii Retribusi Izin Gangguan.
- iv Retribusi Izin Trayek.

3) Bagian Laba Usaha Daerah

Bagian Laba Usaha Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4) Pendapatan Dinas

Pendapatan Dinas adalah penerimaan daerah dari dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan dari retribusi dan pajak daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka otonomi daerah. Dana Perimbangan terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil, yaitu bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam, yaitu penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam antara lain dibidang pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas bumi, kehutanan dan perikanan.

b. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.

3. Pinjaman Daerah

a. Pinjaman dari dalam negeri

b. Pinjaman dari luar negeri

4. Lain-lain penerimaan daerah yang sah

Lain-lain penerimaan daerah yang sah antara lain hibah atau penerimaan dari daerah propinsi atau daerah kabupaten/ kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom

yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakan prakarsa, dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara luas, nyata, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat, dan campur tangan daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal. Menurut Rasyid (1998: 140), otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan pemerintahan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, sesuai dengan keberadaan, kemampuan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

1. Prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, yaitu:

- a. Otonomi luas berarti keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan dibidang politik, luar negri, pertahanan, keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama serta

kewenangan di bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

- b. Nyata berarti keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah.
 - c. Otonomi yang bertanggung jawab adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sedangkan prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah:
- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
 - b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.
- f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atau penyelenggaraan pemerintah daerah.
- g. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

- h. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.
3. Langkah Kebijakan Desentralisasi (Rasyid, 1998: 144)
- a. Di bidang keuangan, diperlukan suatu garis kebijakan yang lebih progresif untuk mengalokasikan lebih banyak bantuan pembangunan yang bersifat block grant daripada yang bersifat specific grant.
 - b. Di bidang perencanaan pembangunan, perlu diberi kewenangan lebih besar kepada Bappeda untuk menyusun rencana-rencana pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
 - c. Di bidang organisasi pemerintahan, diperlukan suatu kajian yang lengkap tentang efektivitas keberadaan lembaga-lembaga pusat dan daerah yang bertanggung jawab langsung terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah.
 - d. Di bidang kepegawaian, berbagai kebijakan baru perlu dilancarkan. Pengecilan organisasi pusat dan pembesaran organisasi daerah sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi yang lebih progresif, sesuai dengan apa yang direkomendasikan pada butir 3 di atas, memerlukan relokasi personil secara proporsional.

C. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah:

1. Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat daerah.

Sedangkan asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber-sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota.
3. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan daerah desa.

D. Derajat Desentralisasi dan Tingkat Kemandirian Daerah

Menurut Halim (2004: 187), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah:

- a. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat otonomi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Reksohadiprodjo (2000: 155) derajat otonomi fiskal daerah dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

$$a. \text{ DOF} = \frac{\text{PAD}}{\text{TPD}} \times 100 \%$$

$$\text{b. DOP} = \frac{\text{BHP}}{\text{TPD}} \times 100 \%$$

$$\text{c. DOB} = \frac{\text{B}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Penerimaan Daerah

BHP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

B = Subsidi atau Bantuan yang diterima Pemda

DOF = Derajat Otonomi Fiskal

DOP = Derajat Otonomi Perpajakan

DOB = Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan

Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan derajat otonomi fiskal menurut Halim (2004: 188 - 189) dapat dibedakan menjadi empat macam klasifikasi daerah yaitu :

1. Apabila tingkat kemandirian antara 0% - 25%. Daerah yang kurang atau tidak mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan instruktif dimana pemerintah pusat lebih banyak memberikan pengarahan kepada pemerintah daerah.
2. Apabila tingkat kemandirian antara 25,1% - 50%. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan konsultatif yaitu sudah mulai

berkurangnya pengarahan atau campur tangan pemerintah pusat karena kemampuan daerah meningkat.

3. Apabila tingkat kemandirian antara 50,1% - 75%. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan partisipatif, dimana pemerintah pusat semakin berkurang dalam memberi pengarahan mengingat pemerintah daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya sudah lebih tinggi.
4. Apabila tingkat kemandirian antara 75,1% - 100%. Daerah yang tergolong mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan delegatif, dimana pemerintah pusat sudah mengurangi atau meniadakan campur tangan dalam mengurus urusan otonominya karena pemerintah daerah yang bersangkutan benar-benar telah matang dan mampu untuk mandiri.

E. Review Penelitian Sebelumnya

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengukur tingkat kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sebagian besar peneliti menjabarkan mengenai kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah serta perkembangan dari Pendapatan Asli Daerah. Karena dengan mengetahui Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat diketahui tingkat keuangan yang dimiliki oleh daerah otonom, serta kinerja dari pemerintah daerah.

Sribejani (2002) melakukan penelitian mengenai perbandingan PAD terhadap APBD untuk tahun anggaran 1996/ 1997 sampai dengan tahun

anggaran 2000. penelitian dilakukan pada Kabupaten Sleman. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan masalah yaitu dengan teknik analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung kontribusi (peran) PAD dalam APBD, yaitu dengan cara membandingkan antara anggaran PAD dalam APBD dengan realisasi penerimaan PAD. Analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui upaya-upaya peningkatan penerimaan PAD dan prediksi penerimaan PAD untuk tahun kedepan, yaitu dengan menggunakan metode persamaan trend dan menghitung setiap komponen dari PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama 5 periode terakhir kontribusi PAD masih rendah yaitu 15% sampai dengan 16%, sehingga dianggap belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan dari perkembangan PAD selama 5 periode terakhir mengalami kenaikan dan penurunan penerimaan PAD sehingga terjadi elastisitas penerimaan PAD.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian Sribejani terletak pada periode penelitian. Penulis melakukan penelitian pada saat pelaksanaan otonomi daerah, sedangkan Sribejani melakukan penelitian sebelum otonomi daerah dilaksanakan. Perbedaan lain terletak pada perhitungan perkembangan PAD, penulis hanya menghitung PAD secara total dengan menggunakan teknik analisis metode angka indeks. Sedangkan Sribejani menghitung perkembangan setiap komponen dari PAD dan memprediksi untuk tahun kedepan dengan menggunakan metode trend. Selain

hal tersebut perbedaan terletak pada teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah otonom. Penulis menggunakan derajat otonomi fiskal dengan menghitung derajat otonomi fiskal, derajat otonomi perpajakan, dan derajat otonomi sumbangan dan bantuan kemudian dibandingkan dengan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Sribejani hanya menghitung dengan indikator prosentase tingkat kemandirian daerah sebesar 50%. Apabila tingkat kontribusi PAD lebih dari 50% maka dianggap cukup untuk melaksanakan otonomi daerah, namun apabila tingkat kontribusi kurang dari 50% maka dianggap tidak cukup untuk melaksanakan otonomi daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan berupa studi kasus. Studi kasus adalah penelitian terhadap suatu objek tertentu, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kasus pada pemerintah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini bersifat *non general* dan hanya mencakup pada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Waktu dan tempat penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada pemerintahan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember 2006.

C. Obyek dan Subyek Penelitian

1. Obyek penelitian adalah data Total Pendapatan Daerah dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tahun 2001 – 2005.
2. Subyek penelitian adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari bagian-bagian yang berwenang atau sumber yang bersangkutan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.
2. Observasi yaitu pengumpulan data dengan melalui pengamatan langsung terhadap obyek dan keadaan yang diteliti serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
3. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan melihat objek yang akan diteliti.
4. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang mendukung penelitian dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan dari literatur.

E. Teknik analisis data

1. Rumusan masalah yang pertama dijawab dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menentukan realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran Pendapatan Asli Daerah.
 - b. Menentukan tahun dasar dari Pendapatan Asli Daerah yang akan dihitung, yang digunakan sebagai dasar perbandingan untuk tahun berikutnya.
 - c. Menghitung perkembangan Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan analisis Angka Indeks Berantai (Chain's Index). Dengan

Indeks Berantai ini dapat diketahui perkembangan variabel dari waktu ke waktu yang berurutan misalnya perkembangan dari tahun ke tahun (Umar, 1998: 138). Pada Indeks berantai kenaikan harga ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga kenaikan nilai setiap tahun dapat diketahui (Budiyuwono, 1999: 193-194). Angka Indeks ini dinyatakan dalam rumus:

$$V_{n,n-1} = \frac{\sum V_n}{\sum V_{n-1}} \times 100\%$$

Dimana :

$V_{n,n-1}$ = Angka Indeks Berantai tahun n dengan tahun dasar n - 1

$\sum$ = Jumlah

V_{n-1} = Nilai realisasi PAD tahun sebelumnya

V_n = Nilai realisasi PAD pada tahun berjalan

2. Rumusan masalah yang kedua dijawab dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menentukan realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran Pendapatan Asli Daerah.
- b. Menghitung Derajat Otonomi Fiskal, yang berguna untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah.

Menurut Reksohadiprodjo (2000: 155) Derajat Otonomi Fiskal Daerah dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

$$1) \text{ DOF} = \frac{\text{PAD}}{\text{TPD}} \times 100 \%$$

$$2) \text{ DOP} = \frac{\text{BHP}}{\text{TPD}} \times 100 \%$$

$$3) \text{ DOB} = \frac{\text{B}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Penerimaan Daerah

BHP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

B = Subsidi atau Bantuan yang diterima Pemda

DOF = Derajat Otonomi Fiskal

DOP = Derajat Otonomi Perpajakan

DOB = Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan

- c. Setelah diketahui derajat otonomi fiskal, kemudian hasil di bandingkan dengan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga dapat diketahui tingkat kemandirian daerah tersebut dengan melihat tabel pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan Derajat Otonomi Fiskal.

TABEL II.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemandirian (%) (DOF)	Kemampuan Daerah	Pola Hubungan
0 – 25	Rendah sekali	Instruktif
25,1 – 50	Rendah	Konsultatif
50,1 – 75	Sedang	Partisipatif
75,1 – 100	Tinggi	Delegatif

Sumber : Halim , 2004 : 189

- 1) Apabila tingkat kemandirian antara 0% - 25%. Daerah yang kurang atau tidak mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan instruktif dimana pemerintah pusat lebih banyak memberikan pengarahan kepada pemerintah daerah.
- 2) Apabila tingkat kemandirian antara 25,1% - 50%. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan konsultatif yaitu sudah mulai berkurangnya pengarahan atau campur tangan pemerintah pusat karena kemampuan daerah meningkat.
- 3) Apabila tingkat kemandirian antara 50,1% - 75%. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan partisipatif, dimana pemerintah pusat semakin berkurang dalam memberi pengarahan mengingat pemerintah daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya sudah lebih tinggi.
- 4) Apabila tingkat kemandirian antara 75,1% - 100%. Daerah yang tergolong mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan delegatif, dimana pemerintah pusat sudah mengurangi atau meniadakan campur tangan dalam mengurus urusan otonominya karena pemerintah daerah yang bersangkutan benar-benar telah matang dan mampu untuk mandiri.

BAB IV
GAMBARAN UMUM
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI D.I YOGYAKARTA

A. Sejarah Singkat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Menurut BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005, DIY adalah sebuah daerah otonomi setingkat propinsi yang beribukota di Yogyakarta, sebuah kota yang kaya predikat, baik berasal dari sejarah maupun potensi yang ada, seperti sebagai kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar, dan kota pariwisata. Menurut Babad Gianti, Yogyakarta atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa) adalah nama yang diberikan Paku Buwono II (raja Mataram tahun 1719-1727) sebagai pengganti nama pesanggrahan Gartitawati. Yogyakarta berarti Yogya yang kerta, Yogya yang makmur, sedangkan Ngayogyakarta Hadiningrat berarti Yogya yang makmur dan yang paling utama.

Sumber lain mengatakan, nama Yogyakarta diambil dari nama (ibu) kota Sanskrit Ayodhya dalam epos Ramayana. Dalam penggunaannya sehari-hari, Yogyakarta lazim diucapkan Jogja(karta) atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa). Sebutan kota perjuangan untuk kota ini berkenaan dengan peran Yogyakarta dalam konstelasi perjuangan bangsa Indonesia pada jaman kolonial Belanda, jaman penjajahan Jepang, maupun pada jaman perjuangan kemerdekaan. Yogyakarta pernah menjadi pusat kerajaan, baik Kerajaan Mataram (Islam), Kesultanan Yogyakarta maupun Kadipaten Pakualaman. Sebutan kota

kebudayaan untuk kota ini berkaitan erat dengan peninggalan-peninggalan budaya bernilai tinggi semasa kerajaan-kerajaan tersebut yang sampai kini masih tetap lestari.

B. Kondisi Geografis

1. Geografi

Menurut sumber BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian tengah selatan Pulau Jawa. Secara astronomis terletak pada 7°33' Lintang Selatan - 8° 12' Lintang Selatan dan 110°00' Bujur Timur – 110°50' Bujur Timur. Batas administratif Daerah Istimewa Yogyakarta dibagian selatan dibatasi oleh Lautan Indonesia sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat dan barat laut dibatasi oleh propinsi Jawa Tengah yang meliputi:

Kabupaten Klaten disebelah timur laut.

Kabupaten Wonogiri di sebelah tenggara.

Kabupaten Purworejo di sebelah barat.

Kabupaten Magelang di sebelah barat laut.

2. Luas Wilayah

Luas keseluruhan wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005 sekitar 3.185,80 Km², yang terbagi dalam lima wilayah administratif daerah tingkat II yaitu:

- a. Kotamadia Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,02 %)

- b. Kabupaten Bantul terdiri, dengan luas 506,85 km² (15,91 %)
- c. Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 585,27 km² (18,40 %)
- d. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.485,36 km² (46,63 %)
- e. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,04 %)

3. Fisiografis

Menurut BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005, secara fisiografis dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) satuan wilayah, yaitu :

- a. Satuan fisiografi Gunung Api Merapi yang terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial gunung api yang meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan sebagian Kabupaten Bantul termasuk bentang lahan vulkanik. Daerah kerucut dan lereng gunung api merupakan daerah hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air daerah bawahan. Satuan wilayah ini terletak pada zone utara di Kabupaten Sleman. Gunung Merapi yang mempunyai karakteristik khusus, menjadi daya tarik untuk dapat dijadikan sebagai obyek studi kegunungapian dan pariwisata. Namun demikian, kawasan ini rawan bencana alam.
- b. Satuan Pegunungan Selatan yang terletak di Kabupaten Gunungkidul, atau dikenal sebagai Pegunungan Seribu merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus dan selalu kekurangan air dengan bagian tengah terdapat dataran (Wonosari *Basin*). Wilayah ini merupakan bentang lahan solusional, dengan

bahan batuan induk batu gamping, mempunyai karakteristik lapisan tanahnya dangkal dan vegetasi penutupnya relatif jarang.

- c. Satuan Pegunungan Kulon Progo, yang terletak di Kabupaten Kulon Progo bagian utara merupakan bentang lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanahnya kecil.
- d. Satuan Dataran Rendah merupakan bentang lahan fluvial yang didominasi oleh dataran aluvial, membentang di bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta mulai dari Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Wilayah ini merupakan daerah yang subur. Bentang lahan lainnya yang belum didayagunakan secara optimal adalah bentang lahan marin dan eolin yang merupakan satuan wilayah pantai, yang terbentang dari Kulon Progo sampai Bantul. Khusus di Parangtritis Bantul yang terkenal dengan gumuk pasir menjadi laboratorium alam studi geografi.

C. Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005 jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat 3.281.800 jiwa, dengan persentase jumlah penduduk perempuan 50,78 persen dan penduduk laki-laki 49,22 persen. Menurut daerah, persentase penduduk

kota mencapai 59,11 persen dan penduduk desa mencapai 40,89 persen. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2005 adalah 1,88 persen, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya.

Kepadatan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 1.030 jiwa per km². Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta yakni 12.939 jiwa per km². Sedangkan Kabupaten Gunungkidul memiliki kepadatan penduduk terendah yang dihuni rata-rata 468 jiwa per km².

Komposisi kelompok umur penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh kelompok usia dewasa yaitu umur 20-24 tahun sebesar 10,53 persen dan kelompok umur lanjut usia yaitu umur 60 tahun ke atas sebesar 13,65 persen. Besarnya proporsi mereka yang berusia lanjut mengisyaratkan tingginya usia harapan hidup penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Angkatan Kerja

Berdasarkan BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, persentase penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta umur 15 tahun ke atas menurut kegiatan adalah 71,95 persen merupakan angkatan kerja. (68,31 persen bekerja dan 3,63 persen pengangguran), sedangkan sisanya sebesar 28,05 persen merupakan bukan angkatan kerja (sekolah 12,45 persen, mengurus rumah tangga 11,06 persen, dan lain-lainnya 4,55 persen). Sedangkan berdasarkan lapangan usaha utama, penduduk yang bekerja bergerak pada sektor pertanian 36,09 persen, perdagangan 24,26 persen, jasa 14,04

persen, industri 13,67 persen dan sisanya 11,49 persen di sektor-sektor lainnya.

D. Sumber Daya Alam

1. Sumberdaya Air

Menurut BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005, potensi sumberdaya air yang cukup besar terletak di zona tengah, baik berupa air tanah maupun air permukaan. Besarnya potensi air permukaan ditunjukkan dengan adanya tiga sungai besar yang mengalir di wilayah DIY, yaitu sungai Progo, Opak dan Oyo. Sedangkan potensi sumberdaya air di zona timur berupa sungai bawah tanah yang banyak dijumpai di Gunungkidul namun belum maksimal pemanfaatannya. Sementara di zona barat terdapat waduk Sermo yang telah dimanfaatkan untuk persediaan air minum dan pertanian.

Keberadaan sumberdaya air tersebut dipengaruhi oleh curah hujan tahunan yang berkisar antara 1.500 mm sampai dengan 2.400 mm. Dengan curah hujan bulanan terkering sebesar 23,20 mm dan terbasah 546 mm.

2. Bahan Mineral dan Bahan Galian

Menurut BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005, potensi sumberdaya alam yang terbesar adalah bahan galian golongan C, seperti pasir, kerikil, batu, batu gamping, kalsit, kaolin, dan zeolit serta breksi batu apung. Namun demikian penggunaan yang berlebihan akan merusak lingkungan. Sedangkan bahan galian golongan A berupa batu bara sangat

terbatas jumlahnya, begitu pula untuk bahan galian golongan B berupa Pasir Besi (Fe), Mangan (Mn), Barit (Ba) dan Emas (Au) terdapat di kabupaten Kulon Progo dengan jumlah terbatas.

3. Pantai dan Kelautan

Menurut BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005, lahan pesisir di Propinsi DIY seluas ± 8.250 Ha yang membujur dari barat sampai ke timur dari kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul, berpotensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata. Dari luas lahan di atas, 650 Ha berpotensi untuk dikembangkan sebagai lahan budidaya tambak udang/ikan. Sedangkan potensi perikanan laut di pantai selatan sepanjang 110 km baru dapat dimanfaatkan $\pm 7\%$ per tahun yang dieksploitasi dengan peralatan yang sederhana.

E. Perekonomian

1. Ekspor dan Impor

Perkembangan transaksi ekspor dan impor menunjukkan dinamika perekonomian suatu wilayah / negara dalam konteks hubungan antar wilayah / negara. Aktivitas ini juga mengisyaratkan kemampuan daya saing produk-produk suatu negara dalam perdagangan global.

Menurut BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005 dengan berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta mencatat nilai ekspor daerah tahun 2005 mencapai US\$ 143,471 juta naik sebesar US\$ 122,271 juta.

2. Komoditas Unggulan Daerah

Berdasarkan BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005, komoditas unggulan daerah yang mendukung keberhasilan pembangunan di daerah adalah meliputi komoditas pertanian dalam arti luas, komoditas industri, komoditas pariwisata budaya dan sejarah serta komoditas pendidikan, seni dan budaya.

3. Pertanian

Menurut BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005, penggunaan lahan untuk pertanian secara umum dapat dikelompokkan menjadi lahan sawah seluas 59.729 ha, lahan pekarangan 86.725 ha, tegalan seluas 109.432 ha, hutan 17.060 ha. Penggunaan lahan sawah yang didasarkan pada jenis pengairan meliputi pengairan teknis seluas 18.547 ha, irigasi setengah teknis 23.729 ha, irigasi sederhana seluas 6.907 ha, irigasi desa seluas 1.786 ha serta sawah tadah hujan seluas 8.760 ha.

Potensi perikanan darat meliputi kolam seluas 4.630,2 ha, sawah seluas 10.365,6 ha, perairan umum seluas 3.133,5 ha, sedangkan perikanan laut di pantai selatan sepanjang 110 km dengan pantai berpasir seluas 650 ha berpotensi untuk dikembangkan tambak permanen maupun pembenihan (*hatchery*). Potensi peternakan, antara lain luasan tegal sebesar 34,35 % dari luas keseluruhan sebagai potensi untuk pengusahaan hijauan makanan ternak. Komoditas tanaman pangan yang dominan dari sisi produksi

adalah padi, ubi kayu, jagung, kacang tanah, dan buah-buahan, sedangkan tanaman perkebunan meliputi kelapa, kopi, kakao dan jambu mete, tanaman kehutanan yang dominan adalah minyak kayu putih dan kayu pertukangan. Dari subsektor peternakan produk dominan adalah daging, telur dan susu, sedangkan produk dominan dari subsektor perikanan meliputi ikan air tawar, benih ikan/ udang dan ikan hias.

4. Industri Kecil dan Menengah

Menurut BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005, industri kecil dan kerajinan di Yogyakarta mempunyai keunggulan komparatif karena mampu menyerap tenaga kerja dan memanfaatkan sumberdaya alam setempat, serta mempunyai keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumberdaya manusia yang potensial, institusi yang ada baik dari Perguruan Tinggi maupun dari Balai Penelitian dan Pengembangan (Litbang), sehingga secara sinergi mendukung pariwisata dan perdagangan daerah. Beberapa sentra industri telah menjadi desa wisata dan desa kerajinan seperti Desa Kasongan Bantul (kerajinan gerabah), Desa Pucung Bantul (kerajinan kayu primitif), Desa Pundong Bantul (kerajinan gerabah), Desa Manding Bantul (kerajinan kulit), Desa Putat Gunungkidul (kerajinan topeng), Desa Sendari Sleman (kerajinan bambu), Tirtodipuran Yogyakarta (kerajinan batik). Komoditas ekspor unggulan DIY antara lain tekstil dan produk tekstil, mebel kayu dan kerajinan kayu, kulit dan produk kulit, gerabah/keramik, jamur dalam kaleng, kerajinan besi dan kerajinan perak.

F. Sosial Budaya

1. Agama

Menurut BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005 dari sekitar 3.464.198 orang pemeluk agama, agama Islam merupakan agama yang dominan dipeluk yakni mencapai 91,21 persen. Kemudian agama Katholik 5,58 persen, Kristen 2,84 persen, Hindu 0,19 persen, dan Budha 0,17 persen. Jumlah tempat peribadatan yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta juga didominasi oleh tempat ibadah umat Islam berupa Masjid, Mushola dan Langgar yang tercatat sebanyak 96,39 persen. Kemudian rumah ibadah Kristen dan Katholik masing-masing 1,92 persen dan 1,27 persen serta tempat ibadat umat Hindu dan Budha masing-masing 0,20 persen dan 0,22 persen.

2. Kebudayaan

Menurut BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005, karakteristik umum masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, adalah tabah, sederhana dan hemat, berani mawas diri, gotong royong dalam kebersamaan, tenggang rasa dan memiliki jiwa patriotisme, serta dapat menyesuaikan terhadap sesama, merupakan sikap mental yang perlu diupayakan kelestariannya. Di samping itu Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki seni budaya yang adiluhung dan berbagai peninggalan budaya masa lalu yang mempunyai nilai tinggi, serta menjadi tempat bertemunya berbagai macam budaya

yang dibawa oleh para pendatang, yang justru diharapkan akan memperkuat budaya bangsa Indonesia.

3. Pendidikan

Menurut BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005, tingkat pendidikan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta pada jenjang Sekolah Dasar (SD), pada tahun 2005 memiliki 2.165 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 308.138 anak dan diasuh oleh 22.543 guru. Untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni SLTP tercatat sebanyak 504 sekolah dengan 145.970 anak didik yang diasuh oleh 13.690 orang guru. Untuk jenjang Sekolah Menengah Umum, tercatat sebanyak 7.284 orang guru yang mengajar 64.930 siswa yang tersebar pada 215 sekolah. Untuk tingkat sekolah Menengah Kejuruan terdapat 167 unit sekolah dengan 56.904 siswa yang diajar oleh 6.371 orang guru.

Pada Jenjang perguruan tinggi negeri, propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 6 perguruan tinggi negeri dengan jumlah mahasiswa keseluruhan sebanyak 83.350 orang yang diajar 4.132 dosen tetap. Untuk perguruan tinggi swasta tercatat sebanyak 116 institusi dengan rincian 47,41 persen akademi, 27,59 persen sekolah tinggi, 15,52 persen universitas serta masing-masing 6,03 persen politeknik dan 3,45 persen institut yang diajar oleh 10.269 orang dosen. Jumlah mahasiswa yang mendaftar pada PTS tahun 2005 sebanyak 98.267 orang dan diterima sebanyak 40.610 orang.

4. Kesehatan

Derajat kesehatan dan gizi masyarakat telah menunjukkan peningkatan, hal ini terlihat adanya perbaikan beberapa indikator kesehatan, antara lain menurunnya angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan, meningkatnya status gizi dan menurunnya angka kesakitan serta meningkatnya usia harapan hidup. Menurut BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005, sarana kesehatan yang tersedia di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 42 rumah sakit, 47 rumah bersalin, 91 poliklinik / balai pengobatan dan 560 puskesmas.

G. Pariwisata

Menurut BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005, obyek wisata di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta digolongkan dalam tiga kategori :

1. Obyek Wisata Alam, yang berupa obyek wisata pantai, pegunungan, dan goa,
2. Obyek Wisata Sejarah, yang berupa peninggalan sejarah kerajaan, petilasan, pemakaman, candi, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Kraton Yogyakarta, Tamansari (Water Castle), Makam Imogiri (makam raja-raja Mataram), Candi Prambanan, Candi Kalasan, Petilasan Ratu Boko, dan lain-lain.
3. Obyek Wisata Budaya, yaitu berupa obyek budaya publik yang sampai kini masih terpelihara, baik yang berujud kesenian maupun adat istiadat,

seperti Sendratari Ramayana, Wayang Kulit, Wayang Golek, Sekaten, Grebeg Maulud, Grebeg Syawal, Grebeg Besar.

H. Pemerintahan

1. Pemerintahan Daerah

Menurut BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah bertanggungjawab sebagai eksekutif dan DPRD bertanggungjawab sebagai legislatif. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Tingkat I dikepalai oleh seorang Gubernur Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, terdapat tiga organisasi perangkat staf pemerintah daerah, yaitu : Sekretaris Daerah (Setda) dan Lembaga Teknis Daerah seperti Dinas-Dinas, Badan-badan, dan Kantor-kantor.

a. Setda membawahi empat asisten yaitu :

- 1) Asisten Ketataprajaan (Asisten Sekwilda I).
- 2) Asisten Administrasi Pembaangunan (Asisten Sekwilda II).
- 3) Asisten Kesejahteraan Sosial (Asisten Sekwilda III).
- 4) Asisten Administrasi (Asisten Sekwilda IV).

Empat Asisten Tersebut membawahi lima Biro :

- a) Biro Tata Pemerintahan.
- b) Biro Hukum.
- c) Biro Kerjasama.

d) Biro Organisasi.

e) Biro Kepegawaian.

Daerah Tingkat I Propinsi D.I. Yogyakarta terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota dengan 75 kecamatan dan 438 kelurahan/ desa yaitu :

- a. Kabupaten Kulonprogo terdiri dari 12 kecamatan dan 88 kelurahan/ desa.
- b. Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan dan 75 kelurahan/ desa.
- c. Kabupaten Gunung Kidul terdiri dari 15 kecamatan dan 144 kelurahan/ desa.
- d. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan dan 86 kelurahan/ desa.
- e. Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan/ desa.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Sebagai bagian pembangunan nasional, pembangunan daerah ditujukan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan dan tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dalam melaksanakan tujuan tersebut pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali sendiri sumber-sumber penerimaan daerah. Salah satu penerimaan daerah yang dinilai cukup memberikan kontribusi bagi keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah.

Periode yang diteliti adalah tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Dari hasil data yang diperoleh maka dapat diketahui perkembangan dari Pendapatan Asli Daerah serta tingkat kemampuan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan otonomi daerah.

A. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2001 sampai dengan tahun 2005

Tabel V.1
Data realisasi PAD
Tahun 2001 sampai dengan tahun 2005
(dalam rupiah)

Tahun	Realisasi PAD
2001	142.323.367.463,21
2002	219.923.366.347,71
2003	272.129.778.875,53
2004	347.404.225.165
2005	401.490.388.085,11

Sumber: BPKD Prop DIY, data diolah penulis

Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun anggaran 2001 – 2005 digunakan rumus :

1. Angka Indeks Berantai (*chain Index*)

$$V_{n,n-1} = \frac{\Sigma V_n}{\Sigma V_{n-1}} \times 100\%$$

Dimana :

$V_{n,n-1}$ = Angka Indeks Berantai tahun n dengan tahun dasar n - 1

Σ = Jumlah

V_{n-1} = Nilai realisasi PAD tahun sebelumnya

V_n = Nilai realisasi PAD pada tahun berjalan

a. Indeks PAD tahun 2002, tahun dasar 2001.

$$\begin{aligned} V_{n,n-1} &= \frac{\Sigma V_n}{\Sigma V_{n-1}} \times 100\% \\ &= \frac{219.923.366.347,71}{142.323.367.463,21} \times 100\% \\ &= 154,52 \% \\ &= 155 \% \text{ (dibulatkan)} \end{aligned}$$

b. Indeks PAD tahun 2003, tahun dasar 2002.

$$\begin{aligned} V_{n,n-1} &= \frac{\Sigma V_n}{\Sigma V_{n-1}} \times 100\% \\ &= \frac{272.129.778.875,53}{219.923.366.347,71} \times 100\% \\ &= 123,73 \% \end{aligned}$$

$$= 124 \% \text{ (dibulatkan)}$$

c. Indeks PAD tahun 2004, tahun dasar 2003.

$$\begin{aligned} V_{n,n-1} &= \frac{\Sigma V_n}{\Sigma V_{n-1}} \times 100\% \\ &= \frac{347.404.225.165}{272.129.778.875,53} \times 100\% \\ &= 127,66 \% \\ &= 128 \% \text{ (dibulatkan)} \end{aligned}$$

d. Indeks PAD tahun 2005, tahun dasar 2004.

$$\begin{aligned} V_{n,n-1} &= \frac{\Sigma V_n}{\Sigma V_{n-1}} \times 100\% \\ &= \frac{401.490.388.085,11}{347.404.225.165} \times 100\% \\ &= 115,56 \% \\ &= 116 \% \text{ (dibulatkan)} \end{aligned}$$

Tabel V.2
Perkembangan PAD
Tahun 2001 - 2005
Dengan Angka Indeks Berantai

Tahun	Angka Indeks PAD
2001	-
2002	155
2003	124
2004	128
2005	116

Dari tabel dapat diketahui bahwa hampir setiap tahunnya PAD di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan. Sehingga perkembangan PAD propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun 2005, berkisar antara 16% sampai dengan 55%.

- 1) Pada tahun 2001, PAD propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengalami kenaikan karena tahun 2001 merupakan periode awal tahun penghitungan.
- 2) Pada tahun 2002, PAD propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan sebesar 55% dari 100% pada tahun 2001 menjadi sebesar 155% pada tahun 2002.
- 3) Pada tahun 2003, PAD propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan sebesar 24% dari 100% pada tahun 2002 menjadi sebesar 124% pada tahun 2003.
- 4) Pada tahun 2004, PAD propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan sebesar 28% dari 100% pada tahun 2003 menjadi sebesar 128% pada tahun 2004.
- 5) Pada tahun 2005, PAD propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan sebesar 16% dari 100% pada tahun 2001 menjadi sebesar 116% pada tahun 2005.

B. Tingkat Kemampuan Daerah

1. Derajat Otonomi Fiskal Daerah

Kemampuan keuangan daerah diukur secara langsung oleh Derajat Otonomi Fiskal. Jika Derajat Otonomi Fiskal tinggi atau tingkat kemandirian berkisar antara 75% - 100%, maka kemampuan keuangan daerah tersebut dapat dikatakan baik.

Untuk menentukan derajat otonomi fiskal digunakan rumus sebagai berikut:

$$DOF = \frac{PAD}{TPD} \times 100 \%$$

Dimana :

DOF = Derajat Otonomi Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Penerimaan Daerah

a. Derajat Otonomi Fiskal tahun 2001

$$\begin{aligned} DOF &= \frac{PAD}{TPD} \times 100 \% \\ &= \frac{142.323.367.463, 21}{416.895.925.865, 88} \times 100 \% \\ &= 34, 13 \% \end{aligned}$$

b. Derajat Otonomi Fiskal tahun 2001

$$DOF = \frac{PAD}{TPD} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{219.923.366.347,71}{526.204.956.149,61} \times 100 \% \\
 &= 41,79 \%
 \end{aligned}$$

c. Derajat Otonomi Fiskal tahun 2003

$$\begin{aligned}
 \text{DOF} &= \frac{\text{PAD}}{\text{TPD}} \times 100 \% \\
 &= \frac{272.129.778.875,53}{696.634.778.575,34} \times 100 \% \\
 &= 39,06 \%
 \end{aligned}$$

d. Derajat Otonomi Fiskal tahun 2004

$$\begin{aligned}
 \text{DOF} &= \frac{\text{PAD}}{\text{TPD}} \times 100 \% \\
 &= \frac{347.404.225.165}{645.617.697.104} \times 100 \% \\
 &= 53,80 \%
 \end{aligned}$$

e. Derajat Otonomi Fiskal tahun 2005

$$\begin{aligned}
 \text{DOF} &= \frac{\text{PAD}}{\text{TPD}} \times 100 \% \\
 &= \frac{401.490.225.165}{699.157.355.406,11} \times 100 \% \\
 &= 57,42 \%
 \end{aligned}$$

Berikut disajikan tabel hasil perhitungan DOF dengan melihat rasio kontribusi PAD terhadap TPD di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel V.3
Rasio PAD terhadap TPD Propinsi DIY
Tahun 2001 – 2005

	PAD (Rp)	TPD (Rp)	DOF
2001	142.323.367.463, 21	416.895.925.865, 88	34, 13 %
2002	219.923.366.347, 71	526.204.956.149, 61	41, 79 %
2003	272.129.778.875, 53	696.634.778.575, 34	39,06 %
2004	347.404.225.165	645.617.697.104	53, 80 %
2005	401.490.388.085,11	699.157.355.406, 11	57,42 %

Sumber data : BPKD Prop DIY, data diolah penulis.

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa Derajat Otonomi Fiskal di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan terjadi pada tahun 2003 sebesar 7,66 % dari tahun 2002 yaitu dari 41,79 % menjadi 39,06 %. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan semakin mampu membiayai kegiatan pembangunan daerah dengan menggunakan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat Derajat Otonomi Fiskal pada tahun 2004 dan tahun 2005 yang terus mengalami kenaikan. Hal tersebut dikarenakan selalu meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. Berdasarkan indikator pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah menurut Halim, propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama pelaksanaan otonomi daerah masih berada dalam

kategori sedang atau pola hubungan partisipatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendekati mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.

2. Derajat Otonomi Perpajakan

Derajat otonomi perpajakan digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan sumber pendapatan daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak apakah dapat membiayai keuangan daerah. Apabila bagi hasil pajak dan bukan pajak memiliki proporsi yang besar terhadap total pendapatan daerah maka dapat dikatakan mampu digunakan untuk membiayai keuangan daerah. Begitu pula sebaliknya, apabila proporsi bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total pendapatan daerah kecil maka dikatakan kurang mampu untuk membiayai keuangan daerah.

Untuk menentukan derajat otonomi perpajakan digunakan rumus sebagai berikut :

$$DOP = \frac{BHP}{TPD} \times 100 \%$$

Dimana :

DOP = Derajat Otonomi Perpajakan

BHP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

TPD = Total Penerimaan Daerah

a. Derajat Otonomi Perpajakan tahun 2001

$$DOP = \frac{BHP}{TPD} \times 100 \%$$

$$= \frac{22.264.260.818,97}{416.895.925.865,88} \times 100\%$$

$$= 5,34\%$$

b. Derajat Otonomi Perpajakan tahun 2002

$$\text{DOP} = \frac{\text{BHP}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{26.194.692.778,47}{526.204.956.149,61} \times 100\%$$

$$= 4,97\%$$

c. Derajat Otonomi Perpajakan tahun 2003

$$\text{DOP} = \frac{\text{BHP}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{30.971.637.576}{696.634.778.575,34} \times 100\%$$

$$= 4,44\%$$

d. Derajat Otonomi Perpajakan tahun 2004

$$\text{DOP} = \frac{\text{BHP}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{35.219.471.939}{645.617.697.104} \times 100\%$$

$$= 5,45\%$$

e. Derajat Otonomi Perpajakan tahun 2005

$$\begin{aligned}
 \text{DOP} &= \frac{\text{BHP}}{\text{TPD}} \times 100 \% \\
 &= \frac{38.545.967.321}{699.157.355.406,11} \times 100 \% \\
 &= 5,51 \%
 \end{aligned}$$

Berikut disajikan tabel hasil perhitungan DOP dengan melihat rasio kontribusi BHP terhadap TPD di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel V.4
Rasio BHP terhadap TPD Propinsi DIY
Tahun 2001 – 2005

Tahun	BHP (Rp)	TPD (Rp)	DOP
2001	22.264.260.818, 97	416.895.925.865, 88	5, 34 %
2002	26.194.692.778, 47	526.204.956.149, 61	4, 97 %
2003	30.971.637.576	696.634.778.575, 34	4, 44 %
2004	35.219.471.939	645.617.697.104	5, 45 %
2005	38.545.967.321	699.157.355.406, 11	5, 51 %

Sumber data : BPKD Prop DIY, diolah penulis.

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa derajat otonomi perpajakan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan terjadi pada tahun 2002 sebesar 0,37 % dari tahun 2001 yaitu dari 5,34 % menjadi 4,97 %. Dan pada tahun 2003 sebesar 0,53 % dari tahun 2002 yaitu dari 4,97 % menjadi 4,44 % pada tahun 2003. Kenaikan terjadi pada tahun 2004 dan

2005, pada tahun 2004 terjadi kenaikan sebesar 1,01% dari tahun 2003 yaitu dari 4,44 % menjadi 5,45 %. Dan pada tahun 2005 sebesar 0,06 % dari tahun 2004 yaitu dari 5,45 % menjadi 5,51 % pada tahun 2005. Derajat otonomi perpajakan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan masih sangat rendah sekali. Hal tersebut dikarenakan proporsi bagi hasil pajak dan bukan pajak masih sangat kecil terhadap total pendapatan daerah. Selain hal tersebut dapat dikarenakan sangat minimnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena sumber daya alam merupakan salah satu pos yang dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah. Sehingga bagi hasil pajak dan bukan pajak tidak dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai keuangan daerah.

3. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan

Derajat otonomi sumbangan dan bantuan digunakan untuk mengetahui tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Apabila derajat otonomi sumbangan dan bantuan terhadap total pendapatan daerah memiliki rasio yang cukup tinggi, maka dapat dikatakan tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sangat besar. Sedangkan apabila derajat otonomi sumbangan dan bantuan terhadap total pendapatan daerah memiliki rasio yang rendah, maka dapat dikatakan tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kecil.

Untuk mengetahui derajat otonomi sumbangan dan bantuan digunakan rumus sebagai berikut :

$$DOB = \frac{B}{TPD} \times 100 \%$$

Dimana :

DOB = Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan

B = Subsidi atau Bantuan yang diterima Pemda

TPD = Total Penerimaan Daerah

a. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan tahun 2001

$$\begin{aligned} DOB &= \frac{B}{TPD} \times 100 \% \\ &= \frac{204.797.747.896}{416.895.925.865,88} \times 100 \% \\ &= 49,12 \% \end{aligned}$$

b. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan tahun 2002

$$\begin{aligned} DOB &= \frac{B}{TPD} \times 100 \% \\ &= \frac{222.051.868.750}{526.204.956.149,61} \times 100 \% \\ &= 42,19 \% \end{aligned}$$

c. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan tahun 2003

$$DOB = \frac{B}{TPD} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{234.397.958.000}{696.634.778.575,34} \times 100 \% \\
 &= 33,64 \%
 \end{aligned}$$

d. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan tahun 2004

$$\begin{aligned}
 \text{DOB} &= \frac{B}{\text{TPD}} \times 100 \% \\
 &= \frac{262.994.000.000}{645.617.697.104} \times 100 \% \\
 &= 40,73 \%
 \end{aligned}$$

e. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan tahun 2005

$$\begin{aligned}
 \text{DOB} &= \frac{B}{\text{TPD}} \times 100 \% \\
 &= \frac{259.121.000.000}{699.157.355.406,11} \times 100 \% \\
 &= 37,06 \%
 \end{aligned}$$

Berikut disajikan tabel hasil perhitungan DOB dengan melihat rasio kontribusi B terhadap TPD di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel V.5
Rasio B terhadap TPD Propinsi DIY
Tahun 2001 – 2005

Tahun	B (Rp)	TPD (Rp)	DOB
2001	204.797.747.896	416.895.925.865, 88	49, 12 %
2002	222.051.868.750	526.204.956.149, 61	42, 19 %
2003	234.397.958.000	696.634.778.575, 34	33, 64 %
2004	262.994.000.000	645.617.697.104	40, 73 %
2005	259.121.000.000	699.157.355.406, 11	37, 06 %

Sumber data : BPKD Prop DIY, diolah penulis.

Dari hasil analisis dan perhitungan dapat diketahui bahwa derajat otonomi sumbangan dan bantuan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 cenderung mengalami penurunan. Kenaikan hanya terjadi pada tahun 2004 sebesar 7,09% dari tahun 2003 yaitu dari 33,64 % menjadi 40,73 %. Derajat otonomi sumbangan dan bantuan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya proporsi perbandingan sumbangan dan bantuan terhadap total pendapatan daerah. Sehingga dapat diketahui bahwa tingkat ketergantungan pemerintah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semakin berkurang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 selalu mengalami peningkatan. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 berkisar antara 16% sampai dengan 55%.
2. Tingkat Kemampuan Daerah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 - a. Derajat otonomi fiskal propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 :
 - 1) Tahun 2001 Derajat Otonomi Fiskal 34,31 % dengan pola hubungan konsultatif dan tingkat kemampuan daerah masih rendah, sehingga dapat dikatakan sedikit mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.
 - 2) Tahun 2002 Derajat Otonomi Fiskal 41,79 % dengan pola hubungan konsultatif dan tingkat kemampuan daerah masih rendah, sehingga dapat dikatakan sedikit mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.
 - 3) Tahun 2003 Derajat Otonomi Fiskal 39,06 % dengan pola hubungan konsultatif dan tingkat kemampuan daerah masih

rendah, sehingga dapat dikatakan sedikit mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.

- 4) Tahun 2004 Derajat Otonomi Fiskal 53,80 % dengan pola hubungan partisipatif dan tingkat kemampuan daerah sedang, sehingga dapat dikatakan mendekati mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.
- 5) Tahun 2005 Derajat Otonomi Fiskal 57,42 % dengan pola hubungan partisipatif dan tingkat kemampuan daerah sedang, sehingga dapat dikatakan mendekati mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.

Derajat Otonomi Fiskal cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dikarenakan semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun, sehingga dapat dikatakan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semakin mampu membiayai kebutuhan daerahnya. Tingkat kemandirian propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada dalam kategori sedang atau pola hubungan partisipatif, sehingga propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan mendekati mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.

- b. Derajat otonomi perpajakan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 cenderung mengalami peningkatan, namun dapat dikatakan bahwa derajat otonomi perpajakan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih sangat rendah sekali. Hal tersebut disebabkan karena minimnya

sumber daya alam yang dimiliki oleh Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga dapat mengakibatkan kecilnya proporsi perpajakan terhadap total pendapatan daerah dan peranan perpajakan dalam keuangan daerah masih sangat rendah

- c. Derajat otonomi sumbangan dan bantuan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 cenderung mengalami penurunan, sehingga dapat diketahui bahwa tingkat ketergantungan pemerintah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semakin berkurang.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian pada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang penulis teliti hanya data tentang realisasi total pendapatan daerah, sehingga tidak dapat mengetahui kebijakan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menetapkan penghitungan serta dasar pemungutan sumber pendapatan daerah dari tingkat kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Saran

Setelah melakukan penelitian pada pemerintah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka penulis mencoba memberikan saran dan masukan. Semoga saran dan masukan dari penulis dapat bermanfaat dalam menentukan kebijakan keuangan dari pemerintah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Pendapatan Asli Daerah pada propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perkembangannya selalu mengalami peningkatan. Namun melihat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih tergolong mendekati mampu untuk melaksanakan otonomi daerah sehingga perlu ditingkatkan kinerja dari pemerintah daerah dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah.
2. Pemerintah daerah harus dapat meminimalkan dana alokasi umum dan dana penyeimbang bagi daerah, serta dapat mengalokasikan dana tersebut secara tepat sehingga dapat berguna dalam peningkatan sumber pendapatan daerah. Pemerintah juga harus dapat mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah guna melaksanakan pembangunan daerah. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun, maka dapat digunakan untuk membantu membiayai keuangan daerah serta dapat menekan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.
3. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya dapat melihat sumber Pendapatan asli Daerah dari masing-masing pos didalamnya, misalnya pajak daerah, retribusi daerah secara khusus serta potensi lain yang dimiliki pemerintah daerah, dan dapat lebih menyoroti kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penghitungan dan dasar pemungutan sumber Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedijoewono, Noegroho. 2001. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Devas, Nick. 1987. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI-Perss
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Hendrik, M.Y. (2000). Kesiapan Mimika Menjadi Daerah Otonom. *Tesis S-2*. Program Pasca Sarjana UGM
- Ismanthono, W.Henricus. 2003. *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Edisi Pertama. Jakarta: Cides.
- Koswara, E. 1998. *Kebijakan Desentralisasi dalam rangka Menunjang Pembangunan Daerah* dalam buku *Pembangunan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Ismanthono, W.Henricus. 2003. *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Edisi Pertama. Jakarta: Cides.
- Sidik, Machfud. 1996. *Pajak dan Retribusi Peranan dan Permasalahan*. Jakarta
- Sribejani, Maria Magdalena. 2002. *Peranan PAD terhadap APBD th 1996 / 1997 – 2000 di Kabupaten Sleman*. Skripsi S-1. Fakultas Ekonomi USD.
- Rasyid, M.Ryaas 1998. *Desentralisasi dalam rangka Menunjang Pembangunan Daerah* dalam buku *Pembangunan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Reksohadiprodjo, Sukanto. 2001. *Ekonomika Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Umar, Husein. 1998. *Riset Akuntansi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Propinsi DI.Yogyakarta. 2005. *D.I Yogyakarta dalam Angka 2005*. BPS Propinsi D.I Yogyakarta.

Republik Indonesia. 2001. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Th 2001. *tentang Retribusi Daerah*.

Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 32 Tahun 2004. *tentang Pemerintahan Daerah*

Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No .33 Tahun 2004. *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah pembentukan daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Geografi:
 - a. Dimana letak Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
 - b. Berapa luas wilayahnya?
3. Penduduk:
 - a. Berapa jumlah penduduk pada tahun 2005?
 - b. Bagaimana komposisi penduduknya?
 - c. Berapa kepadatan penduduknya?
 - d. Berapa angkatan kerja/ pencari kerja pada tahun 2005?
4. Kekayaan alam:
 - a. Bagaimana kondisi air yang ada?
 - b. Bahan tambang apa saja yang ada?
5. Ekonomi:
 - a. Bagaimana kegiatan ekspor dan impornya?
 - b. Komoditas unggulan apa yang dimiliki?
 - c. Bagaimana sektor pertaniannya?
 - d. Industri apa saja yang ada?
6. Sosial Budaya:
 - a. Apa agama yang dipeluk oleh penduduknya?
 - b. Bagaimana kebudayaannya?
 - c. Bagaimana tingkat pendidikan penduduknya?

- d. Bagaimana tingkat kesehatan penduduknya?
- 7. Objek wisata yang dimiliki?
- 8. Pemerintahan:
 - a. Bagaimana pemerintah yang ada?
 - b. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan dilakukan?
- 9. Kondisi Keuangan Daerah:
 - a. Bagaimana Realisasi Penerimaan Rutin Daerah?
 - b. Bagaimana kondisi keuangan daerah dilihat dari sisi penerimaan khususnya PAD?
 - c. Bagaimana perkembangan keuangan dari tahun ke tahun?
 - d. Bagaimana tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah atas bantuan Pemerintah Pusat?

Lampiran 1

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2001**

NO	URAIAN	TARGET TA. 2001 SETELAH EVALUASI	REALISASI TA. 2001 S.D DESEMBER 2001
1.	Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	Rp 47.510.549.687,70	Rp 47.510.549.687,70
2.	Bagian Pendapatan Asli Daerah :	Rp 129.415.455.774,53	Rp 142.323.367.463,21
	a. Pajak Daerah	Rp 116.300.032.349,71	Rp 123.516.267.076,36
	b. Retribusi Daerah	Rp 3.341.768.950,00	Rp 3.954.224.901,00
	c. Laba Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp 4.751.217.404,82	Rp 4.385.830.635,47
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp 5.022.437.070,00	Rp 142.323.367.463,21
3.	Bagian Dana Perimbangan :	Rp 128.429.267.780,34	Rp 115.507.078.714,97
	a. Bagi Hasil Pajak	Rp 14.551.054.876,00	Rp 21.113.189.343,11
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 3.518.212.904,34	Rp 1.151.071.475,86
	c. Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 110.360.000.000,00	Rp 93.242.817.896,00
	d. Dana Alokasi Khusus (DAK)	-	-
4.	Lain-lain Penerimaan Yang Sah :	Rp 111.554.929.500,00	Rp 111.554.929.500,00
	a. Penerimaan dari Pemerintah (Dana Kontijensi)	Rp 111.554.929.500,00	Rp 111.554.930.000,00
	b. Penerimaan dari Pemerintah (Dana Penyeimbang)	-	-
	JUMLAH	Rp 416.910.202.742,57	Rp 416.895.925.865,88

Lanjutan Lampiran 1

POS 1.2 REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BULAN: DESEMBER 2001

AYAT	URAIAN	TARGET 2001 SETELAH PERUBAHAN	S.D BULAN YANG LALU	PENERIMAAN BULAN INI	S.D BULAN INI	LEBIH/ KURANG	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1.	POS PAJAK DAERAH							
1.2.1.001	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	52.470.835.005,00	51.075.592.080,00	4.969.610.830,00	56.045.202.910,00	3.574.367.905,00	106,81	
	Pajak Kendaraan Bermotor	52.245.835.005,00	50.869.555.890,00	4.947.674.980,00	55.817.230.870,00	3.571.395.865,00	106,84	
	Tunggakan Pajak	225.000.000,00	206.036.190,00	21.935.850,00	227.972.040,00	2.972.040,00	101,32	
1.2.1.002	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	62.282.337.199,00	60.179.538.275,00	5.978.117.850,00	66.157.656.125,00	3.875.318.926,00	106,22	
1.2.1.003	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	1.546.860.145,71	1.313.408.041,36	-	1.313.408.041,36	(233.452.104,35)	84,91	
	JUMLAH PAJAK DAERAH	116.300.032.349,71	112.568.538.396,36	10.947.728.680,00	123.516.287.076,36	7.216.234.728,65	106,20	

Lanjutan Lampiran 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.2	POS RETRIBUSI DAERAH							
1.2.2 001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	335.085.000,00	388.160.640,00	55.579.350,00	443.739.990,00	108.654.990,00	132,43	
001-1	Dinkesessos (PLKM Godean)	10.010.000,00	9.125.250,00	1.029.500,00	10.154.750,00	144.750,00	101,45	
001-2	RSJ Daerah Propinsi DIY	325.075.000,00	379.035.390,00	54.549.850,00	433.585.240,00	108.510.240,00	133,38	
1.2.2 012	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	167.707.500,00	185.206.230,00	8.007.965,00	193.214.195,00	25.506.695,00	115,21	
012-1	Bapekoina (Sewa Gudang/Pabrik)	16.700.000,00	16.700.000,00	-	16.700.000,00	-	100,00	
012-2	Disnakertrans (Sewa Asrama Buruh Ledok Code)	3.408.000,00	3.152.000,00	285.000,00	3.437.000,00	29.000,00	100,85	
012-3	Diskimpraswil (Sewa mesin gilas & sprayer)	2.250.000,00	2.125.000,00	-	2.125.000,00	(125.000,00)	94,44	
012-4	Biro Umum (Sewa Gedung Wana Bhakti Yasa)	35.000.000,00	52.603.300,00	6.542.000,00	59.145.300,00	24.145.300,00	168,99	
012-5	REJ Daerah Prop.DIY	300.000,00	525.000,00	-	525.000,00	225.000,00	175,00	
012-6	Dinas Pendidikan (Sewa GOR Among Rogo)	26.900.000,00	26.200.000,00	800.000,00	29.000.000,00	2.100.000,00	107,81	
012-7a	Dinas Pendapatan Daerah (TPKB)	60.000.000,00	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	100,00	
012-7b	Tempat Parkir Halaman Samsat	6.850.000,00	4.050.000,00	120.000,00	4.170.000,00	(2.680.000,00)	60,88	
012-7c	Sewa Tempat Fotocopy	3.500.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	(1.500.000,00)	57,14	
012-8	Kaperda DIY di Jakarta (TMII)	6.000.000,00	8.315.000,00	100.000,00	8.415.000,00	2.415.000,00	140,25	
012-9	Dinas Pariwisata (Parkir Candi Boko)	6.799.500,00	7.535.930,00	160.965,00	7.696.895,00	897.395,00	113,20	
1.2.2 017	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	43.700.000,00	51.860.000,00	5.531.000,00	57.391.000,00	13.591.000,00	131,33	
017-1	Disnakertrans (Balai Istirahat Karyawan)	4.200.000,00	4.260.000,00	561.000,00	4.821.000,00	621.000,00	114,79	
017-2	Diskimpraswil (Sewa Mess Kaliurang)	17.500.000,00	18.455.000,00	1.500.000,00	19.955.000,00	2.455.000,00	114,03	
017-3	Kaperda DIY di Jakarta (Sewa Mess)	17.000.000,00	24.720.000,00	2.185.000,00	26.905.000,00	9.905.000,00	158,26	
017-4	Dishutbun (Sewa Mess Kaliurang)	5.000.000,00	4.425.000,00	1.285.000,00	5.710.000,00	710.000,00	114,20	
1.2.2 021	Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga (Dishutbun)	24.000.000,00	28.760.800,00	3.289.200,00	32.050.000,00	8.050.000,00	133,54	
1.2.2 024	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.233.358.450,00	2.404.947.928,00	68.182.498,00	2.473.130.426,00	179.771.976,00	107,84	
024-1	Dinas Pertanian (Penjual: Ternak/Daging)	38.267.000,00	46.817.875,00	8.198.400,00	55.016.275,00	16.754.275,00	143,79	
024-2	Diskanla (Hasil Perjualan Bibit Ikan/Konsumsi)	130.000.000,00	112.552.075,00	6.341.000,00	118.893.075,00	(11.106.925,00)	91,46	
024-3	Dishutbun (Hasil Kebun & Penjualan Bibit)	12.950.000,00	9.602.700,00	2.312.500,00	11.915.200,00	(1.034.800,00)	92,01	
024-4	Dinas Pertanian	130.003.950,00	194.451.000,00	13.224.225,00	207.675.225,00	77.671.275,00	159,75	
024-5	Dishutbun	1.964.492.500,00	2.032.073.278,00	34.978.473,00	2.067.051.751,00	102.559.251,00	105,22	
024-6	RSJ Daerah Propinsi DIY	2.650.000,00	2.377.500,00	877.900,00	3.255.400,00	605.400,00	122,85	
024-7	Disperindag	15.000.000,00	7.073.500,00	2.250.000,00	9.323.500,00	(5.676.500,00)	62,16	
2.2 029	Retribusi Izin Trayek	57.918.000,00	48.040.800,00	9.835.000,00	57.875.800,00	(42.200,00)	99,93	
2.2 031	Retribusi Tempat Petelangan Hasil Hutan	420.000.000,00	643.765.590,00	53.057.900,00	696.823.490,00	276.823.490,00	165,91	
	JUMLAH RETRIBUSI DAERAH	3.341.768.950,00	3.750.741.988,00	203.482.913,00	3.954.224.901,00	612.455.951,00	118,33	

Lanjutan Lampiran 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.3	PCS LABA PERUSH. MILIK DAERAH							
1.2.3.001	Bank Pembangunan Daerah	3.646.836.000,00	3.646.835.740,77	-	3.646.835.740,77	(259,23)	100,00	
1.2.3.002	PD Aneka Industri dan Jasa ANINDYA	283.983.151,82	-	-	-	(283.983.151,82)	-	
1.2.3.003	PD Tarumartani	348.858.728,00	-	-	-	(348.858.728,00)	-	
1.2.3.004	Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)	285.539.525,00	5.252.966,00	547.741.928,70	552.994.894,70	267.455.369,70	193,67	
1.2.3.050	Penyertaan Modal pada Pihak III (PT. JIS)	186.000.000,00	186.000.000,00	-	186.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH LABA PERUSH. MILIK DAERAH	4.751.217.404,82	3.838.088.706,77	547.741.928,70	4.385.830.635,47	(365.386.769,35)	92,31	
1.2.4	PCS LAIN-LAIN PAD YANG SAH							
1.2.4.001	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	18.386.200,00	16.068.100,00	3.641.600,00	19.709.700,00	1.323.500,00	107,20	
001.1	Disumpaswil	700.000,00	-	1.633.000,00	1.633.000,00	928.000,00	234,00	
001.2	Biro Pertengahan/Biro Umum	17.686.200,00	16.068.100,00	2.003.600,00	18.071.700,00	385.500,00	102,18	
1.2.4.002	Jasa Giro	3.500.000.000,00	5.047.699.549,00	487.134.384,00	5.534.833.933,00	2.034.833.933,00	158,14	
1.2.4.003	Sumbangan Pihak Ketiga	1.000.000.000,00	1.067.420.600,00	84.457.000,00	1.151.877.600,00	151.877.600,00	115,19	
1.2.4.004	Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.005	Setoran Kelebihan Pembayaran Kpd Pihak III	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.006	Deada Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.007	Angsuran dan atau cicilan kendaraan	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.008	Angsuran/cicilan Rumah Dinas	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.009	Pendapatan lain-lain	504.050.870,00	3.615.741.412,38	144.882.205,00	3.760.623.617,38	3.256.572.747,38	746,08	
009.1	Disenda (Adm. Jasa Raharja)	226.798.000,00	198.691.200,00	19.595.200,00	218.286.400,00	(8.511.600,00)	96,25	
009.2	Disenda (Penj. Kelapa, BBI)	31.000.000,00	1.640.000,00	350.000,00	1.990.000,00	(29.010.000,00)	6,42	
009.3	Dinas Pertanian (Hasil Pengujian Mutu Pakan)	3.812.000,00	3.812.000,00	-	3.812.000,00	-	100,00	
009.4	Dinas Pertanian (Sewa Mobil Box Daging)	8.500.000,00	-	-	-	(8.500.000,00)	-	
009.5	Disumpaswil (Penjualan Kayu)	16.500.000,00	7.274.060,00	813.300,00	8.087.360,00	(8.412.640,00)	49,01	
009.6	Batasalada (Izin Limbah)	4.000.000,00	1.900.000,00	-	1.900.000,00	(2.100.000,00)	47,50	
009.7	Dinas Pertanian (RP 5 dan Bapelkes)	157.367.720,00	-	-	-	(157.367.720,00)	-	
009.8	Dinas Perhubungan (Pengujian KBM)	56.073.150,00	56.111.750,00	-	56.111.750,00	38.600,00	100,07	
009.9	Lain-lain Pendapatan	-	3.346.312.402,38	124.123.705,00	3.470.436.107,38	3.470.436.107,38	-	
	JUMLAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH	5.022.437.070,00	9.746.929.661,38	720.115.189,00	10.467.044.850,38	5.444.607.780,38	208,41	
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	129.415.455.774,53	129.904.298.752,51	12.419.008.710,70	142.323.367.463,21	12.907.911.688,68	109,97	

Lanjutan Lampiran 1

1.3 POS BAGIAN DANA PERIMBANGAN BULAN: DESEMBER 2001

AYAT	URAIAN	TARGET 2001 SETELAH PERUBAHAN	S.D BULAN YANG LALU	PENERIMAAN BULAN INI	S.D BULAN INI	LEBIH/ KURANG	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1	<i>Pos Bagi Hasil Pajak</i>							
1.3.1 001	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.500.000.000,00	6.322.749.589,00	1.539.763.292,11	7.862.512.881,11	2.362.512.881,11	142,95	
1.3.1 002	Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	1.198.366.876,00	2.656.188.787,00	234.752.831,00	2.890.941.618,00	1.692.574.742,00	241,24	
1.3.1 004	PPh Orang Pribadi Dalam Negeri	7.852.688.000,00	5.899.516.000,00	4.470.218.844,00	10.359.734.844,00	2.507.046.844,00	131,93	
	JUMLAH BAGI HASIL PAJAK	14.551.054.876,00	14.068.451.376,00	6.244.734.967,11	21.113.189.343,11	6.562.134.467,11	145,10	
1.3.2	<i>Pos Bagi hasil Bukan Pajak SDA</i>							
1.3.2 001	Iuran Hasil Hutan (IHH)	2.518.212.904,34	23.706.365,26	3.075.521,00	26.781.885,26	(2.491.431.018,08)	1,06	
1.3.2 003	Pemberian Hak Atas Tanah Negara	1.000.000.000,00	1.044.714.589,60	79.575.000,00	1.124.289.589,60	124.289.589,60	112,43	
	JUMLAH BAGI HASIL BUKAN PAJAK SDA	3.518.212.904,34	1.068.420.954,86	82.650.521,00	1.151.071.475,86	(2.367.141.428,48)	32,72	
1.3.3	<i>Pos Dana Alokasi Umum</i>							
1.3.3 001	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	
1.3.3 002	Belanja Non Pegawai	-	-	-	-	-	-	
1.3.3 003	Dana Alokasi Umum	110.360.000.000,00	88.772.599.052,00	4.470.218.844,00	93.242.817.896,00	(17.117.182.104,00)	84,49	
	JUMLAH DANA ALOKASI UMUM	110.360.000.000,00	88.772.599.052,00	4.470.218.844,00	93.242.817.896,00	(17.117.182.104,00)	84,49	
1.3.4	<i>Pos Dana Alokasi Khusus</i>							
1.3.4 001	Dana Pembangunan Propinsi	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH DANA ALOKASI KHUSUS	-	-	-	-	-	-	
1.3.5	<i>Pos Dana Darurat</i>							
1.3.5 002	Dana Kontinjensi	111.554.929.500,00	99.638.142.000,00	11.916.788.000,00	111.554.930.000,00	500,00	100,00	
	JUMLAH DANA DARURAT	111.554.929.500,00	99.638.142.000,00	11.916.788.000,00	111.554.930.000,00	500,00	100,00	
	JUMLAH BAGIAN DANA PERIMBANGAN	239.984.197.280,34	204.347.616.382,86	22.714.392.332,11	227.062.008.714,97	(12.922.188.565,37)	94,62	

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2002**

NO	URAIAN	TARGET TA. 2002 SETELAH EVALUASI	REALISASI TA. 2002 S.D DESEMBER 2002
1.	Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	Rp 58.035.028.273,43	Rp 58.035.028.273,43
2.	Bagian Pendapatan Asli Daerah :	Rp 169.489.772.567,57	Rp 219.923.366.347,71
	a. Pajak Daerah	Rp 151.400.413.147,25	Rp 175.519.260.386,53
	b. Retribusi Daerah	Rp 4.049.952.600,00	Rp 5.094.831.625,00
	c. Laba Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp 7.577.808.381,82	Rp 6.804.866.703,47
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp 6.461.598.438,50	Rp 32.504.407.632,71
3.	Bagian Dana Perimbangan :	Rp 234.634.098.599,00	Rp 240.674.692.778,47
	a. Bagi Hasil Pajak	Rp 20.154.098.599,00	Rp 26.193.447.640,00
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	-	Rp 1.245.138,47
	c. Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 214.480.000.000,00	Rp 214.480.000.000,00
	d. Dana Alokasi Khusus (DAK)	-	-
4.	Lain-lain Penerimaan Yang Sah :	Rp 7.440.000.000,00	Rp 7.440.000.000,00
	a. Penerimaan dari Pemerintah (Dana Penyeimbang)	Rp 7.440.000.000,00	Rp 7.571.868.750,00
	JUMLAH	Rp 469.598.899.440,00	Rp 526.204.956.149,61

Lanjutan Lampiran 2

PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2002

AYAT	URAIAN	TARGET TA.2002 SETELAH EVALUASI	JUMLAH S.D BULAN YG LALU	DESEMBER 2002	JUMLAH S.D BULAN DESEMBER 2002	%
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU					
1.1.1.	Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	58.035.028.273,43	40.620.551.058,43	17.414.477.215,00	58.035.028.273,43	100,00
	JUMLAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	58.035.028.273,43	40.620.551.058,43	17.414.477.215,00	58.035.028.273,43	100,00
1.2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
1.2.1.	POS PAJAK DAERAH					
1.2.1.001	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	60.243.679.000,00	61.355.980.385,00	5.597.522.750,00	66.953.503.135,00	111,14
	Pajak Kendaraan Bermotor	60.045.234.000,00	60.786.147.155,00	5.572.088.500,00	66.358.235.655,00	110,51
	Tunggakan Pajak	198.445.000,00	569.833.230,00	25.434.250,00	595.267.480,00	299,97
1.2.1.003	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	59.472.783.050,00	77.804.184.950,00	6.484.065.250,00	84.288.250.200,00	121,33
1.2.1.005	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	20.883.951.097,25	20.282.666.778,82	3.120.604.012,71	23.403.270.791,53	112,06
1.2.1.012	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah (Pajak ABT)	800.000.000,00	620.425.457,00	253.810.803,00	874.236.260,00	109,28
	JUMLAH PAJAK DAERAH	151.400.413.147,25	160.063.257.570,82	15.456.002.815,71	175.519.260.386,53	115,93

Lanjutan Lampiran 2

1	2	3	4	5	6	7
1.2.2	POS RETRIBUSI DAERAH					
1.2.2.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	354.470.000,00	417.597.445,00	47.054.080,00	464.651.525,00	131,08
001-1	Dinkes/kesos (PLKM Godean)	10.500.000,00	8.312.250,00	612.500,00	8.924.750,00	85,00
001-2	RSJD Propinsi DIY (Pelayanan Kesehatan)	343.970.000,00	409.285.195,00	46.441.580,00	455.726.775,00	132,49
1.2.2.011	Retribusi Pemeliharaan Kekayaan Daerah	117.635.000,00	134.907.500,00	4.298.100,00	139.205.600,00	118,34
011-1	Bapekoinda (Sewa Tanah/Ex. Gudang Pangan)	29.950.000,00	26.100.000,00	-	26.100.000,00	87,15
011-2	Disnakertrans (Sewa Asrama Buruh Ledok Code)	3.410.000,00	3.155.500,00	290.000,00	3.445.500,00	101,04
011-3	Diskompraswil (Sewa Mesin Gilas & Sprayer)	2.250.000,00	2.365.000,00	-	2.365.000,00	105,11
011-4	Piro Unkim (Sewa Gedung Wana Bhakti Yasa)	32.550.000,00	63.472.000,00	3.078.100,00	66.550.100,00	120,64
011-5	RSJD Prop DIY (Sewa Mobil Jenazah & Ambulance)	475.000,00	405.000,00	-	405.000,00	85,26
011-6	Dinas Pendidikan (Sewa GOR Among Rogo)	29.000.000,00	39.410.000,00	930.000,00	40.340.000,00	139,10
1.2.2.012	Retribusi Pasar Grosir dan /atau Pertokoan (Tempat Pelelangan Hasil Hutan)	600.000.000,00	977.636.825,00	-	977.636.825,00	162,94
1.2.2.016	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	34.940.000,00	28.870.500,00	2.415.000,00	31.285.500,00	89,54
016-1	Disnakertrans (Sewa Kamar BIP/BIK)	4.940.000,00	5.590.500,00	525.000,00	6.115.500,00	123,80
016-2	Diskimpraswil (Sewa Mess Kaliurang)	20.000.000,00	18.885.000,00	1.265.000,00	20.150.000,00	100,75
016-3	Dishutbun (Sewa Mess Kaliurang)	10.000.000,00	4.395.000,00	625.000,00	5.020.000,00	50,20
1.2.2.020	Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga (Dishutbun)	35.000.000,00	35.818.800,00	4.162.400,00	39.981.200,00	114,23
1.2.2.023	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.511.194.600,00	2.869.486.766,50	270.853.387,50	3.140.340.154,00	125,05
023-1	Dinas Pertanian (Penjualan Ternak/Daging/Bibit)	239.602.100,00	304.889.950,00	40.199.250,00	345.089.200,00	144,03
023-2	Diskant (Hasil Penjualan Bibit Ikan/Konsumsi)	188.750.000,00	151.828.700,00	38.548.800,00	190.377.500,00	100,86
023-3	Dishutbun (Hasil Kebun, Bibit, Kayu dan Minyak Kayu Putih)	2.065.192.500,00	2.399.731.516,50	187.167.087,50	2.586.898.604,00	125,26
023-4	RSJD Propinsi DIY (Work Therapy & Pengolahan Tanah)	2.650.000,00	2.631.600,00	268.250,00	2.899.850,00	109,43
023-5	Disperindag (Penjualan Alat Tepat Guna)	15.000.000,00	10.405.000,00	4.670.000,00	15.075.000,00	100,50
1.2.2.027	Retribusi Izin Trayek (Dinas Perhubungan)	58.963.000,00	57.842.440,00	8.163.500,00	66.005.940,00	115,88
1.2.2.028	Retribusi Dispensasi Kelebihan Muatan (Din. Perhub)	339.750.000,00	207.156.781,00	28.568.100,00	235.724.881,00	69,38
	JUMLAH RETRIBUSI DAERAH	4.049.952.600,00	4.729.317.057,50	365.514.567,50	5.094.831.625,00	125,80

Lanjutan Lampiran 2

POS BAG. LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN						
1.2.3 001	Bank Pembangunan Daerah	6.400.000.000,00	6.149.773.712,33	-	6.149.773.712,33	96,09
1.2.3 002	PD Aneka Industri dan Jasa ANINDYA	283.983.906,82	-	136.841.293,00	136.841.293,00	48,19
1.2.3 003	PD Tarumadani	399.248.950,00	-	-	-	-
1.2.3 004	Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)	285.539.525,00	22.320.099,00	286.895.599,14	309.215.698,14	108,29
1.2.3 050	Penyertaan Modal pada Pihak III (PT. JIS)	209.036.000,00	209.036.000,00	-	209.036.000,00	100,00
JUMLAH BAG. LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		7.577.808.381,82	6.381.129.811,33	423.736.892,14	6.804.866.703,47	89,80
POS LAIN - LAIN PAD YANG SAH						
1.2.4 001	Penjualan Drum Kosong (Diskimpraswil)	700.000,00	793.800,00	655.200,00	1.449.000,00	207,00
1.2.4 002	Jasa Giro (BPD)	4.000.000.000,00	9.340.413.379,00	724.792.497,00	10.065.205.876,00	251,63
1.2.4 003	Sumbangan Pihak Ketiga (Dispenda)	1.100.925.000,00	1.295.806.527,00	92.137.000,00	1.387.943.527,00	126,07
1.2.4 004	Angsuran/Cicilan Rumah Dina. (Biro Umum)	18.334.200,00	12.178.600,00	1.375.600,00	13.554.200,00	73,93
1.2.4 006	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-	-
1.2.4 009	Pendapatan lain-lain	1.341.639.238,50	9.098.402.296,77	11.937.852.732,94	21.036.255.029,71	1.567,95
009-1	Dispenda (Adm. Jasa Raharja, TPKB Mall, TPKB Hal Samsat, Fotocopy Samsat Kota & Sleman)	449.851.800,00	411.010.400,00	33.367.200,00	444.377.600,00	98,78
009-2	Diskanle (Penj. Kelapa, Tambak Kan Congot, Pemancingan di BBI Wonocatur, Pasar Ikan Cangkringan, PMT Bawal, KM DIY 01, UPTD BAT)	37.750.000,00	12.761.000,00	7.968.600,00	20.729.600,00	54,91
009-3	Dinas Pertanian (Sewa Mobil Box Daging, BBI, Jasa Sertifikasi, Penjualan Temak Afir dan Sewa kamar di BLPP)	56.448.000,00	111.308.425,00	14.711.520,00	126.019.945,00	223,25
009-4	Diskimpraswil (Jasa Pengujian Beton)	15.000.000,00	8.487.250,00	1.340.100,00	9.827.350,00	65,52
009-5	Eapedalda (Ijin Pembuangan Limbah Cair)	4.000.000,00	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00	27,50
009-6	Dinkertessos (Bapelkes, BP4, RP5 Kotagede & Muja Muju, Sewa Rumah ex Depkes, Undan Berhadiah, Lab. Kesehatan)	472.140.761,00	650.400.445,00	44.058.870,00	694.459.315,00	147,09
009-7	Disbudpar (Sewa TIC, Wartel, Parkir C. Boko, Sewa Rumah Dinas, Museum Sonobudoyo, Sewa R. Ex. Kan. Depparpostel, dan Sewa Gedung Taman Budaya Dulaksumur & Sriwedani)	111.964.500,00	109.107.455,00	3.449.620,00	112.557.075,00	100,53
009-8	Disperindag (Jasa Pengujian Tera, sewa LK & YCC)	99.200.000,00	112.471.400,00	1.264.300,00	113.735.700,00	114,65
009-9	Kaperda DIY (Sewa Gamelan, Kesenian di TMII)	7.500.000,00	7.605.000,00	-	7.605.000,00	101,40
009-10	Kaperda DIY (Sewa Mess di Jakarta)	25.000.000,00	23.065.000,00	-	23.065.000,00	92,26
009-11	Dinas Pendidikan (BLPT, Youth Centre, BPKB, SLB C Pemb. Gelang. Pemuda Sorowajan & Pond. Pemuda Ambarbinangun)	22.769.175,00	28.841.300,00	5.446.750,00	34.288.050,00	150,59
009-12	Disnakertrans (Pend. Fasilitas Lal. Kerja & Balai Hiperkes)	22.375.000,00	27.342.305,00	886.800,00	28.229.105,00	126,16
009-13	Dinas Perhubungan (Ijin KRAP & Amatir Radio)	17.340.002,50	-	-	-	0,00
009-14	Biro Umum (Sewa Gd. SD. Karangsari)	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	100,00
009-15	Lain - Lain Pendapatan	-	7.594.902.316,77	11.825.058.972,94	19.419.961.289,71	-
JUMLAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH		6.461.598.438,50	19.747.594.602,77	12.756.813.029,94	32.504.407.632,71	503,04
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		169.489.772.567,57	190.921.299.042,42	29.002.067.305,29	219.923.366.347,71	129,76

Lanjutan Lampiran 2

1	2	3	4	5	6	7
1.3.	BAGIAN DANA PERIMBANGAN					
1.3.1	<i>Pos Bagi Hasil Pajak</i>	20.154.098.599,00	11.026.000.756,00	15.167.446.884,00	26.193.447.640,00	129,97
1.3.1.001	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.240.293.287,00	7.847.016.690,00	853.337.360,00	8.700.354.050,00	120,17
1.3.1.002	Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	2.813.805.312,00	2.670.926.266,00	372.133.093,00	3.043.059.359,00	108,15
1.3.1.003	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21	9.600.000.000,00	-	13.912.032.431,00	13.912.032.431,00	144,92
1.3.1.004	Pemberian Hak Atas Tanah Negara	500.000.000,00	508.057.800,00	29.944.000,00	538.001.800,00	107,60
1.3.2.	<i>Pos Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam</i>	-	1.245.138,47	-	1.245.138,47	-
1.3.2.001	Iuran Hasil Hutan / Provisi Sumber Daya Alam	-	1.245.138,47	-	1.245.138,47	-
1.3.3.	<i>Pos Dana Alokasi Umum</i>	214.480.000.000,00	196.606.666.700,00	17.873.333.300,00	214.480.000.000,00	100,00
1.3.3.001	Dana Alokasi Umum	214.480.000.000,00	196.606.666.700,00	17.873.333.300,00	214.480.000.000,00	100,00
1.3.4.	<i>Pos Dana Alokasi Khusus</i>	-	-	-	-	-
1.3.4.001	Dana Alokasi Khusus Reboisasi	-	-	-	-	-
1.3.4.002	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi	-	-	-	-	-
1.3.5.	<i>Pos Dana Darurat</i>	-	-	-	-	-
1.3.5.001	Bantuan Bencana Alam	-	-	-	-	-
	JUMLAH BAGIAN DANA PERIMBANGAN	234.634.098.599,00	207.633.912.594,47	33.040.780.184,00	240.674.692.778,47	102,57
1.4.	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH					
1.4.1.	<i>Pos Pinjaman Dalam Negeri</i>	-	-	-	-	-
1.4.1.001	Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
1.4.1.002	Pinjaman Dari Bank	-	-	-	-	-
1.4.1.003	Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-
1.4.1.004	Pinjaman Dari Sumber Lainnya	-	-	-	-	-
1.4.2.	<i>Pos Pinjaman Luar Negeri</i>	-	-	-	-	-
	JUMLAH BAG. PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	-	-	-	-	-
1.5.	BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH					
1.5.1.	<i>Penerimaan Dari Pemerintah</i>	7.440.000.000,00	6.951.868.750,00	620.000.000,00	7.571.868.750,00	101,77
1.5.1.001	Penerimaan Dari Pemerintah Dana Kontinjensi	-	-	-	-	-
1.5.1.002	Penerimaan Dari Pemerintah Dana Penyeimbang	7.440.000.000,00	6.951.868.750,00	620.000.000,00	7.571.868.750,00	101,77
1.5.2.	<i>Penerimaan Dari Propinsi</i>	-	-	-	-	-
1.5.3.	<i>Penerimaan Dari Kabupaten / Kota Lainnya</i>	-	-	-	-	-
1.5.4.	<i>Penerimaan Lain-Lainnya</i>	-	-	-	-	-
	JUMLAH LAIN-LAIN PENERIMAAN YG SAH	7.440.000.000,00	6.951.868.750,00	620.000.000,00	7.571.868.750,00	101,77
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	469.598.899.440,00	446.127.631.445,32	80.077.324.704,29	526.204.956.149,61	112,05

Lampiran 3

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2003**

NO	URAIAN	TARGET TA. 2003 SETELAH EVALUASI	REALISASI TA. 2003 S.D DESEMBER 2003
1.	Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	Rp 153.635.404.123,81	Rp 153.635.404.123,81
2.	Bagian Pendapatan Asli Daerah :	Rp 248.501.101.073,88	Rp 272.129.778.875,53
	a. Pajak Daerah	Rp 217.122.569.335,92	Rp 228.143.758.510,00
	b. Retribusi Daerah	Rp 7.776.677.650,00	Rp 8.089.794.859,00
	c. Laba Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp 10.746.394.220,04	Rp 10.742.871.682,81
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp 12.855.459.967,92	Rp 25.153.353.823,72
3.	Bagian Dana Perimbangan :	Rp 227.130.852.599,00	Rp 238.431.637.576,00
	a. Bagi Hasil Pajak	Rp 19.670.852.599,00	Rp 30.964.635.511,00
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	-	Rp 7.002.065,00
	c. Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 201.960.000.000,00	Rp 201.960.000.000,00
	d. Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 5.500.000.000,00	Rp 5.500.000.000,00
4.	Lain-lain Penerimaan Yang Sah :	Rp 27.083.964.000,00	Rp 32.437.958.000,00
	a. Penerimaan dari Pemerintah (Dana Penyeimbang)	Rp 27.083.964.000,00	Rp 32.437.958.000,00
	JUMLAH	Rp 656.351.321.796,69	Rp 696.634.778.575,34

Lanjutan Lampiran 3

PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2003

AYAT	URAIAN	TARGET TA. 2003 (SETELAH PERUBAHAN)	JUMLAH S.D BULAN YANG LALU	DESEMBER 2003	JUMLAH S.D BULAN DESEMBER 2003	%
1	2	3	4	5	6	7
1 1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU					
1.1. 1.	Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	153.635.404.123,81	153.635.404.123,81	-	153.635.404.123,81	100,00
	JUMLAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	153.635.404.123,81	153.635.404.123,81	-	153.635.404.123,81	100,00
1.2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
1.2. 1.	POS PAJAK DAERAH					
1.2.1 001	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	83.647.583.000,00	78.785.291.350,00	9.039.529.450,00	87.824.820.800,00	104,99
1.2.1 003	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	99.863.974.000,00	95.988.015.250,00	12.547.009.000,00	108.535.024.250,00	108,68
1.2.1 005	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	32.011.012.335,92	27.152.984.511,00	2.688.954.784,00	29.841.939.295,00	93,22
1.2.1 012	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah (Pajak ABT)	1.600.000.000,00	1.738.742.864,00	203.231.301,00	1.941.974.165,00	121,37
	JUMLAH PAJAK DAERAH	217.122.569.335,92	203.665.033.975,00	24.478.724.535,00	228.143.758.510,00	105,08

Lanjutan Lampiran 3

1	2	3	4	5	6	7
1.2.2	POS RETRIBUSI DAERAH					
1.2.2 001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	403.552.000,00	423.610.704,00	58.075.442,00	481.686.146,00	119,36
001-1	Dinkesessos (PLKM Godean)	11.175.000,00	9.987.250,00	1.522.250,00	11.509.500,00	102,99
001-2	RSJD Propinsi DIY (Pelayanan Kesehatan)	392.377.000,00	413.623.454,00	56.553.192,00	470.176.646,00	119,83
1.2.2 011	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.305.861.900,00	816.419.500,00	12.365.700,00	828.785.200,00	63,47
011-1	Bapekoinda (Sewa Tanah, Sewa Eks.Dinas & JEC)	1.174.948.400,00	693.168.800,00	19.200,00	693.188.000,00	59,00
011-2	Disnakertrans (Sewa Asrama Buruh Ledok Code)	3.462.000,00	3.295.000,00	284.000,00	3.579.000,00	103,38
011-3	Diskimpraswil (Sewa Mesin Gilas & Asphalt Sprayer)	2.250.000,00	1.750.000,00	500.000,00	2.250.000,00	100,00
011-4	Biro Umum (Sewa Gedung Wana Bhakti Yasa)	83.700.000,00	71.432.700,00	7.900.000,00	79.332.700,00	94,78
011-5	RSJD Prop.DIY (Sewa Mobil Jenazah & Ambulance)	537.500,00	409.000,00	62.500,00	471.500,00	87,72
011-6	Dinas Pendidikan (Sewa GOR Among Rogo)	40.964.000,00	46.364.000,00	3.600.000,00	49.964.000,00	121,97
1.2.2 012	Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan (Tempat Pelelangan Hasil Hutan)	1.032.000.000,00	797.503.375,00	72.326.325,00	869.832.200,00	84,29
1.2.2 016	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	34.140.000,00	29.465.000,00	2.845.000,00	32.310.000,00	94,64
016-1	Disnakertrans (Sewa Kamar BIP / BIK)	4.140.000,00	3.060.000,00	750.000,00	3.810.000,00	92,03
016-2	Diskimpraswil (Sewa Mess Kaliurang)	20.000.000,00	21.330.000,00	1.070.000,00	22.400.000,00	112,00
016-3	Dishutbun (Sewa Mess Erlangga Kaliurang)	10.000.000,00	5.075.000,00	1.025.000,00	6.100.000,00	61,00
1.2.2 020	Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga (Dishutbun)	35.000.000,00	40.741.600,00	5.160.000,00	45.901.600,00	131,15
1.2.2 023	Retribusi Penjualat Produksi Usaha Daerah	3.589.940.750,00	3.957.563.053,00	111.561.800,00	4.069.124.853,00	113,35
023-1	Linas Pertanian (Penjualan Ternak Susu & Bibit)	373.067.000,00	394.369.775,00	32.422.250,00	426.792.025,00	114,40
023-2	Diskanla (Hasil Penjualan Benih Ikan dari UPTD - BAT)	335.000.000,00	226.727.980,00	51.495.300,00	278.223.280,00	83,05
023-3	Dishutbun (Hasil Kebun, Bibit, Kayu, Minyak Kayu Putih & Jati)	2.864.223.750,00	3.319.298.298,00	27.389.250,00	3.346.687.548,00	116,84
023-4	RSJD Propinsi DIY (Work Therapy & Pengolahan Tanah)	2.650.000,00	2.042.000,00	255.000,00	2.297.000,00	86,68
023-5	Disperindag (Penjualan Alat Tepat Guna)	15.000.000,00	15.125.000,00	-	15.125.000,00	100,83
1.2.2 027	Retribusi Izin Trayek (Dinas Perhubungan)	62.483.000,00	59.474.060,00	12.427.000,00	71.901.060,00	115,07
1.2.2 028	Retribusi Dispensasi Kelebihan Muatan (Din. Perhubungan)	1.313.700.000,00	1.529.363.300,00	160.890.500,00	1.690.253.800,00	0,00
	JUMLAH RETRIBUSI DAERAH	7.776.677.650,00	7.654.142.592,00	435.652.267,00	8.089.794.859,00	104,03

Lanjutan Lampiran 3

1.2.3	2	3	4	5	6	7
1.2.3	POS LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN					
1.2.3 001	Bank Pembangunan Daerah	8.507.045.645,04	8.507.045.645,04	-	8.507.045.645,04	100,00
1.2.3 002	PD Aneka Industri dan Jasa ANINDYA	115.376.000,00	-	116.400.341,21	116.400.341,21	100,89
1.2.3 003	PD Tarumartani	1.580.223.416,00	822.351.416,00	757.872.000,00	1.580.223.416,00	100,00
1.2.3 004	Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)	117.816.159,00	47.034.679,31	66.234.601,25	113.269.280,56	96,14
1.2.3 050	Penyertaan Modal pada Pihak III (PT. JIS)	425.933.000,00	425.933.000,00	-	425.933.000,00	100,00
	JUMLAH LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH & HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	10.746.394.220,04	9.802.364.740,35	940.506.942,46	10.742.871.682,81	99,97
1.2.4	POS LAIN - LAIN PAD YANG SAH					
1.2.4 001	Penjualan Barang Milik Daerah (Diskimpraswil & Bi.Umum)	1.436.054.557,92	1.435.474.957,92	1.558.800,00	1.437.031.757,92	100,07
1.2.4 002	Jasa Giro (BPD)	8.104.000.000,00	10.378.680.187,00	318.764.042,00	10.697.444.229,00	132,00
1.2.4 003	Sumbangan Pihak Ketiga (Dispenda)	1.421.711.000,00	1.333.560.000,00	179.779.000,00	1.513.339.000,00	106,44
1.2.4 004	Angsuran/Cicilan Rumah Dinas (Biro Umum)	12.231.150,00	12.165.650,00	215.000,00	12.380.650,00	101,22
1.2.4 009	Pendapatan lain-lain	1.881.463.160,00	11.209.279.565,80	283.878.621,00	11.493.158.186,80	610,86
009-1	Dispenda (Adm. Jasa Raharia, TPKB Mall, TPKE Hal. Samsat, Fotocopy Samsat Kota & Sleman)	571.792.200,00	555.702.600,00	32.464.800,00	588.167.400,00	102,86
009-2	Diskanla (Penj. Kelapa, Tambak Ikan Congot, Pemancingan di BBI Wonocatur, Pasar Ikan Cangkringan, PMT Bawal, KM DIY 01, UPTD BAT)	90.000.000,00	26.970.000,00	36.465.500,00	63.435.500,00	70,48
009-3	Dinas Pertanian (Sewa Mobil Box Daging, Sewa Balai Diklat Pertanian Wonocatur & BPSP - TPH)	12.650.000,00	20.434.399,00	5.460.216,00	25.894.615,00	204,70
009-4	Diskimpraswil (Jasa Pengujian Beton)	15.000.000,00	17.118.700,00	2.807.900,00	19.926.600,00	132,84
009-5	Bapedalda (Ijin Pembuangan Limbah Cair)	3.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	33,33
009-6	Dinkeskesos (Bapelkes, BP4, RP5 Kotagede & Muja Muju, Sewa Rumah ex Depkes, Unrian Berhadiah, Lab. Kesehatan)	689.629.320,00	718.429.125,00	90.011.300,00	808.440.425,00	117,23
009-7	Disbudpar (Sewa TIC, Wartel, Parkir C. Boko, Sewa Rumah Dinas, Museum Sonobudoyo, Sewa R. Ex. Kan. Depparpostel, Sewa Gd. Pameran Bulakumur, Sewa Gd. Pertunjukan TB. Bulakumur, serta Sewa Gd. Pertunjukan & Gd. Pameran Baru di Sriwedani)	100.491.500,00	105.941.540,00	11.841.485,00	117.783.025,00	117,21
009-8	Disperindag (Jasa Pengujian Tera, Sewa LIK, YCC, Sewa Rumah Dinas & Jasa Perbengkelan)	105.620.000,00	105.922.700,00	4.468.000,00	110.390.700,00	104,52
009-9	Kaperda DIY (Sewa Gamelan & Art Shop TMII)	7.500.000,00	7.295.000,00	1.200.000,00	8.495.000,00	113,27
009-10	Kaperda DIY (Sewa Mess Pemda DIY di Jakarta)	25.000.000,00	24.130.000,00	2.925.000,00	27.055.000,00	108,22
009-11	Dinas Pendidikan (BLPT, Youth Centre, BPKB, SLB C Pemb. Gelangg. Pemuda Sorowajan & Pondok Pemuda Ambarbinangun)	49.462.400,00	59.468.950,00	5.015.300,00	64.484.250,00	130,37
009-12	Disnakertrans (BLK, Hiperkes & Jasa Instr. Lat.Kerja)	121.995.100,00	114.073.400,00	28.784.200,00	142.857.600,00	117,10
009-13	Dinas Perhubungan (Ijin KRAP & Amatir Radio)	72.245.840,00	38.304.440,00	27.803.700,00	66.108.140,00	91,50
009-14	Biro Umum (Sewa Gd. SD. & Tanah di Piyungan)	8.390.000,00	8.390.000,00	-	8.390.000,00	0,00
009-15	BPAD (Denda Keterlambatan Sewa Buku)	8.686.800,00	4.992.500,00	330.500,00	5.323.000,00	61,28
009-16	Lain - Lain Pendapatan	-	9.401.105.211,30	34.300.720,00	9.435.406.931,80	-
	JUMLAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH	12.855.459.867,92	24.369.160.360,72	784.193.463,00	25.153.353.823,72	195,66
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	248.501.101.073,88	245.490.701.668,07	26.639.077.207,46	272.129.778.875,53	109,51

Lanjutan Lampiran 3

1	2	3	4	5	6	7
1.3.	BAGIAN DANA PERIMBANGAN					
1.3.1	<i>Pos Bagi Hasil Pajak</i>	19.670.852.599,00	25.401.972.131,00	5.562.663.350,00	30.964.635.511,00	157,41
1.3.1.001	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.240.293.287,00	9.519.481.042,00	1.173.868.210,00	10.693.349.252,00	147,69
1.3.1.002	Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	2.813.805.312,00	3.272.639.834,00	358.881.900,00	3.631.521.734,00	129,06
1.3.1.003	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21	9.600.000.000,00	12.593.097.255,00	4.029.913.270,00	16.623.010.525,00	173,16
1.3.1.004	Pemberian Hak Atas Tanah Negara	16.754.000,00	16.754.000,00	-	16.754.000,00	100,00
1.3.2.	<i>Pos Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam</i>	-	3.153.089,00	3.848.976,00	7.002.065,00	-
1.3.2.001	Iuran Hasil Hutan (IHH) / Provisi Sumber Daya Hutan	-	3.153.089,00	3.848.976,00	7.002.065,00	-
1.3.3.	<i>Pos Dana Alokasi Umum</i>	201.960.000.000,00	201.960.000.000,00	-	201.960.000.000,00	100,00
1.3.3.001	Dana Alokasi Umum	201.960.000.000,00	201.960.000.000,00	-	201.960.000.000,00	100,00
1.3.4.	<i>Pos Dana Alokasi Khusus</i>	5.500.000.000,00	3.300.000.000,00	2.200.000.000,00	5.500.000.000,00	-
1.3.4.001	Dana Alokasi Khusus Reboisasi	-	-	-	-	-
1.3.4.002	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi	5.500.000.000,00	3.300.000.000,00	2.200.000.000,00	5.500.000.000,00	-
1.3.5.	<i>Pos Dana Darurat</i>	-	-	-	-	-
1.3.5.001	Bantuan Bencana Alam	-	-	-	-	-
	JUMLAH BAGIAN DANA PERIMBANGAN	227.130.852.599,00	230.665.125.220,00	7.766.512.356,00	238.431.637.576,00	104,98
1.4.	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH					
1.4.1.	<i>Pos Pinjaman Dalam Negeri</i>	-	-	-	-	-
1.4.1.001	Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
1.4.1.002	Pinjaman Dari Bank	-	-	-	-	-
1.4.1.003	Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-
1.4.1.004	Pinjaman Dari Sumber Lainnya	-	-	-	-	-
1.4.2.	<i>Pos Pinjaman Luar Negeri</i>	-	-	-	-	-
	JUMLAH BAGIAN PINJAMAN PEM. DAERAH	-	-	-	-	-
1.5.	BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH					
1.5.1.	<i>Penerimaan Dari Pemerintah</i>	27.083.964.000,00	27.803.964.000,00	4.633.994.000,00	32.437.958.000,00	119,77
1.5.1.001	Penerimaan Dari Pemerintah Dana Kontinjensi	-	-	-	-	-
1.5.1.002	Penerimaan Dari Pemerintah Dana Penyeimbang	27.083.964.000,00	27.803.964.000,00	4.633.994.000,00	32.437.958.000,00	119,77
1.5.2.	<i>Penerimaan Dari Propinsi</i>	-	-	-	-	-
1.5.3.	<i>Penerimaan Dari Kabupaten / Kota Lainnya</i>	-	-	-	-	-
1.5.4.	<i>Penerimaan Lain-Lainnya</i>	-	-	-	-	-
	JUMLAH LAIN-LAIN PENERIMAAN YG SAH	27.083.964.000,00	27.803.964.000,00	4.633.994.000,00	32.437.958.000,00	119,77
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	656.351.321.796,69	657.595.195.011,88	39.039.583.563,46	696.634.778.575,34	106,14

Lampiran 4

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2004**

NO	URAIAN	TARGET TA. 2004 SETELAH EVALUASI	REALISASI TA. 2004 S.D DESEMBER 2004
1.	Bagian Pendapatan Asli Daerah :	Rp 303.353.566.475,00	Rp 347.404.225.165,00
	a. Pajak Daerah	Rp 263.980.908.965,00	Rp 307.572.364.672,00
	b. Retribusi Daerah	Rp 10.337.749.820,00	Rp 10.418.455.708,00
	c. Laba Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp 13.742.981.692,00	Rp 13.813.583.720,00
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp 15.291.925.997,00	Rp 15.599.821.065,00
2.	Bagian Dana Perimbangan :	Rp 276.844.070.414,00	Rp 283.268.471.939,00
	a. Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	Rp 28.795.070.414,00	Rp 35.219.471.939,00
	b. Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 248.049.000.000,00	Rp 248.049.000.000,00
3.	Lain-lain Penerimaan Yang Sah :	Rp 14.945.000.000,00	Rp 14.945.000.000,00
	a. Penerimaan dari Pemerintah (Dana Penyeimbang)	Rp 14.945.000.000,00	Rp 14.945.000.000,00
	JUMLAH	Rp 595.142.636.888,00	Rp 645.617.697.104,00

Lanjutan Lampiran 4

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN PROPINSI DIY TA 2004

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih/Berkurang	
				Rupiah	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	595,142,636,888.31	645,617,697,104	50,475,060,216.09	8.48%
1 00 00 00 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	303,353,566,474.50	347,404,225,165	44,050,658,690.90	14.52%
1 00 00 00 1 1	PAJAK DAERAH	263,980,908,965.10	307,572,364,672	43,591,455,706.90	16.51%
1 00 00 00 1 1 01	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	103,300,000,000.00	117,050,212,525	13,750,212,525.00	13.31%
	Yogyakarta	34,593,800,000.00	37,372,615,925.00	2,778,815,925.00	8.03%
	Bantul	18,153,700,000.00	21,380,940,600.00	3,227,240,600.00	17.78%
	Kulonporogo	5,181,800,000.00	5,878,951,400.00	697,151,400.00	13.45%
	Gunungkidul	5,661,900,000.00	6,686,371,350.00	1,024,471,350.00	18.09%
	Sleman	39,708,800,000.00	45,731,333,250.00	6,022,533,250.00	15.17%
		103,300,000,000.00	117,050,212,525.00	13,750,212,525.00	13.31%
1 00 00 00 1 1 01 01	Sedan, Jeep, Station Wagon (bukan untuk umum)	41,640,200,000.00	47,248,618,925	5,608,418,925.00	13.47%
1 00 00 00 1 1 01 02	Sedan, Jeep, Station Wagon (umum)	387,900,000.00	610,832,100	222,932,100.00	57.47%
1 00 00 00 1 1 01 03	Bus, Micro Bus (tidak umum)	262,600,000.00	306,268,750	43,668,750.00	16.63%
1 00 00 00 1 1 01 04	Bus, Micro Bus (umum)	1,146,700,000.00	1,215,590,700	68,890,700.00	6.01%
1 00 00 00 1 1 01 05	Truck, Pick Up (tidak umum)	13,150,000,000.00	14,514,634,725	1,364,634,725.00	10.38%
1 00 00 00 1 1 01 06	Truck, Pick Up (umum)	196,300,000.00	113,861,650	(82,438,350.00)	-42.00%
1 00 00 00 1 1 01 07	Sepeda Motor, Scooter, Roda tiga	46,516,300,000.00	53,040,405,675	6,524,105,675.00	14.03%
1 00 00 00 1 1 03	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	121,000,000,000.00	145,802,143,700	24,802,143,700.00	20.50%
	Yogyakarta	36,550,600,000.00	38,301,930,000.00	1,751,330,000.00	4.79%
	Bantul	24,045,400,000.00	29,028,806,200.00	4,983,406,200.00	20.72%
	Kulonporogo	6,248,200,000.00	7,566,959,200.00	1,318,759,200.00	21.11%

Lanjutan Lampiran 4

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih/Berkurang	
				Rupiah	%
1	2	3	4	5	6
	Gunungkidul	7,538,700,000.00	9,997,967,550.00	2,459,267,550.00	32.62%
	Sleman	46,617,100,000.00	60,906,480,750.00	14,289,380,750.00	30.65%
		121,000,000,000.00	145,802,143,700.00	24,802,143,700.00	20.50%
1 00 00 00 1 1 03 01	Sedan, Jeep, Station Wagon(Tidak Umum)	30,898,800,000.00	43,265,816,550	12,367,016,550.00	40.02%
1 00 00 00 1 1 03 02	Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	285,000,000.00	1,572,861,400	1,287,861,400.00	451.88%
1 00 00 00 1 1 03 03	Bus, Micro Bus (tidak umum)	976,300,000.00	782,115,500	(194,184,500.00)	-19.89%
1 00 00 00 1 1 0 04	Bus, Micro Bus (umum)	789,300,000.00	919,106,250	129,806,250.00	16.45%
1 00 00 00 1 1 03 05	Truck, Pick Up (tidak Umum)	10,358,900,000.00	10,638,810,800	279,910,800.00	2.70%
1 00 00 00 1 1 03 06	Truck, Pick Up Umum	5,200,000.00	45,051,500	39,851,500.00	766.38%
1 00 00 00 1 1 03 07	Sepeda motor, Scooter, Roda tiga	77,686,500,000.00	88,578,381,700	10,891,881,700.00	14.02%
1 00 00 00 1 1 05	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	37,707,957,811.00	42,528,159,271	4,820,201,460.00	12.78%
1 00 00 00 1 1 05 01	Bensin/premium	27,775,116,282.00	31,454,449,342	3,679,333,060.00	13.25%
1 00 00 00 1 1 05 02	Solar	9,026,143,289.00	10,103,049,649	1,076,906,360.00	11.93%
1 00 00 00 1 1 05 03	Pertamax	906,698,240.00	970,660,280	63,962,040.00	7.05%
	PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH	1,972,951,154.10	2,191,849,176	218,898,021.90	11.09%
1 00 00 00 1 1 06 01	Pemanfaatan Air Bawah Tanah	1,972,951,154.10	2,191,849,176	218,898,021.90	11.09%
1 00 00 00 1 2	RETRIBUSI DAERAH	10,337,749,820.00	10,418,455,708.00	80,705,888.00	0.78%
1 00 00 00 1 2 01	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	1,377,197,600.00	1,513,381,820.00	136,184,220.00	9.89%
1 00 00 00 1 2 01 01	Adiministrasi/Karcis/Surat Keterangan Dokter	51,913,000.00	51,051,000.00	(862,000.00)	-1.66%
	Surat keterangan Dokter RS. Ghrasia	7,400,000.00	8,020,000.00	620,000.00	8.38%
	Karcis BP - 4 Paru	41,060,000.00	40,052,000.00	(1,008,000.00)	-2.45%
	Konsul/Kir BP - 4 Paru	3,453,000.00	2,979,000.00	(474,000.00)	-13.73%
1 07 01 01 1 2 01 02	Tindakan/Operasi	400,000.00	1,218,000	818,000.00	204.50%

Lanjutan Lampiran 4

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih/Berkurang	
				Rupiah	%
1	2	3	4	5	6
1 07 01 01 1 2 01 03	Rawat Jalan	41,060,000.00	36,235,000	(4,825,000.00)	-11.75%
1 07 01 01 1 2 01 04	Rawat Inap Umum	41,196,000.00	28,958,000.00	(12,238,000.00)	-29.71%
	Rawat Inap Balai Pengobatan Penyakit Paru	38,760,000.00	27,566,000.00	(11,194,000.00)	-28.88%
	Rawat Inap Bapelkes	2,436,000.00	1,392,000.00	(1,044,000.00)	-42.86%
1 07 01 01 1 2 01 06	Obat - Obat	197,760,000.00	271,670,855.00	73,910,855.00	37.37%
	Bapelkes	1,760,000.00	1,818,000.00	58,000.00	3.30%
	In Pasien RS Ghrasia	56,000,000.00	84,538,105.00	28,538,105.00	50.96%
	Out Pasien RS Ghrasia	140,000,000.00	185,314,750.00	45,314,750.00	32.37%
1 07 01 01 1 2 01 05	Laboratorium	340,599,500.00	444,237,640.00	103,638,140.00	30.43%
	Laboratorium BP - 4 Paru	377,500.00	1,183,000.00	805,500.00	213.38%
	Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta	340,000,000.00	442,733,640.00	102,733,640.00	30.22%
	Laboratorium Bapelkes	222,000.00	321,000.00	99,000.00	44.59%
1 07 01 01 1 2 01 09	Radiologi/Ronggent	275,520,000.00	294,559,000	19,039,000.00	6.91%
1 07 01 01 1 2 01 10	Mobil Ambulance/Mobil Jenazah	800,000.00	1,134,000.00	334,000.00	41.75%
	Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah RS Ghrasia	350,000.00	984,000.00	334,000.00	51.38%
	Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah PS. Tresna Wreda	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00%
1 07 01 01 1 2 01 11	Diklat	500,000.00	3,011,500	2,511,500.00	502.30%
1 07 01 01 1 2 01 13	Persalinan	4,365,000.00	5,190,000	825,000.00	18.90%
1 07 01 01 1 2 01 14	Kunjungan Poliklinik	17,411,800.00	34,916,500	17,504,700.00	100.53%
1 07 01 01 1 2 01 15	Pengganti Dipan	8,280,000.00	8,642,000	362,000.00	4.37%
1 07 01 01 1 2 01 16	Perawatan Pasien	324,350,000.00	236,860,000	(87,500,000.00)	-26.98%
1 07 01 01 1 2 01 17	Pengunjung Diasnotik	24,568,900.00	36,639,775	12,070,875.00	49.13%
1 07 01 01 1 2 01 18	Tindakan Medik dan Terapi	4,270,900.00	9,197,300	4,926,400.00	115.35%

Lanjutan Lampiran 4

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih/Berkurang	
				Rupiah	%
1	2	3	4	5	6
1 07 01 01 1 2 01 19	Rehabilitasi Medik	1,291,000.00	775,000	(516,000.00)	-39.97%
1 07 01 01 1 2 01 20	Perawatan Jenazah	140,000.00	0	(140,000.00)	-100.00%
1 07 01 01 1 2 01 21	Work Therapy	3,000,000.00	3,030,750	30,750.00	1.03%
1 07 01 01 1 2 01 22	Perawatan	2,411,000.00	6,322,000.00	3,911,000.00	162.21%
	- Perawatan Ibu di Bapelkes	1,622,000.00	6,322,000.00	4,700,000.00	289.77%
	- Perawatan Bayi di Bapelkes	789,000.00	0.00	(789,000.00)	-100.00%
1 07 01 01 1 2 01 23	Kunjungan UGD	4,400,000.00	5,800,000	1,400,000.00	31.82%
1 07 01 01 1 2 01 24	ANC	72,000.00	114,000	42,000.00	58.33%
1 07 01 01 1 2 01 25	Post Partum	130,500.00	259,500	129,000.00	98.85%
1 07 01 01 1 2 01 26	Keluarga Berencana	89,000.00	238,000	149,000.00	167.42%
1 07 01 01 1 2 01 27	BTA	19,710,000.00	20,258,000	548,000.00	102.78%
1 07 01 01 1 2 01 28	Darah	6,130,000.00	5,102,000	(1,028,000.00)	-16.77%
1 07 01 01 1 2 01 29	Pungsi	2,214,000.00	2,370,000	156,000.00	7.05%
1 07 01 01 1 2 01 30	EEG/EKG	4,000,000.00	4,800,000	800,000.00	20.00%
1 07 01 01 1 2 01 31	Nebulizer	110,000.00	290,000	180,000.00	163.64%
1 07 01 01 1 2 01 32	Faal Paru - Paru	495,000.00	502,000	7,000.00	1.41%
1 00 00 00 1 2 02	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	2,072,495,570.00	1,135,707,485.00	(1,878,316,170.00)	-90.63%
1 00 00 00 1 2 02 01	Sewa Tanah dan Bangunan	253,853,500.00	262,738,500.00	8,885,000.00	3.50%
	Sewa Tanah Eks. Pabrik Sabut Pengasih	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00%
	Sewa Tanah dan Bangunan eks..Panti Karya Remaja Sewon	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00%
	Sewa Eks. Dinas Pariwisata Barat Laut	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00%
	Sewa Eks. Dinas Pariwisata sebelah Barat laut	39,363,500.00	39,363,500.00	0.00	0.00%
	Sewa Eks. Dinas Pariwisata sebelah Timur laut Atas	18,250,000.00	0.00	(18,250,000.00)	-100.00%
	Sewa Eks. Dinas Pariwisata sebelah Selatan	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	0.00%

Lanjutan Lampiran 4

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih/Berkurang	
				Rupiah	%
1	2	3	4	5	6
	Sewa Eks. Dinas Pariwisata sebelah Barat laut atas	16,600,000.00	16,600,000.00	0.00	0.00%
	Sewa Tanah Milik Pemda di Sentolo	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00%
	Sewa Tanah dan Bangunan Eks. Dinas Perindustrian Malang	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00%
	Sewa Eks. Rumah Dinas AM Sangaji No. 45 Yogyakarta	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00%
	Sewa Tanah Milik Pemda di Sri Mulyo Piyungan Btl	6,840,000.00	6,840,000.00	0.00	0.00%
	Sewa Eks. rumah Dinas Jln. Podang 4 Depok	3,000,000.00	5,135,000.00	2,135,000.00	71.17%
	Sewa LIK Maguwoharjo	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00%
	Sewa LIK Maguwoharjo	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	
1 11 01 00 1 2 02 02	Sewa Alat - Alat Berat	2,250,000.00	750,000.00	(1,500,000.00)	-66.67%
	Sewa Mesin Gilas	2,100,000.00	525,000.00	(1,575,000.00)	-75.00%
	Sewa Alaphalt Spayer	150,000.00	225,000.00	75,000.00	50.00%
1 01 05 00 1 2 02 04	Sewa Rumah Dinas	3,828,320.00	4,880,460.00	1,052,140.00	27.48%
	Sewa Rumah Eks. Kanwil Depkes	340,320.00	484,320.00	144,000.00	42.31%
	Sewa Rumah Eks. Kanwil Deparpostel	1,248,000.00	1,129,000.00	(119,000.00)	-9.54%
	Sewa Rumah Dinas Perindustrian	420,000.00	228,200.00	(191,800.00)	-45.67%
	Sewa Rumah Dinas BP2BPT	600,000.00	589,140.00	(10,860.00)	-1.81%
	Sewa Rumah Dinas Disnakertrans	1,130,400.00	1,195,200.00	64,800.00	5.73%
	Sewa Rumah Dinas Perhubungan	89,600.00	84,000.00	(5,600.00)	-6.25%
	Sewa Rumah Dinas Hutbun	0	1,170,600.00	1,170,600.00	
1 00 00 00 1 2 02 06	Sewa Gedung/ Ruangan/Aula dan Asrama	1,581,806,250.00	610,973,000.00	(970,833,250.00)	-61.37%
	Sewa Gedung Wana Bhakti Jasa	74,400,000.00	74,375,000.00	(25,000.00)	-0.03%
	Sewa Gedung JEC	1,000,000,000.00	0.00	(1,000,000,000.00)	-100.00%
	Tempat Penitipan KBM di Basement Malioboro Mall	255,000,000.00	255,000,000.00	0.00	0.00%
	Tempat Foto Copy di KPPD Kota Yogyakarta	2,500,000.00	3,250,000.00	750,000.00	30.00%
	Tempat Foto Copy di KPPD Kab. Bantul	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00%
	Tempat Foto Copy di KPPD Kab. Kulonprogo	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00%

Lanjutan Lampiran 4

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih/Berkurang	
				Rupiah	%
1	2	3	4	5	6
	Tempat Foto Copy di KPPD Kab. Sleman	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00%
	Sewa Anjungan DIY TMII	7,500,000.00	7,900,000.00	400,000.00	5.33%
	Sewa Balai Pelatihan dan Pengembangan Bioteknologi	10,520,000.00	10,401,500.00	(118,500.00)	-1.13%
	Asrama Buruh Ledok Code	3,516,000.00	3,814,500.00	298,500.00	8.49%
	Sewa Asrama Bapelkes	25,600,000.00	37,904,000.00	12,304,000.00	48.06%
	Sewa Auditorium/Aula Bapelkes	4,300,000.00	8,257,500.00	3,957,500.00	92.03%
	Sewa Ruang Bapelkes	101,000.00	0.00	(101,000.00)	-100.00%
	Sewa Kelas Bapelkes	9,500,000.00	6,199,500.00	(3,300,500.00)	-34.74%
	Balai latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta	26,219,250.00	27,267,000.00	1,047,750.00	4.00%
	Balai Pengembangan Kegiatan Belajar	9,450,000.00	9,657,000.00	207,000.00	2.19%
	Balai Pengembangan Pemuda dan Olah Raga	21,905,000.00	22,684,500.00	779,500.00	3.56%
	SLB Pembina Yogyakarta	4,000,000.00	4,742,500.00	742,500.00	18.56%
	Sewa gedung Ndalem Condokiranan	8,000,000.00	8,500,000.00	500,000.00	6.25%
	Sewa Gedung Pamer Bulak Sumur	5,550,000.00	7,050,000.00	1,500,000.00	27.03%
	Sewa Pertunjukan TB Bulaksumur	26,500,000.00	28,750,000.00	2,250,000.00	8.49%
	Sewa Gedung pertunjukan TB Sriwedari	59,875,000.00	68,100,000.00	8,225,000.00	13.74%
	Sewa Gedung Pameran Sriwedari	5,750,000.00	5,500,000.00	(250,000.00)	-4.35%
	Sewa Asrama Panti asuhan Tresno Werono	1,870,000.00	1,870,000.00	0.00	0.00%
	Sewa Tempat untuk Counter TIC	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00%
	Sewa Ruang untuk Wartel TIC	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00%
1 00 00 00 1 2 02 09	Sewa lahan, Tanah, Tambak dan sejenisnya	34,487,500.00	32,060,925.00	(2,426,575.00)	-7.04%
	Tempat Penitipan KBM di halaman KPPD Kota Yogyakarta	4,000,000.00	4,500,000.00	500,000.00	12.50%
	Tempat Penitipan KBM di halaman KPPD Kab. Bantul	2,700,000.00	2,800,000.00	100,000.00	3.70%
	Tempat Penitipan KBM di halaman KPPD Kab. Kulonprogo	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00%
	Tempat Penitipan KBM di halaman KPPD Kab. Gunungkidul	720,000.00	1,200,000.00	480,000.00	66.67%
	Tempat Penitipan KBM di halaman KPPD Kab. Sleman	5,500,000.00	6,000,000.00	500,000.00	9.09%
	Sewa Pasar Ikan LRI Wonocatur	12,000,000.00	5,500,000.00	(6,500,000.00)	-54.17%
	Sewa Pasar Ikan BBI Cangkringan	1,500,000.00	1,650,000.00	150,000.00	10.00%

Lanjutan Lampiran 4

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih/Berkurang	
				Rupiah	%
1	2	3	4	5	6
	Halaman Taman Budaya Sriwedari	3,000,000.00	2,000,000.00	(1,000,000.00)	-33.33%
	Tempat Parkir Ratu Boko	3,067,500.00	6,410,925.00	3,343,425.00	109.00%
1 00 00 00 1 2 02 11	Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	77,270,000.00	92,102,500.00	14,832,500.00	19.20%
	Balai Istirahat karyawan(BIK)	12,940,000.00	23,790,000.00	10,850,000.00	83.85%
	Balai Istirahatan Pegawai (BIP)	4,830,000.00	6,955,000.00	2,125,000.00	44.00%
	Sewa Vila Kaliurang	24,500,000.00	26,210,000.00	1,710,000.00	6.98%
	Wisma Erlangga Kaliurang	10,000,000.00	10,075,000.00	75,000.00	0.75%
	Sewa Mess Pemda DIY di Jakarta	25,000,000.00	25,072,500.00	72,500.00	0.29%
1 00 00 00 1 2 02 12	Tempat Rekreasi	62,000,000.00	70,462,100.00	8,462,100.00	13.65%
	Hutan Wisata Kaliurang	45,000,000.00	49,080,600.00	4,080,600.00	9.07%
	Tiket Masuk Sonobudoyo	5,750,000.00	7,407,750.00	1,657,750.00	28.83%
	Tiket Masuk Pagelaran Wayang Durasi Singkat	11,250,000.00	13,973,750.00	2,723,750.00	24.21%
1 08 01 04 1 2 02 13	Tempat Olah Raga	42,000,000.00	46,615,000	4,615,000.00	10.99%
1 05 01 01 1 2 02 16	Perindustrian/Lain-lain/Penjualan Alat tepat guna	15,000,000.00	15,125,000	125,000.00	0.83%
1 01 05 00 1 2 05	RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN	400,000,000.00	514,303,700	114,303,700.00	28.58%
1 01 05 00 1 2 05 01	Tempat Pelelangan Hasil Hutan	400,000,000.00	514,303,700	114,303,700.00	28.58%
1 00 00 00 1 2 06	RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH	4,249,780,650.00	4,470,993,907.00	447,426,514.00	10.53%
1 00 00 00 1 2 06 01	Penjualan Ternak/Daging/Susu	104,909,000.00	119,530,500.00	14,621,500.00	13.94%
	UPTD Balai Pengembangan Mutu Bibit dan Pakan Ternak	11,250,000.00	17,250,000.00	6,000,000.00	53.33%
	UPTD Balai Diagnostik Kehewan	3,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	33.33%

Lanjutan Lampiran 4

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih/Berkurang	
				Rupiah	%
1	2	3	4	5	6
	UPTD Balai Diagnostik Kehewan	31,625,000.00	38,111,000.00	6,486,000.00	20.51%
	UPTD Balai Diagnostik Kehewan	4,200,000.00	4,250,000.00	50,000.00	1.19%
	UPTD Balai Pengembangan Mutu Bibit dan Pakan Ternak	39,000,000.00	40,085,500.00	1,085,500.00	2.78%
	UPTD Balai Diagnostik Kehewan	15,834,000.00	15,834,000.00	0.00	0.00%
1 00 00 00 1 2 06 02	Penjualan Benih/Bibit	398,973,600.00	463,289,700.00	64,316,100.00	16.12%
	Bibit Padi wijilan, Kulonprogo	66,300,000.00	79,563,950.00	13,263,950.00	20.01%
	Bibit Padi Wonocatur Bantul	11,700,000.00	15,261,300.00	3,561,300.00	30.44%
	Bibit Padi Gesikan Bantul	18,850,000.00	25,539,500.00	6,689,500.00	35.49%
	Bibit Polowijo Panggang	3,620,000.00	3,631,000.00	11,000.00	0.30%
	Bibit Polowijo Gading	20,650,000.00	20,702,000.00	52,000.00	0.25%
	Bibit Holtikultura Ngipiksari	19,550,600.00	34,427,950.00	14,877,350.00	76.10%
	Bibit Holtikultura Tambak	5,602,500.00	5,656,500.00	54,000.00	0.96%
	Bibit Holtikultura Wonocatur	4,500,500.00	4,674,250.00	173,750.00	3.86%
	Bibit/Persemian LPUT Wijilan	50,700,000.00	61,243,250.00	10,543,250.00	20.80%
	Bibit/Persemian Jati BP3KP	37,500,000.00	37,590,000.00	90,000.00	0.24%
	Semen Beku BPMBPT	160,000,000.00	175,000,000.00	15,000,000.00	9.38%
1 03 01 01 1 2 06 03	Hasil Penjualan Benih Ikan	341,691,800.00	333,960,600.00	(7,731,200.00)	-2.26%
	Unit Kerja BAT Cangkringan	160,000,000.00	160,105,600.00	105,600.00	0.07%
	Unit Kerja BAT Wonocatur	15,000,000.00	8,675,000.00	(6,325,000.00)	-42.17%
	Unit Kerja BAT Krapyak	5,939,900.00	7,565,000.00	1,625,100.00	27.36%
	Unit Kerja BAT Gesikan	4,751,900.00	6,049,000.00	1,297,100.00	27.30%
	Unit Kerja BAT Bejiharjo	10,000,000.00	10,106,000.00	106,000.00	1.06%

Lanjutan Lampiran 4

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih/Berkurang	
				Rupiah	%
1	2	3	4	5	6
	Unit Kerja BAT Sendangsari	30,000,000.00	31,020,000.00	1,020,000.00	3.40%
	Unit Kerja BBUG Samas	96,000,000.00	90,440,000.00	(5,560,000.00)	-5.79%
	Unit Kerja BAL Sundak	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00%
1 03 01 01 1 2 06 04	Penjualan Hasil Kebun dan Hutan	3,394,206,250.00	3,549,213,107.00	155,006,857.00	4.57%
	Hasil Kebun Tambak	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00%
	Hasil Kebun Kehutanan	10,500,000.00	10,643,000.00	143,000.00	1.36%
	Hasil Kebun Ngipik Sari	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00%
	Penjualan kayu hutan	0.00	22,941,157.00	22,941,157.00	
	Minyak kayu Putih:				
	Lelang	2,415,000,000.00	3,194,413,950.00	779,413,950.00	32.27%
	Koperasi Korpri	967,356,250.00	319,865,000.00	(647,491,250.00)	-66.93%
1 03 01 01 1 2 06 05	Sawah Tambak Congot	10,000,000.00	5,000,000	(5,000,000.00)	-50.00%
1 12 01 00 1 2 07	RETRIBUSI IZIN TRAYEK	74,121,000.00	99,773,240.00	25,652,240.00	34.61%
1 12 01 00 1 2 07 01	Kartu Pengawasan Kendaraan Umum, Bus dan Taxi	3,315,000.00	652,500.00	(2,662,500.00)	-80.32%
	Kapasitas tempat duduk 10 - 19 Orang	2,565,000.00	0.00	(2,565,000.00)	-100.00%
	Kapasitas tempat duduk di atas 34 orang	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Taxi	750,000.00	652,500.00	(97,500.00)	-13.00%
1 12 01 00 1 2 07 02	Ijin Trayek	70,806,000.00	99,120,740.00	28,314,740.00	39.99%
	Kapasitas tempat Duduk 6 - 9 Orang	12,725,000.00	37,400,000.00	24,675,000.00	193.91%
	Kapasitas Tempat Duduk 10 - 19 orang	20,097,000.00	23,100,000.00	3,003,000.00	14.94%
	Kapasitas tempat duduk diatas 34 oarang	3,040,000.00	3,600,000.00	560,000.00	18.42%
	Taxi	34,944,000.00	35,020,740.00	76,740.00	0.22%
1 12 01 01 1 2 08	RETRIBUSI DISPENSASI KELEBIHAN MUATAN	1,800,900,000.00	2,249,597,000	448,697,000.00	24.92%

Lanjutan Lampiran 4

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih/Berkurang	
				Rupiah	%
1	2	3	4	5	6
1 12 01 01 1 2 03 01	Kelebihan Muatan Mobil barang 5% <D<15%	1,472,040,000.00	1,510,007,000	37,967,000.00	2.58%
1 12 01 01 1 2 08 02	Kelebihan Muatan Mobil barang 15% <D<30%	328,860,000.00	739,590,000	410,730,000.00	124.90%
1 00 00 00 1 2 09	RETRIBUSI JASA UMUM	363,255,000.00	434,698,556.00	117,755,112.00	32.42%
1 00 00 00 1 2 09 01	Sewa Tempat dan alat Uji Kendaraan bermotor	67,000,000.00	90,400,000	23,400,000.00	34.93%
1 00 00 00 1 2 09 02	Sertifikasi Benih	8,700,000.00	19,064,231.00	10,364,231.00	119.13%
	Sertifikasi Benih BPSBTPH	7,000,000.00	7,372,798.00	372,798.00	5.33%
	Sertifikasi Benih BP2MBTKP	1,700,000.00	11,691,433.00	9,991,433.00	587.73%
1 11 01 03 1 2 09 03	Pengujian Mutu Kontruksi	25,000,000.00	44,780,600.00	19,780,600.00	79.12%
	Jasa Pelayanan Mutu air	7,400,000.00	7,774,600.00	374,600.00	5.06%
	Jasa Pelayanan Pengujian Mekanika tanah dan Batuan	7,830,000.00	7,883,200.00	53,200.00	0.68%
	Jasa Pelayanan Pengujian Aspal dan Campuran aspal	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Jasa Pengujian Agregat dan Campuran Beton	0.00	29,122,800.00	29,122,800.00	0.00%
	Jasa pelayanan Pengujian Bahan Bangunan lainnya	9,770,000.00	0.00	(9,770,000.00)	-100.00%
1 05 01 03 1 2 09 04	Jasa Tera	95,000,000.00	96,731,300	1,731,300.00	1.82%
1 06 01 01 1 2 09 05	Pelatihan di Balai latihan Kerja	49,230,000.00	53,281,000.00	4,051,000.00	8.23%
	Pelatihan Otomotif	18,880,000.00	32,904,000.00	14,024,000.00	74.28%
	Pelatihah Tehnik Mekanik	5,760,000.00	2,580,000.00	(3,180,000.00)	-55.21%
	Pelatihan listrik	4,160,000.00	6,096,000.00	1,936,000.00	46.54%
	Pelatihan Elektro	7,040,000.00	4,085,000.00	(2,955,000.00)	-41.97%
	Pelatihahan Aneka Kejuruan	3,840,000.00	3,456,000.00	(384,000.00)	-10.00%
	Pelatihan Niaga	9,550,000.00	4,160,000.00	(5,390,000.00)	-56.44%
1 06 01 02 1 2 09 06	Pelayanan Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja	88,750,000.00	90,257,500.00	1,507,500.00	1.70%
	Pelayanan lingkungan, kesehatan keselamatan kerja.	43,750,000.00	43,757,500.00	7,500.00	0.02%
	Pelatihan Hiperkes dan keselamatan kerja.	45,000,000.00	46,500,000.00	1,500,000.00	3.33%

Lanjutan Lampiran 4

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih/Berkurang	
				Rupiah	%
1	2	3	4	5	6
1 06 01 04 1 2 09 07	Balai Pengembangan Produktifitas Kerja	9,575,000.00	9,600,000.00	25,000.00	0.26%
	Jasa Penyuiuhan Produktifitas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%
	Jasa Pengukuran	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%
	Jasa Pelatihan	3,710,000.00	3,710,000.00	0.00	0.00%
	Jasa Penerapan IPI	3,360,000.00	3,385,000.00	25,000.00	0.74%
	Jasa Penjurian GKM	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%
	Jasa Bakat Kewirausahaan	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00%
1 08 03 00 1 2 09 08	Penggantian Biaya cetak	15,000,000.00	25,583,225.00	10,583,225.00	70.55%
	Kartu anggota Perpustakaan	10,000,000.00	12,073,000.00	2,073,000.00	20.73%
	Kartu Bebas Pustaka	5,000,000.00	9,959,000.00	4,959,000.00	99.18%
	Denda keterlambatan	0.00	3,551,225.00	3,551,225.00	
1 05 01 01 1 02 09 09	Jasa Perbengkelan	5,000,000.00	5,000,700	700.00	0.01%
1 01 05 00 1 3	HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	13,742,981,692.40	13,813,583,720.40	211,806,622.00	1.54%
1 01 05 00 1 3 01	Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah	1,790,621,593.36	1,790,621,330	141,204,325.00	7.89%
1 01 05 00 1 3 01 01	PD. Anindya	422,833,000.00	422,832,731	(269.00)	0.00%
1 01 05 00 1 3 01 02	PD. Taruna Martani	1,367,788,599.36	1,367,788,599	0.00	0.00%
1 01 05 00 1 3 02	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	11,291,611,093.04	11,291,611,093.04	0.00	0.00%
1 01 05 00 1 3 02 01	Bank Pembangunan Daerah	11,291,611,093.04	11,291,611,093.04	0.00	0.00%
	Deviden	8,468,708,319.78	8,468,708,319.78	0.00	0.00%
	Dana Pembangunan	2,822,902,773.26	2,822,902,773.26	0.00	0.00%

Lanjutan Lampiran 4

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih/Berkurang	
				Rupiah	%
1	2	3	4	5	6
1 01 05 00 1 3 03	Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank	115,376,000.00	185,978,297	70,602,297.00	61.19%
1 01 05 00 1 3 03 01	Badan Usaha kredit Pedesaan (BUKP)	115,376,000.00	185,978,297	70,602,297.00	61.19%
1 01 05 00 1 3 04	Bagian laba Atas Penertaan Modal/Investasi Pihak ke tiga	545,373,000.00	545,373,000.00	0.00	0.00%
1 01 05 00 1 3 04 01	PT JIS	545,373,000.00	545,373,000.00	0.00	0.00%
	Bagian Keuntungan	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00%
	Bagian Tempat Usaha	365,373,000.00	365,373,000.00	0.00	0.00%
1 00 00 00 1 4	LAIN - LAIN PAD YANG SAH	15,291,925,997.00	15,599,821,065	307,895,068.00	2.01%
1 00 00 00 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang dipisahkan	1,050,000.00	2,758,000	1,708,000.00	162.67%
1 00 00 00 1 4 01 07	Penjualan Drum bekas	1,050,000.00	2,758,000	1,708,000.00	162.67%
1 00 00 00 1 4 02	Penerimaan Jasa Giro	7,333,333,333.00	6,951,588,719	(381,744,614.00)	-5.21%
1 00 00 00 1 4 02 01	Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah/BPD	7,333,333,333.00	6,951,588,719	(381,744,614.00)	-5.21%
1 00 00 00 1 4 03	Penerimaan Burangga Deposito	4,866,666,664.00	4,866,666,664	0.00	0.00%
1 00 00 00 1 4 03 01	Rekening pada BFD	4,866,666,664.00	4,866,666,664	0.00	0.00%
1 00 00 00 1 4 06	Sumbangan Pihak Ketiga	2,053,084,000.00	2,136,893,950.00	83,809,950.00	4.08%
1 00 00 00 1 4 06 01	Daeler Otomotif	1,864,356,000.00	1,992,592,000.00	128,236,000.00	6.88%
	Yogyakarta	433,848,000.00	502,693,000.00	68,845,000.00	15.87%
	Bantul	438,924,000.00	413,493,000.00	(25,431,000.00)	-5.79%
	Kulonporogo	105,944,000.00	111,271,000.00	5,327,000.00	5.03%
	Gunungkidul	151,280,000.00	152,186,000.00	906,000.00	0.60%
	Sleman	734,360,000.00	812,949,000.00	78,589,000.00	10.70%
1 00 00 00 1 4 06 02	Main Daeler	18,000,000.00	18,000,000	0.00	0.00%

Lanjutan Lampiran 4

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih/Berkurang	
				Rupiah	%
1	2	3	4	5	6
1 00 00 00 1 4 06 04	Lain - Lain Pengusaha	156,600,000.00	107,071,950.00	(49,528,050.00)	-31.63%
	Sumbangan dari PT Sari Husada	6,600,000.00	8,200,000.00	1,600,000.00	24.24%
	Sumbangan dari Undian Berhadiah	150,000,000.00	98,871,950.00	(51,128,050.00)	-34.09%
1 00 00 00 1 4 06 05	Biaya Pengganti STNK yang hilang	14,128,000.00	19,230,000.00	5,102,000.00	36.11%
	Yogyakarta	4,300,000.00	5,955,000.00	1,655,000.00	38.49%
	Bantul	4,128,000.00	5,475,000.00	1,347,000.00	32.63%
	Kulonporogo	1,068,000.00	1,005,000.00	(63,000.00)	-5.90%
	Gunungkidul	1,374,000.00	1,925,000.00	551,000.00	40.10%
	Sieman	3,258,000.00	4,870,000.00	1,612,000.00	49.48%
1 01 03 05 1 4 07	Angsuran Rumah Dinas	3,390,000.00	3,365,250.00	(24,750.00)	-0.73%
1 01 03 05 1 4 07 01	Angsuran rumah Dinas	3,390,000.00	3,365,250.00	(24,750.00)	
	RR. Projo Suminto	786,000.00	786,000.00	0.00	0.00%
	RR. Wiryo Sucipta	768,000.00	768,000.00	0.00	0.00%
	RR. Prawirodigdo	1,026,000.00	1,001,250.00	(24,750.00)	-2.41%
	NY. Sunarti Slamet H	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00%
1 01 03 05 1 4 03	PT Jasa Rahardja	857,306,000.00	916,069,200.00	58,763,200.00	6.85%
1 01 03 05 1 4 08 01	Bantuan Administrasi dari PT Jasa Rahardja	857,306,000.00	916,069,200.00	58,763,200.00	6.85%
	Yogyakarta	220,671,600.00	227,461,200.00	6,789,600.00	3.08%
	Bantul	195,464,400.00	210,606,000.00	15,141,600.00	7.75%
	Kulonporogo	58,723,200.00	62,820,000.00	4,096,800.00	6.98%
	Gunungkidul	60,268,800.00	67,941,600.00	7,672,800.00	12.73%
	Sleman	322,178,000.00	347,240,400.00	25,062,400.00	7.78%

Lanjutan Lampiran 4

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih/Berkurang	
				Rupiah	%
1	2	3	4	5	6
1 00 00 00 1 4 09	Pendapatan Lain - Lain	177,096,000.00	722,479,282.00	545,383,282.00	307.96%
1 00 00 00 1 4 09 01	Ijin Radio antar penduduk	22,990,000.00	19,689,000	(3,301,000.00)	-14.36%
1 00 00 00 1 4 09 02	Ijin Amatir Radio	19,900,000.00	13,980,000	(5,920,000.00)	-29.75%
1 00 00 00 1 4 09 03	Hasil samping KM/PMT	12,000,000.00	12,000,000	0.00	0.00%
1 00 00 00 1 4 09 04	Pemanfaatan Aset PP Sadeng	5,000,000.00	5,425,000	425,000.00	8.50%
1 00 00 00 1 4 09 05	Hasil samping Uji coba	30,000,000.00	30,000,000	0.00	0.00%
1 00 00 00 1 4 09 06	Pengujian Mutu Ikan	1,506,000.00	1,506,000	0.00	0.00%
1 00 00 00 1 4 09 07	Pengujian Mutu anak Ayam	2,700,000.00	2,700,000	0.00	0.00%
1 00 00 00 1 4 09 08	Ijin Pembuangan Limbah Cair	3,000,000.00	600,000	(2,400,000.00)	-80.00%
1 00 00 00 1 4 09 11	Pemanfaatan lahan di lahan manfaat jalan	80,000,000.00	55,012,000	(24,988,000.00)	-31.24%
1 00 00 00 1 4 09 12	Penerimaan Lain - Lain	0.00	581,567,282	581,567,282.00	
1 01 05 00 2	DANA PERIMBANGAN	276,844,070,413.81	283,268,471,939.00	6,424,401,525.19	2.32%
1 01 05 00 2 1 01	BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK	28,795,070,413.81	35,219,471,939.00	6,424,401,525.19	22.31%
1 01 05 00 2 1 01 01	Pajak Bumi dan Bangunan	11,029,488,090.37	13,746,137,755.00	2,716,649,664.63	24.63%
	Perkiraan Penerimaan PBE Berdasarkan Reaisasi Tahun 2003	10,693,349,252.00	13,383,466,809.00	2,690,117,557.00	25.16%
	Biaya Pemungutan	336,138,838.37	362,670,946.00	26,532,107.63	7.89%
1 01 05 00 2 1 01 02	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3,631,521,734.00	6,600,230,160	2,968,708,426.00	81.75%
1 01 05 00 2 1 01 03	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21)	14,134,060,589.44	14,873,104,024	739,043,434.56	5.23%
1 01 05 00 2 2	DANA ALOKASI UMUM	248,049,000,000.00	248,049,000,000	0.00	0.00%
1 01 05 00 2 2 01	Dana Alokasi Umum	248,049,000,000.00	248,049,000,000	0.00	0.00%
1 01 05 00 2 2 01 01	Dana Alokasi Umum	248,049,000,000.00	248,049,000,000	0.00	0.00%

Lanjutan Lampiran 4

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih/Berkurang	
				Rupiah	%
1	2	3	4	5	6
1 01 05 00 3	LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH	14,945,000,000.00	14,945,000,000	0.00	0.00
1 01 05 00 3 1 01	Bantuan Dana Kontijensi Penyeimbang dari Pemerintah	14,945,000,000.00	14,945,000,000	0.00	0.00%
1 01 05 00 3 1 01 01	Bantuan Dana Perimbangan	14,945,000,000.00	14,945,000,000	0.00	0.00%

Yogyakarta, Agustus 2005

Kepala

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DIY



Drs. Mulyanto, MM

490048341

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2005**

NO	URAIAN	TARGET TA. 2005 SETELAH EVALUASI	REALISASI TA. 2005 S.D DESEMBER 2005
1.	Bagian Pendapatan Asli Daerah :	Rp 375.879.788.111,36	Rp 401.490.388.085,11
	a. Pajak Daerah	Rp 338.866.932.998,36	Rp 360.119.663.754,00
	b. Retribusi Daerah	Rp 12.010.026.408,00	Rp 11.895.004.029,00
	c. Laba Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp 12.358.409.005,00	Rp 11.859.586.426,00
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp 12.644.419.700,00	Rp 17.616.133.876,11
2.	Bagian Dana Perimbangan :	Rp 271.047.087.314,04	Rp 277.237.967.321,00
	a. Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	Rp 32.355.087.314,04	Rp 38.545.967.321,00
	b. Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 238.692.000.000,00	Rp 238.692.000.000,00
3.	Lain-lain Penerimaan Yang Sah :	Rp 20.429.000.000,00	Rp 20.429.000.000,00
	a. Penerimaan dari Pemerintah (Dana Penyeimbang)	Rp 20.429.000.000,00	Rp 20.429.000.000,00
	JUMLAH	Rp 667.355.875.425,40	Rp 699.157.355.406,11

Lanjutan Lampiran 5

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2005	S/D TW I	%	S/D TW II	%	S/D TW III	%	S/D TW IV	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1	PENDAPATAN	667,355,875,425.40	150,155,007,904.00	22.50	332,807,775,087.00	49.87	519,104,953,348.00	77.79	699,157,355,406.11	104.77
1 00 00 00 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	375,879,788,111.36	86,321,613,478.00	22.97	193,838,946,754.00	51.57	295,618,588,237.00	78.65	401,490,388,085.11	106.81
1 00 00 00 1 1	PAJAK DAERAH	338,866,932,992.36	82,011,455,008.00	66.92	173,255,164,544.00	51.13	267,267,576,481.00	78.87	360,119,663,754.00	106.27
	PKB dan BBN KB	294,816,730,700.00	70,782,535,260.00	24.01	147,883,435,129.00	50.16	227,120,571,150.00	77.04	304,002,463,855.00	103.12
	Yogyakarta	83,928,934,000.00	19,949,696,610.00	23.77	42,346,844,475.00	50.46	64,670,444,750.00	77.05	84,820,516,155.00	101.06
	Bantul	54,972,638,000.00	12,852,715,200.00	23.38	25,799,038,000.00	46.93	40,682,303,450.00	74.00	55,023,335,250.00	100.09
	Kulon Progo	14,604,735,000.00	3,648,813,100.00	24.98	7,845,347,800.00	53.72	12,080,573,350.00	82.72	16,315,939,250.00	111.72
	Gunungkidul	18,473,152,700.00	4,474,768,450.00	24.22	9,351,309,254.00	50.62	14,708,310,350.00	79.62	19,812,230,950.00	107.25
	Sleman	122,837,271,000.00	29,856,541,900.00	24.31	62,540,895,600.00	50.91	94,978,939,250.00	77.32	127,053,051,400.00	103.43
1 00 00 00 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor	130,059,012,000.00	32,430,742,910.00	24.94	67,755,295,100.00	52.10	107,335,506,475.00	82.53	149,291,828,905.00	114.79
01 04 01	Yogyakarta	40,856,619,000.00	9,653,226,910.00	23.63	20,741,576,150.00	50.77	32,923,589,075.00	80.58	45,044,171,805.00	110.25
01 04 02	Bantul	23,393,223,000.00	6,006,753,550.00	25.68	12,656,756,450.00	54.10	19,952,290,100.00	85.29	27,587,244,350.00	117.93
01 04 03	Kulon Progo	6,332,417,000.00	1,731,961,800.00	27.35	3,574,992,900.00	56.46	5,567,928,400.00	87.93	7,698,799,600.00	121.58
01 04 04	Gunungkidul	7,315,010,000.00	1,860,221,500.00	25.43	3,973,961,150.00	54.33	6,234,387,200.00	87.00	8,878,048,650.00	121.37
01 04 05	Sleman	52,161,743,000.00	13,178,579,150.00	25.26	27,812,159,850.00	53.32	43,531,463,100.00	83.45	60,083,564,200.00	115.19
1 00 00 00 0 1 03	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	164,757,718,700.00	38,351,792,350.00	23.28	80,128,140,029.00	48.63	119,785,064,675.00	72.70	154,710,634,950.00	93.90
01 04 01	Yogyakarta	43,072,315,000.00	10,296,469,700.00	23.91	21,605,268,325.00	50.16	31,746,855,675.00	73.71	39,776,344,350.00	92.35
01 04 02	Bantul	31,579,415,000.00	6,845,961,650.00	21.68	14,417,141,500.00	45.65	22,004,873,300.00	69.68	28,710,690,550.00	90.92
01 04 03	Kulon Progo	8,272,318,000.00	1,916,851,300.00	23.17	3,999,646,350.00	48.35	6,241,936,400.00	75.46	8,346,431,100.00	100.90
01 04 04	Gunungkidul	11,158,142,700.00	2,614,546,950.00	23.43	5,377,348,104.00	48.19	8,343,923,150.00	74.78	10,907,681,750.00	97.76
01 04 05	Sleman	70,675,528,000.00	16,677,962,750.00	23.60	34,728,735,750.00	49.14	51,447,476,150.00	72.79	66,969,487,200.00	94.76
1 01 04 00 1 1 05	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	41,850,202,298.36	10,855,616,313.00	25.94	24,518,587,740.00	58.59	38,585,732,601.00	92.20	53,914,945,004.00	128.83
1 01 04 00 1 1 05 01	Bensin/Premium	31,254,845,674.70	8,277,832,721.00	26.48	18,603,377,571.00	59.52	29,111,218,980.00	93.14	40,811,302,514.00	130.58
	Yogyakarta	17,994,257,930.30	4,561,993,591.00	25.35	10,146,715,171.00	56.39	14,015,392,180.00	77.89	12,728,158,914.00	70.73
	Bantul	3,126,235,121.50	992,924,400.00	31.76	2,250,133,200.00	71.98	4,076,675,600.00	130.40	7,290,432,400.00	233.20
	Kulon Progo	467,908,803.80	189,896,400.00	40.58	453,693,200.00	96.96	1,059,758,000.00	226.49	2,790,830,400.00	596.45
	Gunungkidul	1,695,303,694.10	417,554,800.00	24.63	961,009,600.00	56.69	1,723,182,000.00	101.64	3,095,270,400.00	182.58
	Sleman	7,971,140,124.50	2,115,457,600.00	26.54	4,791,826,400.00	60.11	8,236,211,200.00	103.33	14,906,660,400.00	187.01
1 01 04 00 1 1 05 02	Solar	9,848,500,128.66	2,401,090,962.00	24.38	5,565,998,889.00	56.52	8,920,330,101.00	90.58	12,260,112,242.00	124.49
	Yogyakarta	4,800,089,036.54	1,142,304,242.00	23.80	2,698,871,369.00	56.23	3,832,056,181.00	79.83	3,299,468,382.00	68.74
	Bantul	1,216,538,224.00	349,143,680.00	28.70	810,026,080.00	66.58	1,412,606,080.00	116.12	2,167,874,420.00	178.20
	Kulon Progo	228,471,812.80	64,016,640.00	28.02	158,238,240.00	69.26	458,432,640.00	200.65	1,420,422,400.00	621.71
	Gunungkidul	690,162,904.64	151,407,040.00	21.94	399,743,040.00	57.92	756,908,640.00	109.67	1,318,633,600.00	191.06
	Sleman	2,913,238,150.68	694,219,360.00	23.83	1,499,120,160.00	51.46	2,460,326,560.00	84.45	4,053,713,440.00	139.15
1 01 04 00 1 1 05 05	Pertamax.	746,856,495.00	176,692,560.00	23.66	349,211,280.00	46.76	554,183,520.00	74.20	843,470,248.00	112.94
	Yogyakarta	629,206,380.00	97,389,600.00	15.48	197,561,760.00	31.40	311,752,320.00	49.55	398,635,104.00	63.36
	Bantul	23,130,030.00	8,347,680.00	36.09	16,695,360.00	72.18	25,043,040.00	108.27	32,052,144.00	138.57
	Kulon Progo	0.00	0.00		0.00		3,373,920.00	0.00	22,104,424.00	0.00
	Gunungkidul	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	Sleman	94,520,085.00	70,955,280.00	75.07	134,954,160.00	142.78	214,014,240.00	226.42	390,678,576.00	413.33

Lanjutan Lampiran 5

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2005	S/D TW I	%	S/D TW II	%	S/D TW III	%	S/D TW IV	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1 01 04 00 1 1 06	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	2,200,000,000.00	373,303,435.00	16.97	853,141,675.00	38.78	1,561,272,730.00	70.97	2,202,254,895.00	100.10
	Yogyakarta	921,140,000.00	177,562,350.00	19.28	379,192,000.00	41.17	644,465,300.00	69.96	928,215,700.00	100.77
	Bantul	26,620,000.00	7,359,050.00	27.64	26,166,850.00	98.30	46,038,025.00	172.95	75,429,350.00	283.36
	Kulon Progo	20,020,000.00	2,275,000.00	11.36	13,906,400.00	69.46	29,370,150.00	146.70	36,401,050.00	181.82
	Gunungkidul	53,680,000.00	18,412,585.00	34.30	20,650,000.00	38.47	43,564,980.00	81.16	87,033,495.00	162.13
	Sleman	1,178,540,000.00	167,694,450.00	14.23	394,813,400.00	33.50	779,421,250.00	66.13	1,075,175,300.00	91.23
1 00 00 00 1 2	RETRIBUSI DAERAH	12,010,026,408.00	1,448,602,745.00	12.06	3,312,506,998.00	27.58	6,727,749,618.00	56.02	11,895,004,029.00	99.04
1 00 00 00 1 2 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1,989,848,200.00	396,172,690.00	19.91	849,132,548.00	42.67	1,650,434,768.00	82.94	2,655,520,608.00	133.45
1 00 00 00 1 2 01 01	Administrasi/Karcis/Surat Ket Dokter	48,460,000.00	10,370,000.00	21.40	20,326,500.00	41.94	32,363,000.00	66.78	42,245,000.00	87.17
07 02 00	SK Dokter RS. Grhasia.	7,400,000.00	1,095,000.00	14.80	1,287,500.00	17.40	3,135,000.00	42.36	3,508,000.00	47.41
07 01 01	BP-4	41,060,000.00	9,275,000.00	22.59	19,039,000.00	46.37	29,258,000.00	71.26	38,737,000.00	94.34
07 01 01	Karcis BP-4	41,060,000.00	9,275,000.00	22.59	19,039,000.00	46.37	29,258,000.00	71.26	38,737,000.00	94.34
1 07 01 01 1 2 01 02	Tindakan/Operasi	1,800,000.00	1,008,000.00	56.00	1,648,000.00	91.56	2,491,000.00	138.39	3,129,000.00	173.83
	Pungsi	1,800,000.00	1,008,000.00	56.00	1,602,000.00	89.00	2,142,000.00	119.00	2,592,000.00	144.00
	Fisioterapi				24,000.00		272,000.00	0.00	416,000.00	0.00
	UGD				22,000.00		77,000.00	0.00	121,000.00	0.00
1 07 01 01 1 2 01 03	Rawat Jalan	41,060,000.00	9,275,000.00	22.59	18,974,000.00	46.21	29,193,000.00	71.10	38,672,000.00	94.18
	BP-4									
	Rawat Jalan	41,060,000.00	9,275,000.00	22.59	18,974,000.00	46.21	29,193,000.00	71.10	38,672,000.00	94.18
1 00 00 00 1 2 01 04	Rawat Inap	30,660,000.00	7,848,000.00	25.60	12,816,000.00	41.80	20,584,000.00	67.14	24,812,000.00	80.93
07 01 01	BP-4									
1 00 00 00 1 2 01 06	Obat-obatan	269,525,000.00	59,749,505.00	22.17	123,079,968.00	45.67	202,577,933.00	75.16	305,597,898.00	113.38
07 01 03	Bapelkes	1,840,000.00	495,000.00	26.90	1,071,000.00	58.21	1,602,000.00	87.07	1,989,000.00	108.10
07 02 00	RS. Grhasia.	267,685,000.00	59,254,505.00	22.14	122,008,968.00	45.58	200,975,933.00	75.08	303,608,898.00	113.42
07 02 00	In Pasien	73,680,000.00	17,283,550.00	23.46	35,774,630.00	48.55	56,289,419.00	76.40	67,070,545.00	91.03
07 02 00	Out Pasien	194,005,000.00	41,970,955.00	21.63	85,272,090.00	43.95	130,630,980.00	67.33	174,643,685.00	90.02
07 02 00	Out Pasien (GAKIN)	16,000,000.00	0.00	0.00	962,248.00	5.73	14,055,534.00	0.00	51,889,668.00	0.00
1 00 00 00 1 2 01 08	Laboratorium	425,178,500.00	100,916,585.00	23.74	213,467,445.00	50.21	330,127,120.00	77.64	504,762,175.00	118.72
07 01 01	Laboratorium BP - 4	31,500,000.00	6,471,000.00	20.54	16,614,000.00	52.74	28,407,500.00	90.18	39,147,000.00	124.28
	Darah Rutin	6,000,000.00	1,286,000.00	21.43	3,124,000.00	52.07	4,932,000.00	82.20	6,428,000.00	107.13
	BTA	19,800,000.00	4,726,000.00	23.87	9,854,000.00	49.77	15,214,000.00	76.84	20,290,000.00	102.47
	Urine	400,000.00	75,000.00	18.75	360,000.00	90.00	672,500.00	168.13	805,000.00	201.25
	Biakan	200,000.00	96,000.00	48.00	240,000.00	120.00	360,000.00	180.00	576,000.00	288.00
	Faal Hati	600,000.00	144,000.00	24.00	696,000.00	116.00	1,632,000.00	272.00	2,460,000.00	410.00
	Faal Ginjal	500,000.00	0.00	0.00	565,000.00	113.00	1,630,000.00	326.00	2,525,000.00	505.00
	Gula Darah	3,000,000.00	120,000.00	4.00	1,254,000.00	41.80	2,718,000.00	90.60	4,056,000.00	135.20
	Kolesterol	1,000,000.00	0.00	0.00	325,000.00	32.50	840,000.00	84.00	1,290,000.00	129.00
	Resistensi	0.00	24,000.00	0	40,000.00	0.00	64,000.00	0.00	96,000.00	0.00
	Fisoterapi									
	Creatinin									
	URIUM									
	Laboratorium		0.00		0.00		0.00		60,000.00	0.00

Lanjutan Lampiran 5

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2005	S/D TW I	%	S/D TW II	%	S/D TW III	%	S/D TW IV	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
	Asam Urat	0.00	0.00		156,000.00		285,000.00	0.00	561,000.00	0.00
	cultur test	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 01 02	Balai Laboratorium Kesehatan	370,000,000.00	85,070,910.00	22.99	180,198,810.00	48.70	272,530,570.00	73.66	426,190,710.00	115.19
	Mikrobiologi	50,000,000.00	11,574,600.00	23.15	23,749,800.00	47.50	38,629,400.00	77.26	83,679,680.00	167.36
	Kimia Kesehatan	70,000,000.00	14,583,610.00	20.83	29,304,410.00	41.86	50,139,770.00	71.63	106,120,130.00	151.60
	Patologi	220,000,000.00	49,758,700.00	22.62	110,401,600.00	50.18	162,685,000.00	73.95	211,698,500.00	96.23
	Imunologi	30,000,000.00	9,154,000.00	30.51	16,743,000.00	55.81	21,076,400.00	70.25	24,692,400.00	82.31
07 01 03	Bapelkes	180,000.00	165,000.00	91.67	357,000.00	198.33	534,000.00	296.67	663,000.00	368.33
07 02 00	RS Ghrasia.	23,498,500.00	9,209,675.00	39.19	16,297,635.00	69.36	29,046,345.00	123.61	38,761,465.00	164.95
1 07 01 01 1 2 01 09	Radiologi/Rongent	280,368,400.00	71,543,000.00	25.52	142,679,000.00	50.89	224,697,000.00	80.14	296,101,000.00	105.61
	BP-4	280,000,000.00	71,204,000.00	25.43	141,764,000.00	50.63	223,188,000.00	79.71	293,944,000.00	104.98
	RS Ghrasia.	368,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	USG BP-4		339,000.00		915,000.00		1,509,000.00	0.00	2,157,000.00	0.00
1 00 00 00 1 2 01 10	Ambulance	650,000.00	560,000.00	86.15	715,000.00	110.00	1,165,000.00	179.23	1,265,000.00	194.62
07 02 00	RS Ghrasia.	100,000.00	410,000.00	410.00	465,000.00	465.00	865,000.00	865.00	865,000.00	865.00
	Ambulance	550,000.00	150,000.00	27.27	250,000.00	45.45	300,000.00	54.55	400,000.00	72.73
1 07 02 00 1 2 01 11	Diklat	1,100,000.00	3,272,500.00	297.50	4,909,000.00	446.27	6,456,000.00	586.91	6,801,000.00	618.27
	RS Ghrasia.									
	S-1	100,000.00	713,500.00	713.50	763,000.00	763.00	1,020,000.00	1020.00	1,365,000.00	1365.00
	D-3	1,000,000.00	2,559,000.00	255.90	4,146,000.00	414.60	5,436,000.00	543.60	5,436,000.00	543.60
1 07 01 01 1 1 01 12	Jasa konsultasi medik	2,400,000.00	969,000.00	40.38	2,034,000.00		3,669,000.00	152.88	5,151,000.00	214.63
	BP-4									
1 07 01 03 1 2 01 13	Persalinan	6,500,000.00	1,650,000.00	25.38	3,570,000.00	54.92	5,340,000.00	82.15	6,630,000.00	102.00
	Persalinan Bapelkes.						0.00	0.00	0.00	0.00
	Normal (kali)	6,000,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00
	Patologi (kali)	500,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00
1 07 02 00 1 2 01 14	Kunjungan Poliklinik	55,600,400.00	12,585,000.00	22.63	25,174,500.00	45.28	52,961,500.00	95.25	100,911,000.00	181.49
	RS Ghrasia.								0.00	0.00
	Poliklinik jiwa dan umum	47,640,000.00							0.00	0.00
	Poliklinik gigi	7,960,400.00								
1 07 02 00 1 2 01 15	Pengganti Dipam/Status	8,280,000.00	761,500.00	9.20	1,531,000.00	18.49	3,220,500.00	38.89	4,026,000.00	48.62
	RS Ghrasia.									
1 07 02 00 1 2 01 16	Perawatan Pasien.	791,640,000.00	100,266,500.00	12.67	242,182,500.00	30.59	676,068,500.00	85.40	1,238,310,500.00	156.42
	RS Ghrasia.									
	VIP	7,200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Klas I	63,000,000.00	23,250,000.00	36.90	53,600,000.00	85.08	66,250,000.00	105.16	74,300,000.00	117.94
	Klas II	116,640,000.00	30,802,000.00	26.41	66,760,000.00	57.24	113,416,000.00	97.24	151,972,000.00	130.29
	Klas III	138,600,000.00	46,214,500.00	33.34	92,282,500.00	66.58	133,602,500.00	96.39	152,830,500.00	110.27
	Klas III (GAKIN)	466,200,000.00	0.00	0.00	29,540,000.00	6.34	362,800,000.00	77.82	859,208,000.00	184.30

Lanjutan Lampiran 5

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2005	S/D TW I	%	S/D TW II	%	S/D TW III	%	S/D TW IV	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1 00 00 00 1 2 02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2,268,010,820.00	140,448,365.00	648.79	427,039,995.00	18.83	938,097,115.00	41.36	1,452,551,736.00	64.05
1 00 00 00 1 2 02 01	Sewa Tanah dan Bangunan	299,153,500.00	56,042,500.00	462.45	165,906,000.00	55.46	245,906,000.00	82.20	282,806,000.00	94.54
01 04 00	Tanah Eks. Pabrik Sabut Pengasih Kulonprogo (PT Formula Land 2000 - 2005)	16,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 00	Tanah dan Bangunan eks Panti Karya Remaja Sewon (Yayasan Wira Husada (2002 - 2007)	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	100.00	33,000,000.00	100.00
01 04 00	Sbagian bangunan Eks. Diparda (bawah utara) - PNM 2004-2007	58,363,500.00	0.00	0.00	58,363,500.00	100.00	58,363,500.00	100.00	58,363,500.00	100.00
01 04 00	Sebagian bangunan Eks. Diparda (atas timur laut) - PNM 2004-2007	18,250,000.00	21,352,500.00	117.00	21,352,500.00	117.00	21,352,500.00	117.00	21,352,500.00	117.00
01 04 00	Sebagian bangunan Eks. Diparda (bawah selatan) - BPD 2002-2007	44,000,000.00	0.00	0.00	44,000,000.00	100.00	44,000,000.00	100.00	44,000,000.00	100.00
01 04 00	Sebagian bangunan Eks. Diparda (atas barat laut) - BMT 2004-2007	16,600,000.00	16,600,000.00	100.00	16,600,000.00	100.00	16,600,000.00	100.00	16,600,000.00	100.00
01 04 00	Tanah milik Femda. di Sentolo. - PT Amarta Karya 2003-2008	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	7,500,000.00	100.00	15,000,000.00	200.00	15,000,000.00	200.00
01 04 00	Tanah dan Bangunan Eks Dinas Perindust. Malangan (Yayasan Angga Binangun 2002-2007)	18,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150,000.00	100.00
01 04 00	Eks Rumah Dinas AM Sangaji No.45 (Yayasan Wira Husada 2002-2007)	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	100.00	25,000,000.00	100.00
01 02 00	Tanah Sri Mulya Piyungan - Pemda Bantul (Ro Umum)	6,840,000.00	6,840,000.00	100.00	6,840,000.00	100.00	6,840,000.00	100.00	6,840,000.00	100.00
05 01 01	LIK Maguwoharjo - PT ASA 2005-2007	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 00	Eks Rumah Dinas Jl. Podang 4 Depok (Yayasan Pelayaran Masyarakat 2005-2006)	8,250,000.00	3,750,000.00	45.45	8,750,000.00	106.06	16,250,000.00	196.97	20,000,000.00	242.42
01 04 00	Gudang Pangan Jl Abu Bakar Ali - PT Dharma Niaga 1999-2009	14,400,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	17.36	2,500,000.00	17.36	16,500,000.00	114.58
01 04 00	Eks Rumah Dinas Jl Munggur Gondokusuman (Akuntan Publik Drs.Kumala Hadi 2004-2009)	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	100.00	7,000,000.00	100.00
	Bekas OG No.16 - Desa Sumbermulyo Bambanglipuro BT		500,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1 01 04 00 1 2 02 04	Sewa Rumah Dinas	4,884,320.00	626,160.00	12.82	3,620,920.00	74.13	4,389,780.00	89.87	15,900,180.00	325.54
	Eks. Kanwil DEPKES	340,320.00	92,400.00	27.15	135,600.00	39.84	164,400.00	48.31	1,027,200.00	301.83
	Eks. Kanwil DEPARPOSTEL	1,248,000.00	0.00	0.00	490,000.00	39.26	490,000.00	39.26	749,000.00	60.02
	Dinas Perindustrian	420,000.00	91,800.00	21.86	321,600.00	76.57	657,000.00	156.43	753,000.00	179.29
	BP2BPT.- Dinas Pertanian	600,000.00	131,760.00	21.96	263,520.00	43.92	373,680.00	62.28	718,580.00	119.76
	Dinas Nakertrans.	1,130,400.00	293,400.00	25.96	801,000.00	70.86	1,073,100.00	94.93	1,523,700.00	134.79
	Dinas Perhubungan.	89,600.00	16,800.00	18.75	67,200.00	75.00	82,600.00	100.00	281,200.00	313.84
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1,056,000.00	0.00	0.00	1,542,000.00	146.02	1,542,000.00	146.02	2,075,000.00	224.91
	Lain - lain / Denda dan sewa rumah jl Kusuma negaran								782,800.00	0.00
1 00 00 00 1 2 02 06	Sewa Gedung/Ruangan/Aula dan Asrama	1,807,623,000.00	30,525,500.00	1.69	170,185,000.00	9.41	561,070,500.00	31.24	977,815,446.00	54.09
01 02 00	Gedung Wana Bhakti Jasa	69,600,000.00	13,175,000.00	18.93	32,855,000.00	47.21	61,720,000.00	88.68	75,260,000.00	108.13
01 04 00	Gedung JEC	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,822,446.00	17.48
01 04 00	Penitipan KBM Basement Malioboro Mall	255,000,000.00	0.00	0.00	85,000,000.00	33.33	170,000,000.00	66.67	255,000,000.00	100.00
01 04 00	Kompensasi atas pemanfaatan sebagian tempat penitipan KBM Basement Malioboro Mall	365,373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	68.42	365,373,000.00	100.00
01 04 01	Fotocopy KPPD Kota	3,250,000.00	900,000.00	27.69	1,800,000.00	55.38	2,700,000.00	83.08	3,600,000.00	110.77
01 04 02	Fotocopy KPPD Bantul.	2,300,000.00	1,150,000.00	50.00	1,150,000.00	50.00	2,300,000.00	100.00	2,300,000.00	100.00
01 04 03	Fotocopy KPPD Kulonprogo.	1,250,000.00	0.00	0.00	750,000.00	60.00	750,000.00	60.00	1,250,000.00	100.00
01 04 05	Fotocopy KPPD Sleman.	3,600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	33.33	3,600,000.00	100.00	3,600,000.00	100.00
02 01 05	Balai Pelatihan dan Pengembangan Bioteknologi Pertanian Terapan (BP2BPT)	12,500,000.00	800,500.00	6.40	2,955,000.00	23.64	6,700,500.00	53.60	9,060,000.00	72.48

Lanjutan Lampiran 5

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2005	S/D TW I	%	S/D TW II	%	S/D TW III	%	S/D TW IV	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1 07 02 00 1 2 01 17	Penunjang Diagnostik RS Ghrasia. EEG	252,000.00	18,000.00	7.14	18,000.00	7.14	72,000.00	28.57	90,500.00	35.91
		252,000.00	18,000.00	7.14	18,000.00	7.14	72,000.00	28.57	90,500.00	35.91
1 07 02 00 1 2 01 18	Tindakan Medik dan Therapy RS Ghrasia.	4,270,900.00	6,352,600.00	148.74	15,258,135.00	357.26	26,595,215.00	622.71	34,964,635.00	818.57
1 07 02 00 1 2 01 19	Rehabilitasi Medik RS Ghrasia.	1,291,000.00	1,660,500.00	128.62	3,625,500.00	280.83	5,162,500.00	399.88	6,197,500.00	480.05
1 07 02 00 1 2 01 20	Perawatan Jenazah. RS Ghrasia.	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 07 02 00 1 2 01 21	Work Therapy RS Ghrasia.	3,000,000.00	0.00	0.00	202,500.00	6.75	1,855,000.00	61.83	3,063,500.00	102.12
1 07 01 03 1 2 01 22	Perawatan. Bapelkes	5,620,000.00	2,640,000.00	46.98	5,712,000.00	101.64	8,544,000.00	152.03	10,608,000.00	188.75
1 07 02 00 1 2 01 23	Kunjungan UGD. RS Ghrasia.	4,400,000.00	1,972,000.00	44.82	4,555,000.00	103.52	6,822,500.00	155.06	8,175,000.00	185.80
	Non Jiwa	500,000.00	0.00		45,500.00	9.10	65,500.00	13.10	142,000.00	28.40
	Jiwa	3,900,000.00	1,972,000.00	50.56	4,509,500.00	115.63	6,757,000.00	173.26	8,033,000.00	205.97
1 07 01 03 1 2 01 24	ANC Bapelkes.	300,000.00	27,000.00	9.00	48,000.00	16.00	63,000.00	21.00	72,000.00	24.00
1 07 01 03 1 2 01 25	Post Partum Bapelkes.	690,000.00	69,000.00	10.00	111,000.00	16.09	159,000.00	23.04	168,000.00	24.35
1 07 01 03 1 2 01 26	KB Bapelkes.	237,000.00	39,000.00	16.46	96,000.00	40.51	153,000.00	64.56	189,000.00	79.75
1 07 00 00 1 2 01 27	ECG/EKG	4,950,000.00	1,654,000.00	47.56	3,495,500.00	106.78	5,849,000.00	195.78	7,774,900.00	157.07
01 01	BP-4	4,500,000.00	1,600,000.00	35.56	3,350,000.00	74.44	5,520,000.00	122.67	6,960,000.00	154.57
02 00	RS Ghrasia.	450,000.00	54,000.00	12.00	145,500.00	32.33	329,000.00	73.11	814,900.00	181.09
1 07 01 01 1 2 01 28	Nebulizer	100,000.00	240,000.00	13.33	725,000.00	725.00	1,285,000.00	1285.00	1,090,000.00	1990.00
1 07 01 01 1 2 01 29	Faal Paru-Paru BP-4	675,000.00	72,000.00	10.67	765,000.00	113.33	999,000.00	148.00	1,062,000.00	157.33
							0.00	0.00		
1 07 01 01 1 2 01 30	Mantoux test	700,000.00	654,000.00	93.43	1,414,000.00	202.00	1,962,000.00	280.29	2,752,000.00	393.14

Lanjutan Lampiran 5

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2005	S/D TW I	%	S/D TW II	%	S/D TW III	%	S/D TW IV	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
08 02 01	Gedung Ndalem Condokiranan.	10,000,000.00	1,300,000.00	13.00	2,625,000.00	26.25	7,000,000.00	70.00	10,650,000.00	106.50
08 02 02	Gedung Pertunjukan Taman Budaya Sriwedani	70,500,000.00	8,950,000.00	30.16	35,100,000.00	49.79	47,050,000.00	66.74	62,650,000.00	88.87
	Gedung Societet	11,500,000.00	1,950,000.00	16.96	8,100,000.00	70.43	10,550,000.00	91.74	13,650,000.00	118.70
	Gedung Konser (Concert Hall)	53,000,000.00	7,000,000.00	13.21	23,500,000.00	44.34	33,000,000.00	62.26	44,000,000.00	83.02
08 02 02	Gedung Pameran Sriwedani	6,000,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	58.33	3,500,000.00	58.33	5,000,000.00	83.33
10 01 00	Tempat untuk Counter TIC	4,250,000.00	4,250,000.00	100.00	4,250,000.00	100.00	4,250,000.00	100.00	4,250,000.00	100.00
10 01 00	Ruang untuk Wartel TIC	10,000,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	25.00	5,000,000.00	50.00	10,000,000.00	100.00
1 00 00 00 1 2 02 09	Sewa Lahan (tanah, tambak dan sejenisnya)	39,350,000.00	8,572,755.00	21.79	17,073,125.00	43.39	23,263,135.00	59.12	42,296,310.00	107.49
01 04 01	Tempat penitipan KBM KPPD Kota Yogyakarta	4,500,000.00	1,200,000.00	26.67	2,400,000.00	53.33	3,600,000.00	80.00	4,400,000.00	97.78
01 04 02	Tempat penitipan KBM KPPD Bantul.	3,100,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	50.00	1,550,000.00	50.00	3,100,000.00	100.00
01 04 03	Tempat penitipan KBM KPPD Kulun Progo.	2,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	60.00	1,500,000.00	60.00	1,500,000.00	60.00
01 04 04	Tempat penitipan KBM KPPD Gunung Kidul	1,250,000.00	0.00	0.00	300,000.00	24.00	600,000.00	48.00	1,250,000.00	100.00
01 04 05	Tempat penitipan KBM KPPD Sleman	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	6,000,000.00	100.00	6,000,000.00	100.00	6,000,000.00	100.00
03 01 01	Pusat Informasi Perikanan Wonocatur.	6,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	33.33		75.00		187.50
03 01 01	Sewa pasar ikan di BAT Cangkringan.	1,500,000.00	0.00	0.00	550,000.00	36.67	1,100,000.00	73.33	1,650,000.00	110.00
10 01 00	Tempat Parkir Candi Ratu Boko	4,500,000.00	1,372,755.00	30.51	2,773,125.00	61.63	4,413,135.00	98.07	6,146,310.00	136.58
03 01 01	Sawah Tambak Congot	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	70.00
1 00 00 00 1 2 02 11	Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	35,000,000.00	8,225,000.00	23.50	17,025,000.00	48.64	28,705,000.00	82.01	40,700,000.00	116.29
11 01 00	Sewa Villa Kaliurang.	25,000,000.00	6,475,000.00	25.90	13,675,000.00	54.70	22,830,000.00	91.32	30,575,000.00	122.30
04 01 00	Wisma Erlangga Kaliurang	10,000,000.00	1,750,000.00	17.50	3,350,000.00	33.50	5,875,000.00	58.75	10,125,000.00	101.25
1 00 00 00 1 2 02 12	Tempat Rekreasi	62,000,000.00	16,456,450.00	26.54	33,229,950.00	53.60	54,762,700.00	88.33	73,033,800.00	117.80
04 01 00	Hutan Wisata Kaliurang	45,000,000.00	11,927,200.00	26.50	25,007,200.00	55.57	39,223,200.00	87.16	51,200,800.00	113.78
08 02 01	Tiket masuk Museum Sonobudoyo.	6,500,000.00	2,009,250.00	30.91	4,478,750.00	68.90	7,595,500.00	116.85	9,653,000.00	148.51
08 02 01	Tiket masuk Pergelaran Wayang Durasi Singkat	10,500,000.00	2,520,000.00	24.00	3,744,000.00	35.66	7,944,000.00	75.66	12,180,000.00	116.00
1 12 01 00 1 2 02 19	Sewa tempat dan alat uji kendaraan bermotor.	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	20,000,000.00	100.00	20,000,000.00	100.00	20,000,000.00	100.00
1 01 04 00 1 2 05	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Peroknan	575,000,000.00	0.00	0.00	121,241,550.00	23.09	176,585,775.00	33.64	285,438,350.00	54.37
1 01 04 00 1 2 05 01	Tempat Pelelangan Hasil Hutan	525,000,000.00	0.00	0.00	121,241,550.00	23.09	176,585,775.00	33.64	285,438,550.00	54.37
1 00 00 00 1 2 06	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	4,331,621,250.00	234,378,900.00	5.41	410,055,100.00	9.47	1,475,063,010.00	34.05	4,113,201,385.00	94.96
1 00 00 00 1 2 06 01	Penjualan Ternak/Daging/Susu	122,605,000.00	59,004,950.00	48.13	83,427,100.00	68.05	106,656,900.00	86.99	132,453,000.00	108.03
	Penjualan Pedet :									
02 01 06	Balai Pengembangan Mutu Bibit dan Pakan Ternak.	15,000,000.00	0.00	0.00	6,050,000.00	40.33	11,050,000.00	73.67	17,950,000.00	119.67
02 01 07	Balai Diagnostik Kehewan.	5,000,000.00	1,000,000.00	20.00	3,000,000.00	60.00	4,000,000.00	80.00	5,000,000.00	100.00
	Penjualan Sapi Potong :									
02 01 07	Balai Diagnostik Kehewan.	37,375,000.00	40,916,000.00	109.47	40,916,000.00	109.47	40,916,000.00	109.47	40,916,000.00	109.47
	Penjualan Kambing Afkir:									
02 01 07	Balai Diagnostik Kehewan.	5,950,000.00	2,800,000.00	47.06	3,500,000.00	58.82	4,550,000.00	76.47	6,070,000.00	102.02
	Penjualan Susu :									
02 01 06	Balai Pengembangan Mutu Bibit dan Pakan Ternak	42,900,000.00	10,258,950.00	23.91	21,251,100.00	49.54	32,295,900.00	75.28	43,212,000.00	100.73
02 01 07	Balai Diagnostik Kehewan.	16,380,000.00	4,030,000.00	24.60	8,710,000.00	53.17	13,845,000.00	84.52	19,305,000.00	117.85

Lanjutan Lampiran 5

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2005	S/D TW I	%	S/D TW II	%	S/D TW III	%	S/D TW IV	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1 00 00 00 1 2 09	Retribusi Jasa Umum	551,347,138.00	100,647,760.00	18.25	202,107,275.00	36.66	431,024,340.00	78.18	606,243,640.00	109.96
1 00 00 00 1 2 09 01	Jasa Sertifikasi Benih.	8,740,000.00	7,670,160.00	87.76	8,720,275.00	99.77	10,463,490.00	119.72	15,091,225.00	172.67
02 01 01	Sertifikasi Benih BPSBTPH.	7,000,000.00	2,375,515.00	33.94	3,425,630.00	48.94	4,178,645.00	59.69	7,589,860.00	108.43
04 01 03	Sertifikasi Benih BPPMBPTKP. Sertifikasi benih pembibitan tebu	1,740,000.00	5,294,645.00	304.29	5,294,645.00	304.29	6,284,845.00	361.20	7,501,365.00	431.17
1 11 01 03 1 2 09 02	Pengujian mutu konstruksi.	50,000,000.00	7,404,500.00	14.81	13,472,000.00	26.94	38,072,500.00	76.15	51,699,350.00	103.40
	Pengujian mutu air.	10,000,000.00	1,306,000.00	13.06	5,299,000.00	52.99	9,083,500.00	90.84	10,584,500.00	105.85
	Pengujian mekanika tanah dan batuan.	10,000,000.00	3,020,000.00	30.20	3,356,000.00	33.56	7,156,500.00	71.57	10,426,000.00	104.25
	Pengujian bahan bangunan.	30,000,000.00	3,078,500.00	10.26	4,817,000.00	16.06	21,832,500.00	72.78	30,688,850.00	102.30
1 05 01 03 1 2 09 03	Jasa tera.	97,500,000.00	24,565,100.00	49.96	53,557,750.00	54.93	78,099,350.00	80.10	100,793,950.00	103.58
	- Jasa Tera	57,749,000.00	15,093,700.00	26.14	29,467,250.00	51.03	41,046,850.00	71.08	53,422,000.00	92.57
	- Jasa Tera, Ulang	39,751,000.00	9,471,400.00	23.83	24,090,500.00	60.60	37,052,500.00	93.21	47,371,950.00	119.17
1 06 01 02 1 2 09 04	Jasa Pelatihan dan Pelayanan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja	92,947,500.00	1,500,000.00	3.20	15,065,000.00	32.09	52,585,000.00	56.57	99,452,500.00	107.00
	Pelayanan lingkungan, kesehatan keselamatan kerja.	46,947,500.00	1,500,000.00	3.20	15,065,000.00	32.09	25,585,000.00	54.50	46,952,500.00	100.00
	Pelatihan Hiperkes dan keselamatan kerja.	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	58.70	52,500,000.00	114.17
1 00 00 00 1 2 09 05	Jasa Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan	202,212,138.00	33,185,000.00	16.41	64,685,500.00	31.99	155,338,750.00	76.82	209,911,365.00	103.87
06 01 01	Balai Latihan Kerja	59,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,478,000.00	68.47	60,606,000.00	102.57
	Pelatihan Otomotif.	23,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,016,000.00	72.09	22,200,000.00	94.07
	Pelatihan teknik mekanik.	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,704,000.00	116.39	11,696,000.00	203.05
	Pelatihan Listrik.	8,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304,000.00	27.69	4,704,000.00	56.54
	Pelatihan Elektro.	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	55.40	1,950,000.00	55.40
	Pelatihan aneka kejuruan	11,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,064,000.00	69.91	12,096,000.00	105.00
	Pelatihan. Niaga.	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440,000.00	69.38	7,960,000.00	124.38
08 01 01	Balai Latihan Pendidikan Teknik	56,577,138.00	4,000,000.00	23.02	14,774,000.00	128.56	35,499,000.00	62.74	48,927,400.00	86.42
	Jasa Pelatihan Ketrampilan	17,373,338.00	4,000,000.00	23.02	7,000,000.00	40.29	17,925,000.00	103.18	19,793,700.00	113.50
	Sewa Forklift	5,796,000.00	0.00	0.00	1,449,000.00	25.00	3,949,000.00	68.13	5,074,000.00	87.54
	AHASS	6,982,800.00	0.00	0.00	2,500,000.00	35.80	4,500,000.00	64.44	5,982,800.00	100.00
	Rally-BLPT Auto Service	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151,900.00	25.21
	Sewa asrama	13,925,000.00	0.00	0.00	3,825,000.00	27.47	9,125,000.00	65.53	13,925,000.00	100.00
08 01 04	Balai Pengembangan Pemuda dan Olah Raga.	72,565,000.00	29,185,000.00	40.22	49,911,500.00	68.78	70,233,750.00	96.79	82,679,965.00	113.50
	Youth Center	18,800,000.00	5,960,000.00	31.70	11,539,500.00	61.38	12,739,500.00	67.76	22,655,715.00	120.50
	Gelanggang Pemuda	1,250,000.00	210,000.00	16.80	840,000.00	67.20	1,470,000.00	117.60	2,100,000.00	168.00
	Pondok Pemuda Ambarbinangun	2,115,000.00	465,000.00	21.99	1,032,000.00	48.79	4,860,250.00	229.80	4,860,250.00	229.80
	Gedung Olah Raga Amongrogo	50,400,000.00	22,550,000.00	44.74	36,500,000.00	72.42	51,164,000.00	101.52	53,064,000.00	105.27

Lanjutan Lampiran 5

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2005	S/D TW I	%	S/D TW II	%	S/D TW III	%	S/D TW IV	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
08 01 02	Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB)	9,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,278,000.00	45.27	9,998,000.00	105.80
08 01 05	SLB Pembina Yogyakarta.	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850,000.00	107.78	7,700,000.00	171.11
1 00 00 00 1 2 09 06	Jasa Pelatihan dan Pengukuran Produktivitas Kerja	14,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275,000.00	66.16	14,635,000.00	104.39
06 01 04	Balai Pengembangan Produktivitas Kerja.									
	Jasa penyuluhan produktivitas.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
	Jasa pengukuran.	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520,000.00	60.00	4,200,000.00	100.00
	Jasapelatihan	3,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325,000.00	116.58	4,325,000.00	116.58
	Jasa penerapan IPI.	3,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	50.00	3,360,000.00	100.00
	Jasa penjurian GKM.	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	60.00	1,250,000.00	100.00
	Tes bakat kewirausahaan.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1 00 00 00 1 2 09 07	Jasa Pelayanan Kesejahteraan Buruh dan Karyawan	23,916,000.00	5,944,000.00	24.85	11,111,000.00	46.46	22,198,000.00	92.82	28,062,000.00	117.34
06 01 00	Balai Istirahat Karyawan (BIK)	14,700,000.00	3,210,000.00	21.84	6,185,000.00	42.07	13,834,000.00	94.11	17,734,000.00	120.64
06 01 00	Balai Istirahat Pegawai (BIP)	5,700,000.00	1,800,000.00	31.58	2,970,000.00	52.11	5,405,000.00	94.82	6,470,000.00	113.51
06 01 00	Asrama Buruh Ledok Code	3,516,000.00	934,000.00	26.56	1,956,000.00	55.63	2,959,000.00	84.16	3,858,000.00	109.73
1 00 00 00 1 2 09 08	Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Penyakit Hewan	5,199,000.00	25,500.00	1.02	1,632,500.00	65.33	6,201,500.00	119.28	6,201,500.00	119.28
01 01	Pengujian ikan di Balai Pengembangan Teknologi Perikanan dan Kelautan	2,499,000.00	25,500.00	1.02	1,632,500.00	65.33	3,501,500.00	140.12	3,501,500.00	140.12
01 07	Pengujian anak ayam di Balai Diagnostik Kehewan	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	100.00	2,700,000.00	100.00
1 00 00 00 1 2 09 09	Jasa Pelayanan Sosial	8,100,000.00	2,700,000.00	66.67	4,725,000.00	116.67	6,075,000.00	150.00	8,100,000.00	100.00
09 01 06	Asrama Panti Asuhan Tresno Werdho.	8,100,000.00	2,700,000.00	66.67	4,725,000.00	116.67	6,075,000.00	150.00	8,100,000.00	100.00
	Unit Abiyoso, Pakem Sleman	4,500,000.00	1,500,000.00	33.33	2,625,000.00	58.33	3,375,000.00	75.00	4,500,000.00	100.00
	Unit Budi Luhur, Kasongan, Bantul	3,600,000.00	1,200,000.00	33.33	2,100,000.00	58.33	2,700,000.00	75.00	3,600,000.00	100.00
1 07 01 03 1 2 09 10	Jasa Pelatihan Kesehatan Masyarakat	46,712,500.00	17,653,500.00	36.28	29,138,250.00	59.82	52,715,750.00	108.22	72,296,750.00	148.42
	Bapelkes									
	Jasa Latihan Kesehatar. Masyarakat	57,500.00	0.00	0.00	408,750.00	815.22	468,750.00	815.22	468,750.00	815.22
	Jasa Pelayanan Pelatihan	48,655,000.00	17,653,500.00	36.28	28,669,500.00	58.92	52,247,000.00	107.38	71,826,000.00	147.63
1 00 00 00 1 3	HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN.	12,358,409,005.00	0.00	0.00	10,681,693,916.00	86.43	10,919,222,195.00	88.35	11,859,586,426.00	95.96
1 01 04 00 1 3 01	Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah	1,862,589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,364,231.00	50.49
1 01 04 00 1 3 01 01	PD. Anindya	423,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,356,900.00	82.83
1 01 04 00 1 3 01 02	PD. Taru Martani	1,439,589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,007,331.00	40.98
1 01 04 00 1 3 02	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	10,000,000,000.00	0.00	0.00	10,431,304,407.00	104.31	10,431,304,407.00	104.31	10,431,304,407.00	104.31
1 01 04 00 1 3 02 01	Bank Pembangunan Daerah	10,000,000,000.00	0.00	0.00	10,431,304,407.00	104.31	10,431,304,407.00	104.31	10,431,304,407.00	104.31
	Deviden.	7,500,000,000.00	0.00	0.00	7,823,478,305.00	104.31	7,823,478,305.00	104.31	7,823,478,305.00	104.31
	Dana Pembangunan.	2,500,000,000.00	0.00	0.00	2,607,826,102.00	104.31	2,607,826,102.00	104.31	2,607,826,102.00	104.31
1 01 04 00 1 3 03	Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank	315,820,005.00	0.00	0.00	250,389,509.00	79.28	307,917,788.00	97.50	307,917,788.00	97.50
1 01 04 00 1 3 03 01	Badan Usaha Kredit Pedesaan	315,820,005.00	0.00	0.00	250,389,509.00	79.28	307,917,788.00	97.50	307,917,788.00	97.50

Lanjutan Lampiran 5

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2005	S/D TW I	%	S/D TW II	%	S/D TW III	%	S/D TW IV	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1 00 00 00 1 2 06 02	Hasil Penjualan Benih/Bibit	494,810,000.00	114,008,350.00	23.04	199,494,650.00	40.32	314,944,850.00	63.65	502,017,150.00	101.46
02 01 02	Bibit Padi Wijilan Kulonprogo	71,550,000.00	28,090,000.00	39.26	41,731,000.00	58.32	55,353,000.00	77.36	85,962,100.00	120.14
02 01 02	Bibit Padi Wonocatur Bantul	23,625,000.00	6,823,200.00	28.88	21,301,200.00	90.16	21,301,200.00	90.16	28,529,700.00	120.76
02 01 02	Bibit Padi Gesikan Bantul	21,600,000.00	9,192,400.00	42.56	20,918,400.00	96.84	20,918,400.00	96.84	25,845,900.00	119.66
02 01 02	Bibit Palawija Panggang	3,455,000.00	650,000.00	18.81	1,050,000.00	30.39	3,455,000.00	100.00	3,455,000.00	100.00
02 01 02	Bibit Palawija Gading	21,000,000.00	3,035,200.00	14.45	4,984,200.00	23.73	16,954,400.00	80.74	22,053,800.00	105.02
02 01 02	Bibit Hortikultura Ngipiksari	26,750,000.00	22,932,750.00	85.73	25,121,750.00	93.91	28,629,250.00	107.03	32,928,250.00	123.10
02 01 02	Bibit Hortikultura Wonocatur	8,255,000.00	2,653,000.00	32.14	4,761,500.00	57.68	6,876,500.00	83.30	8,336,500.00	100.99
02 01 02	Bibit Hortikultura Tambak	9,650,000.00	1,867,800.00	19.36	2,666,000.00	27.63	3,365,500.00	34.98	9,700,000.00	100.52
02 01 02	Bibit Padi LPUT Wijilan	61,425,000.00	26,564,000.00	43.25	41,855,600.00	68.14	61,436,600.00	100.02	73,710,900.00	120.00
04 01 01	Bibit/Persemanian Jati BP3KP	47,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,560,000.00	100.13
04 01 01	Bibit Jati	37,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,560,000.00	100.16
04 01 01	Bibit kelapa, lada, panili	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
02 01 06	Semen Mani Beku BPMBPT.	200,000,000.00	12,200,000.00	6.10	35,105,000.00	17.55	96,655,000.00	48.33	163,935,000.00	81.97
1 03 01 01 1 2 06 03	Hasil Penjualan Calon Induk Ikan	330,000,000.00	61,135,600.00	18.53	126,603,350.00	38.36	201,871,260.00	61.17	311,960,635.00	94.53
03 01 01	BAT Cangkringan.	160,000,000.00	18,764,500.00	11.73	35,449,250.00	22.16	70,390,460.00	43.99	135,554,335.00	84.72
03 01 01	BAT Wonocatur.	15,000,000.00	4,114,100.00	27.43	6,227,100.00	41.51	10,851,300.00	72.34	15,205,300.00	101.37
03 01 01	BAT Bejiharjo	10,000,000.00	1,732,000.00	17.32	3,708,000.00	37.08	6,048,000.00	60.48	10,298,000.00	102.98
03 01 01	BAT Sendangsari.	30,000,000.00	5,050,000.00	16.83	15,415,000.00	51.38	24,455,000.00	81.52	30,305,000.00	101.02
03 01 01	BAP Samas	95,000,000.00	31,475,000.00	33.13	57,064,000.00	60.07	76,901,500.00	80.95	100,001,500.00	105.26
03 01 01	BAL Sundak.	20,000,000.00	0.00	0.00	8,740,000.00	43.70	13,225,000.00	66.13	20,596,500.00	102.98
1 00 00 00 1 2 06 04	Penjualan Hasil Kebun dan Hutan	3,384,206,250.00	230,000.00	41.00	530,000.00	94.33	851,590,000.00	193.68	3,166,770,600.00	93.57
04 01 01	Hasil Kebun Tambak.	600,000.00	150,000.00	25.00	350,000.00	58.33	475,000.00	79.17	640,000.00	106.67
04 01 01	Hasil Kebun Wonocatur	500,000.00	80,000.00	16.00	180,000.00	36.00	180,000.00	36.00	500,000.00	100.00
04 01 01	Hasil Kebun Ngipiksari	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	50.00	750,000.00	100.00
04 01 02	Minyak Kayu Putih	3,382,356,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,560,000.00	28.52	3,164,880,600.00	93.57
	Lelang.	2,982,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,560,000.00	28.52	3,164,880,600.00	106.11
	Koperasi	399,831,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,391,000.00	4.10
1 12 01 00 1 2 07	Retribusi Ijin Trayek	167,199,000.00	33,461,030.00	20.01	62,293,530.00	37.26	97,041,610.00	58.04	199,454,110.00	119.29
1 12 01 00 1 2 07 02	Ijin Trayek	167,199,000.00	33,461,030.00	20.01	62,293,530.00	37.26	97,041,610.00	58.04	199,454,110.00	119.29
1 12 01 01 1 2 08	Retribusi Dispensasi Kelebihan Muatan	2,177,000,000.00	543,494,000.00	24.97	1,240,637,000.00	56.99	1,959,503,000.00	90.01	2,582,594,000.00	118.63
1 12 01 01 1 2 08 01	Kelebihan Muatan Mobil Barang 5%<D<15%	252,000,000.00	382,202,000.00	151.67	716,223,500.00	284.22	891,995,500.00	353.97	1,028,250,500.00	408.04

Lanjutan Lampiran 5

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2005	S/D TW I	%	S/D TW II	%	S/D TW III	%	S/D TW IV	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1 01 04 00 1 3 04	Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi kpd Pihak Ketiga.	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	100.00	180,000,000.00	100.00
1 01 04 00 1 3 04 01	PT YIS	180,000,000.00	0.00	0	0.00		180,000,000.00	100.00	180,000,000.00	100.00
	Bagian Keuntungan	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	100.00	180,000,000.00	100.00
1 00 00 00 1 4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	12,644,419,700.00	2,861,555,725.00	22.63	6,589,581,296.00	52.11	10,704,039,943.00	84.65	17,616,133,876.11	139.32
1 11 01 00 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tdk Dipisahkan	19,750,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	30,674,200.00	155.31
1 11 01 00 1 4 01 07	Penjualan Drum Bekas	1,750,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,200.00	124.24
1 11 01 00 1 4 01 08	Barang bekas	18,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	28,500,000.00	158.33
1 01 04 00 1 4 02	Penerimaan Jasa Giro	7,500,000,000.00	1,863,695,925.00	24.85	4,870,998,511.00	64.95	7,375,987,929.00	98.35	8,679,519,109.00	115.73
1 01 04 00 1 4 02 01	Jasa Giro Kas Daerah	7,500,000,000.00	1,863,695,925.00	24.85	4,870,998,511.00	64.95	7,375,987,929.00	98.35	8,679,519,109.00	115.73
1 01 04 00 1 4 03	Penerimaan Bunga Deposito	1,600,000,000.00	300,000,000.00	18.75	600,000,000.00	37.50	900,000,000.00	56.25	3,031,321,553.94	189.46
1 01 04 00 1 4 03 01	Rekening Deposito pada Bank BPD	1,600,000,000.00	300,000,000.00	18.75	600,000,000.00	37.50	900,000,000.00	56.25	2,024,999,996.00	126.56
	Rekening Deposito pada Bank Mandiri	0.00							1,006,321,557.94	
1 00 00 00 1 4 06	Sumbangan Pihak Ketiga	2,280,974,300.00	528,294,200.00	23.16	1,118,582,785.00	49.04	1,682,094,035.00	73.74	2,162,205,785.00	94.79
1 00 00 00 1 4 06 01	Dealer Otomotif	2,059,714,000.00	501,592,000.00	24.35	1,049,804,000.00	50.97	1,573,346,000.00	76.39	2,061,679,000.00	100.10
01 04 01	Kota Yogyakarta.	508,256,000.00	129,103,000.00	25.40	269,490,000.00	53.02	402,239,000.00	79.14	510,395,000.00	100.42
01 04 02	Kabupaten Bantul.	434,440,000.00	96,886,000.00	22.30	202,442,000.00	46.60	310,177,000.00	71.40	407,937,000.00	93.90
01 04 03	Kabupaten Kulonprogo.	117,585,000.00	28,106,000.00	23.90	58,509,000.00	49.76	89,789,000.00	76.36	119,574,000.00	101.69
01 04 04	Kabupaten Gunungkidul.	155,008,000.00	39,213,000.00	25.30	83,087,000.00	53.60	116,540,000.00	75.18	161,951,000.00	104.48
01 04 05	Kabupaten Sleman.	844,425,000.00	208,284,000.00	24.67	436,276,000.00	51.67	654,601,000.00	77.52	861,822,000.00	102.06
1 01 04 00 1 4 06 03	Main dealer	18,000,000.00	4,500,000.00	25.00	9,000,000.00	50.00	12,000,000.00	66.67	13,500,000.00	75.00
1 00 00 00 1 4 06 04	Lain-lain Pengusaha	184,000,000.00	18,008,200.00	41.54	50,947,285.00	68.06	83,533,535.00	45.40	110,329,285.00	59.96
01 04 00	Sumbangan PT Sarihusada.	9,000,000.00	2,965,000.00	32.94	3,655,000.00	41.06	5,900,000.00	65.56	8,875,000.00	98.61
09 C1 00	Sumbangan Urdian B:rhadih.	175,000,000.00	15,043,200.00	8.60	47,252,285.00	27.00	77,632,535.00	44.36	101,454,285.00	57.97
1 00 00 00 1 4 06 05	Biaya Pengganti STNK yang hilang.	19,260,000.00	4,194,000.00	21.78	8,831,500.00	45.85	13,214,500.00	68.61	18,217,500.00	94.59
01 04 01	Kota Yogyakarta.	5,955,000.00	1,204,000.00	20.22	2,833,000.00	47.57	4,421,000.00	74.24	6,030,000.00	101.26
01 04 02	Kabupaten Bantul.	5,475,000.00	1,210,000.00	22.10	2,528,000.00	46.17	3,578,000.00	65.35	4,735,000.00	86.48
01 04 03	Kabupaten Kulonprogo.	1,050,000.00	245,000.00	23.33	432,500.00	41.19	592,500.00	56.43	972,500.00	92.62
01 04 04	Kabupaten Gunungkidul.	1,925,000.00	467,000.00	24.26	978,000.00	50.81	186,000.00	9.66	1,691,000.00	87.84
01 04 05	Kabupaten Sleman.	4,855,000.00	1,068,000.00	22.00	2,060,000.00	42.43	3,322,000.00	68.42	4,789,000.00	98.64
1 01 02 00 1 4 07	Angsuran/Cicilan Rumah Dinas	3,390,000.00	847,500.00	25.00	1,492,500.00	44.03	3,193,500.00	94.20	3,979,500.00	117.39
1 01 02 00 1 4 07 01	Angsuran Rumah Dinas	3,390,000.00	847,500.00	25.00	1,492,500.00	44.03	3,193,500.00	94.20	3,979,500.00	117.39
	RR. Projo Suminto.	786,000.00	196,500.00	25.00	393,000.00	50.00	1,375,500.00	175.00	1,375,500.00	175.00
	RR. Wiryo Sucipto.	768,000.00	192,000.00	25.00	384,000.00	50.00	576,000.00	75.00	768,000.00	100.00
	RR. Prawirodigdo.	1,026,000.00	256,500.00	25.00	513,000.00	50.00	769,500.00	75.00	1,026,000.00	100.00
	NY. Sunarti Slamet H.	810,000.00	202,500.00	25.00	202,500.00	25.00	472,500.00	58.33	810,000.00	100.00

Lanjutan Lampiran 5

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2005	S/D TW I	%	S/D TW II	%	S/D TW III	%	S/D TW IV	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1 00 00 00 1 4 08	Jasa Raharja	1,009,873,200.00	144,399,600.00	70.89	385,321,200.00	38.16	646,222,800.00	63.99	1,012,932,000.00	100.30
1 00 00 00 1 4 08 01	Bantuan Administrasi dari PT Jasa Raharja	1,009,873,200.00	144,399,600.00	70.89	385,321,200.00	38.16	646,222,800.00	63.99	1,012,932,000.00	100.30
01 04 01	Kota Yogyakarta.	250,576,800.00	32,055,600.00	12.79	89,365,200.00	35.66	154,294,800.00	61.58	241,473,600.00	96.37
01 04 02	Kabupaten Bantul.	244,879,200.00	33,582,000.00	13.71	88,300,800.00	36.06	147,506,400.00	60.24	231,963,600.00	94.73
01 04 03	Kabupaten Kulonprogo.	71,096,400.00	10,276,800.00	14.45	27,129,600.00	38.16	45,061,200.00	63.38	70,969,200.00	99.82
01 04 04	Kabupaten Gunungkidul.	77,920,800.00	11,078,400.00	14.22	29,823,600.00	38.27	50,761,200.00	65.14	79,333,200.00	101.51
01 04 05	Kabupaten Sleman.	365,400,000.00	57,406,800.00	15.71	150,702,000.00	41.24	248,599,200.00	68.03	389,192,400.00	106.51
1 00 00 00 1 4 09	Pendapatan Lain-lain.	230,432,500.00	20,303,300.00	8.81	61,412,985.00	26.65	96,531,679.00	41.89	2,695,501,728.17	1169.76
1 12 01 00 1 4 09 01	Ijin Komunikasi Radio Antar Penduduk.	30,442,500.00	3,602,500.00	11.83	6,322,500.00	20.77	10,365,000.00	34.05	14,160,000.00	46.51
1 12 01 00 1 4 09 02	Ijin Amatir Radio.	19,900,000.00	2,455,000.00	12.34	4,525,000.00	22.74	10,287,500.00	51.70	16,882,500.00	84.84
1 03 01 01 1 4 09 03	Hasil samping KM/PMT.	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,300,000.00	46.11
	KM DIY-01	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PMT	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 03 01 01 1 4 09 04	Pemanfaatan Aset PPP Sadeng.	10,000,000.00	0.00	0.00	3,580,000.00	35.80	4,330,000.00	43.30	9,980,000.00	99.80
1 03 01 01 1 4 09 05	Hasil samping uji coba.	30,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,461,500.00	90.48
	Budidaya Air Tawar				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 11 01 00 1 4 09 07	Pemanfaatan lahan di lahan manfaat jalan.	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,824,000.00	114.56
	Jalan untuk pemasangan iklan.						0.00	0.00	0.00	0.00
1 08 03 00 1 4 09 08	Pengantian biaya cetak.	18,000,000.00	6,807,000.00	37.82	10,541,000.00	58.56	19,160,000.00	106.44	23,779,000.00	132.11
	Kartu anggota perpustakaan.	10,000,000.00	3,626,000.00	36.26	4,794,000.00	47.94	7,588,000.00	75.88	10,154,000.00	101.54
	Kartu bebas pustaka.	8,000,000.00	3,181,000.00	39.76	5,747,000.00	71.84	11,572,000.00	144.65	13,625,000.00	170.31
1 05 01 01 1 4 09 09	Penjualan Hasil Alat Tepat Guna	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	100.00
	Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna.(BPTTG)						0.00	0.00	0.00	0.00
1 05 01 01 1 2 09 10	Jasa Perbengkelan.	6,500,000.00	1,413,600.00	21.75	2,023,850.00	31.14	3,110,750.00	47.86	6,550,750.00	100.78
	Jasa Perbengkelan BPTTG.		1,413,600.00		2,023,850.00	31.14	3,110,750.00	47.86	6,550,750.00	100.78
1 01 09 00 1 2 09 11	Sewa Anjungan DIY TMII di Jakarta	10,240,000.00	360,000.00	3.52	3,480,000.00	33.98	9,020,000.00	88.09	10,600,000.00	103.52
1 01 09 00 1 2 09 12	Sewa Mess Pemda DIY di Jakarta	27,500,000.00	1,650,000.00	6.00	7,235,000.00	26.31	23,190,000.00	84.33	33,215,000.00	120.78
1 08 03 00 1 4 09 13	Sewa internet	2,000,000.00	0.00	0.00	700,000.00	35.00	1,626,000.00	81.30	2,226,000.00	111.30
	PENERIMAAN LAIN-LAIN YANG TIDAK DITARGETKAN	0.00	4,015,200.00	0.00	15,640,639.00	0.00	20,775,129.00	0.00	2,448,693,228.17	0.00
	TPTGR								45,586,000.00	0.00
	Temuan Pemeriksaan BPK, Irjen dan bawasda								315,789,049.00	0.00
	Denda Keterlambatan Penyerahan Pekerjaan								112,373,201.00	0.00
	Sewa Aula PSAA Dinas Sosial								1,200,000.00	0.00
	Pemanfaatan Ruang kelas dan Badan Diklat								37,681,000.00	0.00
	Sewa Jaringan Internet BID								3,300,000.00	0.00
	Pengembalian Kelebihan								126,655,689.00	0.00
	Lain lain Penerimaan								1,726,300,351.17	0.00
	Denda keterlambatan		1,365,200.00		2,423,500.00	0.00	3,425,900.00	0.00	4,229,800.00	0.00
	Denda sewa tanah dan bangunan jl podang 4 depok slim		2,650,000.00		2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	0.00	3,175,000.00	0.00
	Sharing Bandara Adisucipto				4,412,533.00		25,524,666.00	0.00	45,098,399.00	0.00

Lanjutan Lampiran 5

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2005	S/D TW I	%	S/D TW II	%	S/D TW III	%	S/D TW IV	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
	Toilet								2,082,250.00	0.00
	Lain-lain (Milik Dishutbun)				6,047,139.00	0.00	9,229,229.00	0.00	19,752,489.00	0.00
	Penjualan Sapi Afkir (BPMBPT)		0.00		4,520,000.00	0.00	5,470,000.00	0.00	5,470,000.00	0.00
1 01 04 00 2	DANA PERIMBANGAN	271,047,087,314.04	61,494,144,426.00	22.69	134,290,328,333.00	49.55	204,616,865,111.00	75.49	277,237,967,321.00	102.28
1 01 04 00 2 1	BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK	32,355,087,314.04	1,821,144,426.00	5.63	14,944,328,333.00	46.19	25,597,865,111.00	79.12	38,545,967,321.00	119.13
1 01 04 00 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	32,355,087,314.04	1,821,144,426.00	5.63	14,944,328,333.00	46.19	25,597,865,111.00	79.12	38,545,967,321.00	119.13
9 01 04 00 2 1 01 01	Pajak Bumi dan Bangunan	11,619,345,105.00	558,467,511.00	4.81	3,574,460,641.00	30.76	8,432,307,013.00	72.57	15,277,454,871.00	131.48
	Penerimaan PBB	11,619,345,105.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pedesaan	1,625,567,502.60			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Perkotaan	6,452,688,970.80			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pertambangan	3,541,088,631.60			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Biaya Pemungutan.	0.00								
	Pedesaan	53,182,146.69			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Perkotaan	187,207,642.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pertambangan	131,151,430.80			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 01 04 00 2 1 01 02	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4,882,071,680.00	1,262,676,915.00	25.86	3,443,032,492.00	70.52	5,275,305,298.00	108.05	7,621,886,891.00	156.12
1 01 04 00 2 1 01 03	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (termasuk PPh Ps 21)	15,853,670,529.04	0.00	0.00	7,926,835,200.00	50.00	11,890,252,800.00	75.00	15,646,625,559.00	98.65
1 01 04 00 2 2	DANA ALOKASI UMUM	238,692,000,000.00	59,673,000,000.00	25.00	119,346,000,000.00	50.00	179,019,000,000.00	75.00	238,692,000,000.00	100.00
1 01 04 00 2 2 01	Dana Alokasi Umum	238,692,000,000.00	59,673,000,000.00	25.00	119,346,000,000.00	50.00	179,019,000,000.00	75.00	238,692,000,000.00	100.00
1 01 04 00 2 2 01 01	Dana Alokasi Umum	238,692,000,000.00	59,673,000,000.00	25.00	119,346,000,000.00	50.00	179,019,000,000.00	75.00	238,692,000,000.00	100.00
1 01 04 00 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	20,429,000,000.00	2,339,250,000.00	11.45	4,678,500,000.00	22.90	18,869,500,000.00	92.37	20,429,000,000.00	100.00
1 01 04 00 3 1 01	Bantuan Dana Penyesuaian dari Pemerintah	20,429,000,000.00	2,339,250,000.00	11.45	4,678,500,000.00	22.90	18,869,500,000.00	92.37	20,429,000,000.00	100.00
1 01 04 00 3 1 01 01	Bantuan Dana Penyesuaian	20,429,000,000.00	2,339,250,000.00	11.45	4,678,500,000.00	22.90	18,869,500,000.00	92.37	20,429,000,000.00	100.00
	Murni	9,357,000,000.00	2,339,250,000.00	25.00	4,678,500,000.00	50.00	7,017,750,000.00	75.00	9,357,000,000.00	100.00
	Ad-hoc I	11,072,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,851,750,000.00	107.04	11,072,000,000.00	100.00

Yogyakarta, 2006
Kepala BPKD Propinsi DIY

Drs.H Mulyanto,MM
NIP. 490 018 341